



**Dr. Paisol Burlian, S.Ag, M.Hum**

# **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**Editor : Suryadi, SH, M.H**





Dr. Paisol Burlan, S.Ag, M.Hum

# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



RAFAH  
PRESS



Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA:

Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



RAFAH  
PRESS

## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Editor

Suryadi, SH, M.H



RAFAH  
PRESS



*pendidikan Kewarganegaraan*

Dr. Paisol Burlian, S.Ag. M.Hum

© 2013, Rafah Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak terbit pada Rafah Press

Anggota IKAPI

Setting dan tata letak: Rafah Press

Editor: Suryadi, SH, M.H

Design Cover: Muhtarom, S.Pd.I

Cetakan I : 2013

ISBN : 978-979-1339-96-4

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rafah Press

Jl. Prof. K.H. Z. Abidin Fikry KM 3,5 Palembang  
(Gedung BAAK Lama)

## KATA PENGANTAR EDITOR

Secara umum penyusunan Buku Pendidikan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Sdr. Dr. Paisol Burlian, S.Ag. M. Hum adalah mengajak kepada mahasiswa untuk memahami betapa pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan perlu dipelajari oleh setiap generasi bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian menjadi warga negara Indonesia yang baik.

Selain itu dapat membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyusunan Buku ini adalah untuk membangkitkan kesadaran nasional dan membentuk kepribadian mahasiswa agar memiliki:

1. Kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual.
2. Memiliki wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air.
3. Memiliki wawasan kebangsaan demi Ketahanan Nasional (*national resilience*) untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara (*national survival*).



4. Memiliki pola pikir dan pola sikap yang komprehensif integral dalam memecahkan masalah dan implementasi pembangunan nasional pada seluruh aspek kehidupan nasional.

Palembang, April 2013  
Editor

Suryadi, SH, MH

## KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya, maka saya dapat menyelesaikan penyusunan Buku sederhana ini diberi judul "Pendidikan Kewarganegaraan" yang ada dihadapan pembaca ini merupakan hasil kerja keras penulis ditengah-tengah kesibukan dalam menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dalam rangka mengisi kekurangan literatur Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan Mata Kuliah wajib di pelbagai fakultas dan jurusan atau kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK). Buku ini yang tidak kalah pentingnya juga sebagai pengetahuan awal dan medium perekat masyarakat Indonesia pada umumnya dan generasi muda khususnya, untuk selalu cinta dengan tanah airnya, yang akhirnya tetap setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga dapat mengantisipasi isu yang aktual di berbagai daerah untuk memisahkan diri dari NKRI (disintegrasi bangsa), yang tentunya tidak kita ingini dan bertentangan cita-cita pendiri bangsa ini.

Membaca buku ini bukan hanya menambah ilmu pengetahuan dibidang kewarganegaraan saja, tetapi sekaligus dapat menjawab tantangan dari sebagian kecil masyarakat Indonesia yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari NKRI yang sama-sama kita cintai ini dan menggugah anak bangsa ini dengan tetap dalam kandungan Ibu Pertiwi.



Selanjutnya penulis sangat menyadari bahwa dalam buku ini masih terdapat kekurangan dari berbagai sisi, untuk itu saran dan kritik tentunya penulis harapkan demi kesempurnaan di masa mendatang. Akhirnya saya sebagai penulis berharap semoga Allah memberikan pahala yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal'Alamiin.

Palembang, 12 Juli 2013  
Penulis

Dr. Pisol Burlian, S.Ag.M.Hum

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar Editor	v
Kata Pengantar Penulis	ix
Daftar Isi	xi

<b>Bab 1 pendahuluan</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Dan Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan	3
B. Manfaat Dan Tujuan Yang Diharapkan	7
C. Perkembangan Pendidikan Bela Negara	9
D. Pentingnya Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa	11

<b>Bab 2 Filsafat Pancasila</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Filsafat	20
B. Fungsi Filsafat	24
C. Pengertian Pancasila Sebagai Sistem	25
D. Kesatuan Sila-Sila Pancasila	27
E. Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Sistem Filsafat	29
F. Pancasila Sebagai Dasar Nilai Fundamental Bagi Bangsa Dan Negara	37



G. Makna Nilai-Nilai Setiap Sila Pancasila	41
H. Ideologi Pancasila	46
<b>Bab 3 Identitas Nasional</b>	65
A. Pengertian Identitas Nasional	67
B. Unsur-Unsur Pembentukan Identitas Nasional	69
C. Hakikat Negara	71
D. Bangsa Dan Negara Indonesia	77
E. Identitas Nasional Indonesia	81
<b>Bab 4 Demokrasi Indonesia</b>	85
A. Demokrasi	87
B. Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia	96
C. Demokrasi di Indonesia Saat Ini	100
D. Tantangan dan Harapan	103
<b>Bab 5 Negara Dan Konstitusi</b>	107
A. Pengertian Konstitusi	109
B. Tujuan Konstitusi	113
C. Perubahan Undang-Undang 1945	116
D. Sistem Konstitusi di Indonesia menurut UUD 1945	121
<b>Bab 6 Hak Asasi Manusia Dan Rule Of Law</b>	127
A. Pengertian Hak Asaasi MANusia	128
B. Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia	132
C. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia	133

D. HAM di Indonesia	142
E. Hak Asasi Manusia Dalam Perundang-Undangan Nasional	147
F. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	148
G. Pengertian dan Ruang Lingkup Rule of Law	151
H. Prinsip-Prinsip Rule Of Law	152
I. Prinsip-Prinsip Rule of law secara formal di Indonesia	155
<b>Bab 7 Geopolitik Indonesia</b>	157
A. Geopolitik Indonesia	158
<b>Bab 8 Geostrategi Indonesia</b>	171
A. Pengertian Geopolitik	173
B. Geopolitik Indonesia	177
C. Hubungan Geopolitik dan Geostrategi	179
D. Masalah Teritorial	181
E. Wawasan Nusantara	181
F. Geostrategi Indonesia Dalam Kepentingan Teritorial	183
G. Ketahanan Nasional	184
H. Implementasi Wawasan Nusantara	187
I. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara	188
<b>Bab 9 Good Governance</b>	193
A. Pengertian dan Latar Belakang Good Governance	196
B. Prinsip dan Konsepsi Good Governance	204
C. Karakteristik Dasar Good Governance	223

D. Penerapan Prinsip Good Governance pada Sektor Publik	224
E. Struktur Organisasi dan Manajemen Perubahan dalam Good Governance	229
F. <i>Good Governance</i> dalam Kerangka Otonomi Daerah	236
G. Implementasi Penerapan e-government di Indonesia	239
 Kesimpulan	 245
Daftar Pustaka	251
Riwayat Hidup Penulis	259
Riwayat Hidup Editor	261



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap warganegara hakekatnya dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya. Untuk itu diperlukan bekal ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, moral dan budaya bangsa. Fungsinya adalah sebagai panduan dan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan nilai budaya bangsa menjadi pijakan utama, karena tujuan pembelajaran ialah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, juga sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan budaya bangsa. Pendidikan Kewargaan (*civic education*) sesungguhnya bukanlah agenda baru di muka bumi. Hanya saja, proses globalisasi yang melanda dunia pada dekade akhir abad 20 telah mendorong munculnya pemikiran baru tentang pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara. Di Eropa, Dewan Eropa telah memprakarsai proyek demokratisasi untuk menopang pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Hal yang sama juga terjadi di Australia, Canada, Jepang dan negara Asia lainnya.

Di Amerika Serikat pendidikan kewarganegaraan diatur dalam kurikulum sosial selama satu tahun, yang pelaksanaannya diserahkan kepada negara-negara bagian. Materi yang diajarkan diarahkan pada:

1. Bagaimana menjadi warga yang produktif dan sadar akan haknya sebagai warga Amerika dan warga dunia.
2. Nilai-nilai dan prinsip demokrasi konstitusional.
3. Kemampuan mengambil keputusan selaku warga masyarakat demokratis dan multikultural di tengah dunia yang saling tergantung.

Di Australia, pendidikan kewarganegaraan ditekankan pada *discovering democracy* yaitu:

- a. Prinsip, proses dan nilai demokrasi
- b. Proses pemerintahan
- c. Keahlian dan nilai partisipasi aktif di masyarakat.

Di Negara-negara Asia, Jepang misalnya, materi pendidikan kewarganegaraan ditekankan pada Japanese history, ethics dan philosophy. Di Filipina materi difokuskan pada: Philipino, family planning, taxation and landreform, Philipine New Constitution dan study of humanity (Kaelan, 2003:2). Hongkong menekankan pada nilai-nilai Cina, keluarga, harmoni sosial, tanggung jawab moral, mesin politik Cina dan lain-lain. Taiwan menitikberatkan pada pengetahuan kewarganegaraan (disusun berdasarkan psikologi, ilmu sosial, ekonomi, sosiologi, hukum dan budaya); perilaku moral (kohesi sosial, identitas nasional dan demokrasi); dan menghargai budaya lain. Thailand, berusaha :

1. Menyiapkan pemuda menjadi warga bangsa dan warga dunia yang baik.
2. Menghormati orang lain dan ajaran Budha.
3. Menanamkan nilai-nilai demokrasi dengan raja sebagai kepala negara.

Beberapa negara yang lain juga mengembangkan studi sejenis, yang dikenal dengan nama Civic Education. Dari sini terlihat bahwa secara umum pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Asia lebih menekankan pada aspek moral (karakter individu), kepentingan komunal, identitas nasional dan perspektif internasional, sedangkan Amerika dan Australia lebih difokuskan pada pentingnya hak dan tanggung jawab individu, sistim dan proses demokrasi, HAM dan ekonomi pasar (Sobirin, 2003:11-12).

## B. Rumusan Masalah

Beritik tolak dari permasalahan tersebut maka kita dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manfaat dan tujuan yang diharapkan?
2. Bagaimana perkembangan pendidikan bela negara?
3. Bagaimana pentingnya Mata Kuliah pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa?

## C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui manfaat dan tujuan yang diharapkan, perkembangan pendidikan bela negara dan pentingnya mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa.

## PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang dan Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

- a) Tahun 1945-2004 negara Indonesia menuju demokrasi. Pemilu belum luber, masih menggunakan wakil rakyat ( DPR )



- b) Tahun 1994 oleh AS baru memasukkan Civic Education dalam pendidikan
- c) Dewan erpa merespon dan memprakarsai untuk mengembangkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan
- d) Kecenderungan pembangunan kurikulum pendidikan di Eropa mempengaruhi sikap Negara- Negara di Asia, mislanya Jepang, Indonesia.
- e) Era koalisi di tingkat lokal maupun regional, pengembangan pendidikan Kewarganegaraan menjadi tuntutan jaman.
- f) Generasi muda mengatakan "Bela Negara hanya menjadi kewajiban para aparat Negara".
- g) Kemudian muncul penelitian dari berbagai Negara di dunia, yaitu:
- h) Perlunya melakukan kajian ulang terhadap prinsip-prinsip dan tujuan pendidikan di Indonesia. UUD 1945: 27( WNI wajib membela Negara)
- i) Hasil penelitian menunjukkan gambaran yang beragam tentang praktek operasionalisasi pendidikan di berbagai Negara.
- j) Pendidikan kewarganegaraan di Australia meliputi 3 mapel yaitu Sosiologi, Geografi, dan Sejarah.
- k) Di Hongkong pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran pilihan melalui pelajaran ekstra kurikuler, papan display, dan diskusi-diskusi tingkat sekolah.
- l) Di Jepang pendidikan Kewarganegaraan diberikan melalui pendidikan moral, agama, serta ilmu sosial, ketiga mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran wajib.

- m) Di Taiwan mapel wajibnya yaitu; sejarah, politik, bidang studi ekonomi, sosiologi, kewarganegaraan.
- n) Di Indonesia menggunakan *'separate approach'* (berdiri sendiri) melalui mapel khusus yaitu: Pkn, Mata kuliah dasar khusus untuk Perguruan Tinggi (Pancasila dan kewiraan, penataran P4). Mata kuliah tersebut gagal karena terlalu normatif, materi cenderung militeristik, dan pendidikan tak demokratis.
- o) Beberapa kegagalan di atas memberikan gambaran bahwa perubahan paradigma dalam *civic education* yang dikembangkan di lembaga pendidikan Perubahan dalam paradigma materi diarahkan secara sistematis pada pengembangan wacana demokrasi yang berkembang, sednagkan perubahan paradigma metodologis di arahkan untuk mengembangkan daya nalar anak didik secara kritis dalam kelas-kelas yang partisipatif sehingga mereka benar benar dapat mengalami demokrasi dalam pembelajaran mereka.
- p) Latar belakang di atas member pengertian akan pentingnya *civic education* di Indonesia atas pertimbangan lemahnya nilai-nilai *good citizen* pada masyarakat yang sedang mengalami transformasi dan nilai - nilai otoritarianisme ke nilai nilai demokrasi.
- q) Dengan demikian perlu civic education sebagai salah satu jalan terbaik mengubah mentalitas masyarakat Indonesia agar menjadi warga Negara yang partisipatif di negerinya sendiri.
- r) Salah satu peluang dalam mengembangkan civic education di Indonesia adalah melalui lembaga perguruan tinggi, Perguruan tinggi memiliki akses



yang kuat dengan masyarakat, karena kepercayaan masyarakat bahwa perguruan tinggi merupakan wadah bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang di aplikasikan melalui Tri Dharama Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Di samping itu perguruan tinggi juga memiliki akses yang kuat untuk melibatkan elemen-elemen bangsa yang lain, seperti LSM.

- s) Semangat dan jiwa yang tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 (antara lain Pasal 30), serta pengalaman perjuangan bangsa Indonesia untuk menjamin tetap tegaknya NKRI selama lebih dari setengah abad telah menumbuhkan tekad dan keyakinan bangsa Indonesia serta merupakan suatu hal yang tak terelakan, bahwa kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia. Semangat demikian inilah yang tersirat dalam pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Tiap-tiap warganegara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara". Rumusan pasal 30 UUD 1945 ini mengandung makna adanya semangat "demokratisasi" dalam penyelenggaraan pembelaan Negara. Demokratisasi dalam bidang aspek-aspek kehidupan bangsa, mempersyaratkan tiap-tiap warganegara memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya itu. Namun demikian disadari bahwa kesadaran warganegara terhadap hak dan kewajibannya itu tidak dibawa sejak lahir, tetapi harus ditanamkan, ditumbuhkan serta dikembangkan yaitu melalui upaya sosialisasi. Sosialisasi adalah upaya memberikan pengetahuan

dan keterampilan kepada seseorang agar ia dapat melaksanakan peranannya dalam kehidupan social tertentu. Upaya sosialisasi yang terbaik adalah melalui pendidikan. Berdasarkan pada pemikiran demikian itu, pendidikan kewiraan sebagai upaya untuk menumbuhkan kembangkan kesadaran hak dan kewajiban warganegara dalam bela Negara dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tinggi.

- 1) Dalam era reformasi, berturut-turut dengan keputusan Mendiknas No.232/U/2000, Kep Dirjen Dikti No.38/Dikti/Kep/2002, ditentukan bahwa nama mata kuliah Pendidikan kewiraan secara formal tidak lagi digunakan, istilah yang digunakan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam komponen kurikulum Pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan bersama-sama pendidikan pancasila dan pendidikan Agama merupakan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).

## II. Manfaat dan tujuan yang diharapkan

Generasi penerus melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlakukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah



air, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Selain itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Pengembangan nilai, sikap, dan kepribadian diperlukan pembekalan kepada peserta didik di Indonesia yang diantaranya dilakukan melalui Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Alamiah Dasar (sebagai aplikasi nilai dalam kehidupan) yang disebut kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam komponen kurikulum perguruan tinggi.

Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara akan terwujud dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupannya sehari-hari.

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang:

- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa
- Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

a. Beretika profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.

b. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu "memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945".

Dalam perjuangan non fisik, harus tetap memegang teguh nilai-nilai ini di semua aspek kehidupan, khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme; menguasai IPTEK, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing memelihara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan berpikir obyektif rasional serta mandiri.

### C. Perkembangan Pendidikan Bela Negara

#### 1. Pengertian dan pemahaman tentang Bangsa dan Negara

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Atau bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Jadi Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara/Indonesia. Negara adalah



suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial.

## 2. Situasi NKRI terbagi dalam periode-periode.

Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai 1965 disebut periode Orde Lama. Ancaman yang dihadapi datangnya dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, menumbuhkan pemikiran mengenai cara menghadapinya. Pada tahun 1954, terbitlah Produk Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat (PPPR) dengan Nomor 29 Tahun 1954. Sehingga terbentuklah organisasi-organisasi perlawanan rakyat pada tingkat desa (OKD) dan sekolah-sekolah (OKS).

Tahun 1965 sampai 1998 disebut periode baru atau Orde Baru. Ancaman yang dihadapi dalam periode ini adalah tantangan non fisik. Pada tahun 1973 keluarlah Ketetapan MPR dengan Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN, dimana terdapat penjelasan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Lalu pada tahun 1982 keluarlah UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dengan adanya penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi.

Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi, untuk menghadapi perkembangan jaman

globalisasi maka diperlukan undang-undang yang sesuai maka keluarlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kurikulum Pendidikan kewarganegaraan.

## 13. Pentingnya Mata Kuliah

### Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa

Setiap kali kita mendengar kata kewarganegaraan, mata tidak langsung otak merespon dan mengaitkan kewarganegaraan dengan pelajaran kewarganegaraan pada saat sekolah, dan mata kuliah kewarganegaraan pada saat kita kuliah bisa jadi kata kewarganegaraan di dalam memori otak teratapi kuat karena setiap tahun dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas ada pelajaran kewarganegaraan yang harus dipelajari, dan ternyata saat kuliah juga ada. Dan di dalam bangku perkuliahan kita akan mempelajari lebih dalam seberapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran setelah terpecah dari PPKn ataupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada awalnya di gabung menjadi satu, karena isi dari Pendidikan Kewarganegaraan sendiri bersumber dari Pancasila itu sendiri. Selanjutnya di pecah menjadi mata pelajaran sendiri karena Pendidikan Kewarganegaraan dianggap penting untuk di ajarkan kepada siswa dan dalam Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan materi kewarganegaraan yang lebih luas dan tidak hanya bersumber langsung dari Pancasila. Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan bagi sebagian mahasiswa tidak ubahnya mempelajari Pancasila tahap dua, atau bahkan tidak jauh berbeda dengan Pendidikan Moral Pancasila dan Sejarah



Bangsa. Beberapa materinya memang berkaitan ataupun sama. Itulah mengapa Pendidikan kewarganegaraan selalu "dianak tirikan" dalam percaturan dunia pendidikan. Menurut orang kebanyakan, lebih penting belajar matematika daripada PKn.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa. Mahasiswa adalah bibit unggul bangsa yang di mana pada masanya nanti bibit ini akan melahirkan pemimpin dunia. Karena itulah diperlukan pendidikan moral dan akademis yang akan menunjang sosok pribadi mahasiswa. Kepribadian mahasiswa akan tumbuh seiring dengan waktu dan mengalami proses pembenahan, pembekalan, penentuan, dan akhirnya pematangan prinsip diri. Negara, masyarakat masa datang, diperlukan ilmu yang cukup untuk dapat mendukung kokohnya pendirian suatu Negara.

Negara yang akan melangkah maju membutuhkan daya dukung besar dari masyarakat, membutuhkan tenaga kerja yang lebih berkualitas, dengan semangat loyalitas yang tinggi. Negara didorong untuk menggugah masyarakat agar dapat tercipta rasa persatuan dan kesatuan serta rasa turut memiliki. Masyarakat harus disadarkan untuk segera mengabdikan dirinya pada negaranya, bersatu padu dalam rasa yang sama untuk menghadapi krisis budaya, kepercayaan, moral dan lain-lain. Negara harus menggambarkan image pada masyarakat agar timbul rasa bangga dan keinginan untuk melindungi serta mempertahankan Negara kita. Pendidikan kewarganegaraan

adalah sebuah sarana tepat untuk memberikan gambaran nyata tentang hal-hal yang bersangkutan tentang kewarganegaraan pada mahasiswa.

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu berisi materi lain mengenai pluralisme yakni sikap menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreatifitas. Pendidikan itu mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Seperti yang pernah diungkapkan salah satu rektor sebuah universitas, "tanpa pendidikan kewarganegaraan yang tepat akan lahir masyarakat egois. Tanpa penanaman nilai-nilai kewarganegaraan, keragaman yang ada akan menjadi penjara dan neraka dalam artian menjadi sumber konflik. Pendidikan, lewat kurikulumnya, berperan penting dan itu terkait dengan strategi kebudayaan."

Beliau menambahkan bahwa ada tiga fenomena pasca perang dunia II, yaitu:

1. Fenomena pertama, saat bangsa-bangsa berfokus kepada nation-building atau pembangunan institusi negara secara politik. Di Indonesia, itu diprakarsai mantan Presiden Soekarno. Pendidikan arahnya untuk nasionalisasi.
2. Fenomena kedua, terkait dengan tuntutan memakmurkan bangsa yang kemudian mendorong pendidikan sebagai bagian dari market-builder atau penguatan pasar dan ini diprakarsai mantan Presiden Soeharto.
3. Fenomena ketiga, berhubungan dengan pengembangan peradaban dan kebudayaan. Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia sudah



menampakkan fenomena tersebut dengan menguatkan pendidikannya untuk mendorong riset, kajian-kajian, dan pengembangan kebudayaan.

Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Sehingga dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang tata Negara, menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa serta moral bangsa, maka takkan sulit untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan kejayaan Indonesia.

Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan antara lain agar mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai, agar mahasiswa memiliki kepedulian dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agama, dan nilai-nilai universal, agar mahasiswa mampu berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM, dan demokrasi, agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik, agar mahasiswa mampu meletakkan nilai-nilai dasar secara bijak (berkeadaban).

Pendidikan Kewarganegaraan lah yang mengajarkan bagaimana seseorang menjadi warga negara yang lebih

berprestasi. Karena kewarganegaraan itu tidak dapat dipelajari hanya saja melainkan harus dipelajari dan dihayati oleh masing-masing orang. Apalagi negara kita sedang menuju menjadi negara yang demokratis, maka secara tidak langsung warga negaranya harus lebih aktif dan berpartisipasi. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa harus mempelajari, agar kita bisa menjadi garda terdepan dalam melindungi negara. Gardu kokoh yang akan terus dan terus melindungi Negara walaupun akan banyak aral rintangan di depan.

Kita semua tahu bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap generasi baru memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga tercakup dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh Pendidikan Kewarganegaraan, akan lebih baik lagi jika Pendidikan ini di manfaatkan untuk pengembangan diri seluas-luasnya.

Rasa kewarganegaraan yang tinggi, akan membuat kita tidak akan mudah goyah dengan iming-iming kejayaan yang sifatnya hanya sementara. Selain itu kita tidak akan mudah terpengaruh secara langsung budaya yang bukan berasal dari Indonesia dan juga menghargai segala budaya serta nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Memiliki sikap tersebut tentu tidak bisa kita peroleh begitu saja tanpa belajar. Oleh karena itu mengapa Pendidikan



Kewarganegaraan masih sangat penting untuk para pelajar. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting manfaatnya, maka di masa depan harus segera dilakukan perubahan secara mendasar konsep, orientasi, materi, metode dan evaluasi pembelajarannya. Tujuannya adalah agar membangun kesadaran para pelajar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakan sebaik-baiknya dengan cara demokratis dan juga terdidik.

## BAB II

### FILSAFAT PANCASILA

#### 1. Latar Belakang

Sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila kembali diuji ketahanannya dalam era reformasi sekarang. Merakahnya matahari bulan Juni 1945, 67 tahun yang lalu ditandai dengan lahirnya sebuah peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila.

Sebagai filsafat Negara, tentu Pancasila ada yang memunculkannya. Pancasila memang merupakan karunia ilahiah dari Tuhan TME dan ternyata merupakan pedoman bagi umat bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, serta menjadi dasar sekaligus filsafat negara Republik Indonesia.

Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945. Bunyi dan ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 1968 adalah satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dan kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah, Mr Mohammad Yamin, Prof Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. Dapat dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan krisis politik di negara ini, yaitu pertama ialah karena secara intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang menantang Pancasila berarti dia menentang toleransi.

Kedua, Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencakup faham-faham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan faham lain yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Yang ketiga, karena sila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, selain itu, ideologi kediktatoran juga ditolak, karena bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berprikemanusiaan dan berusaha untuk berbudi luhur.

Dengan demikian bahwa filsafat Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

## 1. Rumusan Masalah

Untuk memperhatikan ulasan singkat latar belakang

Apakah maka dapat disusunlah rumusan masalah sebagai

1. Apakah sebenarnya filsafat Pancasila tersebut, dan bagaimana Pancasila tersebut muncul sebagai ideologi bangsa Indonesia?

2. Apakah fungsi dari filsafat Pancasila tersebut bagi bangsa dan Negara Indonesia?

3. Apakah yang menjadi bukti bahwa ideologi Pancasila menjadi dasar dari filsafat Negara Indonesia?

## 2. Tujuan

Tujuan dari Materi pembelajaran ini antara lain, yaitu:

1. Sebagai bahan kajian bagi para mahasiswa mengenai peranan ideologi Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan Negara Indonesia.

2. Sebagai kajian untuk mengetahui fungsi dan peranan ideologi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia.

3. Sebagai sarana untuk memahami ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia.

## 3. Manfaat

Manfaat teoritis dari pembelajaran ini antara lain, yaitu:

1. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang ideologi Pancasila.

2. Memberikan penjelasan mengenai terbentuknya ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia.

3. Memberikan penjelasan tentang fungsi daripada ideologi Pancasila tersebut bagi bangsa Indonesia.

Manfaat praktis dari pembelajaran ini antara lain, yaitu:



1. Menjelaskan secara singkat kepada masyarakat mengenai ideologi Pancasila.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan peranan ideologi Pancasila
3. Menjelaskan bagaimana munculnya ideologi pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia

## 5. Ruang lingkup

Pembelajaran ini membahas mengenai Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan Negara Indonesia, mula terbentuknya ideologi tersebut, di akuinya ideologi tersebut hingga fungsi dan peranan ideologi Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara

## PEMABAHASAN

### A. Pengertian Filsafat

Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata "philos" dan "sophos" menjadi philosophia. Philos berarti cinta atau teman, sophos berarti bijaksana. Jadi philosophia atau filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan/pengetahuan. Seorang ahli pikir disebut filosof. Kata ini mula-mula dipakai oleh Herakleitos.

Pengetahuan bijaksana memberi kebenaran, orang yang mencintai pengetahuan bijaksana, karena itu yang mencarinya adalah orang yang mencintai kebenaran adalah karakteristik dari setiap filosof dari dahulu sampai sekarang. Di dalam mencari kebenaran dan kebijaksanaan itu, filosof menggunakan cara dengan berfikir sedalam-dalamnya (merenung). Hasil filsafat (berfikir sedalam-dalamnya) disebut filsafat atau falsafah. Filsafat sebagai hasil berfikir sedalam-dalamnya diharapkan.

Mengapa suatu yang paling bijaksana atau setidaknya mendekati kesempurnaan. Filosof ulung Prof. DR. H. J. Langeveld dalam bukunya 'Opweg naar wijsgerig denken' (Jalan menuju filsafat) berpendapat bahwa kita mencapai filsafat manakala kita memikirkan pernyataan yang amat radikal, yakni dari dasar sampai pada konsekuensinya yang terakhir dan secara sistematis, yakni dalam penuturan yang logis dalam urutan yang saling berkaitan yang bertanggung jawab. Apa yang terbentuk dalam keseluruhan penuturan dan uraian disebut filsafat.

Filsafat terbentuk karena berfilsafat. Dapat disimpulkan bahwa berfilsafat adalah mencari kebenaran tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan dengan berfikir yang radikal, sistem radikal dan universal. Dan filsafat adalah sistem kebenaran tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan sebagai hasil dari berfikir secara radikal, sistem radikal, dan universal.

Profesor Langeveld membedakan antara filosof dan ahli filsafat. Filosof adalah orang yang menghasilkan/menciptakan karya filsafat, sedangkan ahli filsafat adalah orang yang menguasai pengetahuan filsafat, dapat bicara tentang, membahas dan mengajarkan filsafat (sarjana Filsafat) tetapi tidak menciptakan karya filsafat.

Pengertian lainnya :

- 1) Plato (427 SM-348 SM). Ahli filsafat Yunani: Filsafat ialah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli.
- 2) Aristoteles (382-322): filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika.



Logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika.

- 3) Al-Farabi (870-950 M), ahli filsafat islam: filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam wujud bagaimanakah hakikat yang sebenarnya.
- 4) Immanuel Kant (1724-1804) ahli filsafat katolik: filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup empat persoalan :
  - a. Apakah yang dapat diketahui? (jawabnya: metafisika)
  - b. Apakah yang harus kita kerjakan? (jawabnya: etika)
  - c. Sampai dimanakah harapan kita? (jawabnya: agama)
  - d. Apakah yang dinamakan manusia? (jawabnya: antropologi)
- 5) Hasbullah Bakry seorang ahli filsafat Indonesia: ilmu filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.
- 6) Muhammad Yamin, S.H. berpendapat: "filsafat ialah pemusatan pikiran, sehingga manusia kepribadiannya itu dialami kesungguhan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa apa yang disebut filsafat adalah suatu usaha pemikiran manusia yang sungguh-sungguh, secara sistematis dan radikal untuk mencari kebenaran sesuai dengan ruang dan waktu.

Jika ditinjau dari lingkup pembahasannya, maka filsafat mencakup banyak bidang bahasan antara lain tentang ketuhanan, alam, pengetahuan, etika, logika, politik, ekonomi dan lainnya. Oleh karena itu seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan maka muncul dan berkembang juga ilmu filsafat yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu tertentu, misalnya filsafat sosial, filsafat hukum, filsafat politik, filsafat bahasa, filsafat ilmu pengetahuan, filsafat lingkungan, filsafat agama dan filsafat yang berkaitan dengan bidang ilmu lainnya.

Berdasarkan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut:

1. Filsafat sebagai produk mencakup pengertian

- a. Pengertian filsafat yang mencakup arti-arti filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep dari para filsaf pada zaman dahulu, teori, sistem atau pandangan tertentu, yang merupakan hasil dari proses berfilsafat dan yang mempunyai ciri-ciri tertentu.
- b. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai dari hasil aktivitas berfilsafat. Filsafat dalam pengertian jenis-jenis ini mempunyai ciri-ciri khas tertentu sebagai suatu hasil kegiatan berfilsafat dan pada umumnya proses pemecahan persoalan filsafat ini diselesaikan dengan kegiatan berfilsafat (dalam pengertian filsafat sebagai proses yang dinamis).

2. Filsafat sebagai suatu proses mencakup pengertian

Filsafat yang diartikan sebagai bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan



dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objek permasalahannya. Dalam pengertian ini filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan sekumpulan dogma yang hanya diyakini ditekan dan dipahami sebagai suatu sistem nilai tertentu, tetapi lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu cara dan metode tersendiri.

### B. Fungsi filsafat

Dengan memperhatikan makna filsafat sebagai proses dan produk filsafat, serta pengkajiannya, filsafat juga berfungsi bagi kehidupan manusia dalam kehidupannya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Fungsi tersebut antara lain, sebagai berikut :

- 1) Berfilsafat mengajak manusia bersikap arif dan berwawasan luas terhadap berbagai problem yang dihadapi. Manusia diharapkan mampu memecahkan problem tersebut dengan cara mengidentifikasinya agar jawaban-jawaban dapat diperoleh dengan mudah.
- 2) Filsafat dapat membentuk pengalaman kehidupan seseorang secara lebih kreatif atas dasar pandangan hidup atau ide-ide yang muncul karena keinginannya.
- 3) Filsafat dapat membentuk sikap kritis seseorang dalam menghadapi permasalahan, baik dalam komunitas, agama dan hal-hal lain diluar dirinya secara lebih arif, rasional dan tidak terjebak dalam fanatisme yang berlebihan.

1) Berfilsafat atau ilmuwan dibutuhkan kemampuan berfilsafat atau analisis kritis yang komprehensif dan mendalam atas berbagai masalah ilmiah yang dihadapi dalam suatu riset atau kajian ilmiah.

### 2) Pengertian Pancasila Sebagai Sistem

Pancasila yang terdiri dari atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Suatu kesatuan bagian-bagian.
- 2) Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri.
- 3) Saling berhubungan, saling ketergantungan.
- 4) Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem).
- 5) Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri. Dasar filsafat Negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian sila-sila Pancasila itu bersama-sama merupakan suatu kesatuan dan keutuhan. Setiap sila merupakan suatu unsur dari kesatuan Pancasila. Maka dasar filsafat Negara Pancasila adalah suatu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal.

Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Antara



sila-sila pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi. Sila yang satu senantiasa dikualifikasi oleh sila-sila yang lainnya. Secara demikian maka pancasila pada hakikatnya merupakan sistem, dalam pengertian bahwa bagian-bagian, sila-silanya saling berhubungan secara erat hingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Pancasila sebagai suatu sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian kefilosofan sebagaimana sistem filsafat lainnya antara lain materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, sosialisme dan sebagainya.

Kenyataan Pancasila yang demikian ini disebut *kenyataan objektif*, yaitu bahwa kenyataan itu ada pada pancasila sendiri terlepas dari sesuatu yang lain, atau terlepas dari pengetahuan orang. Kenyataan objektif yang ada dan terlekat pada pancasila, sehingga pancasila sebagai suatu sistem filsafat bersifat khas, dan berbeda dengan sistem filsafat lainnya. Hal ini secara ilmiah disebut ciri khas secara objektif. Misalnya kita mengamati jenis-jenis logam tertentu, emas, perak, tembaga dan lainnya, kesemua jenis logam ini mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi ciri khas yang dimiliki oleh sesuatu itu akan menunjukkan jati diri, atau sifat yang khas dan khusus yang tidak dimiliki oleh sesuatu lainnya. Oleh karena itu pancasila sebagai sistem filsafat akan memberikan ciri-ciri yang khas, yang khusus yang tidak terdapat pada sistem filsafat lainnya.

### 1.1.3. Kaitan Sila-Sila Pancasila dengan Pancasila dalam Hierarkis dan Berbentuk Piramida.

Pancasila adalah hierarkis dan mempunyai piramida. Pengertian matematika piramida menggambarkan hubungan hirarkis sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas dan juga dalam hal lain. Kalau dilihat dari letaknya, urutan-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan kedalaman, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang lebih luas. Jika urutan-urutan lima sila ada hubungan yang hirarkis yang satu kepada yang lain sehingga pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat.

Dalam urutan hirarkis dan piramida ini, maka ketuhanan yang maha Esa menjadi basis kemanusiaan, kerakyatan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkeadilan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial demikian selanjutnya. Sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila yang lainnya. Dengan demikian dimungkinkan penyesuaian dengan keperluan dan kepentingan keadaan, tempat dan waktu, sehingga sesuai dengan keperluan dan kepentingan keadaan, tempat dan waktunya, dalam pembicaraan kita berpokok pangkal atau memusatkan diri dalam hubungannya hirarkis piramida semestinya.



#### 1.4.2. Kesatuan Sila-Sila Pancasila yang Saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi

- 1) Di dalam tiap sila tersimpul sila-sila lainnya, yaitu
- 2) Sila Ketuhanan YME adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ialah ber-Ketuhanan YME, yang mempersatukan Indonesia yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Sila persatuan Indonesia adalah yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan adil dan beradab yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 5) Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan adil dan beradab yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 6) Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah yang ber-Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

**1.4.3. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat**  
Pancasila pada hakikatnya bukanlah suatu kesatuan yang bersifat formal logis saja, melainkan kesatuan dasar ontologis, dasar antropologis dari sila-sila Pancasila.

#### 1.4.4. Dasar Ontologis sila-sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya mencakup yang menyangkut sila-silanya saja, melainkan juga mencakup hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara umum merupakan dasar ontologis sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan satu yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat moral *anthropos*, oleh karena itu hakikat dasar ini dapat disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal ini dapat dikatakan sebagai berikut bahwa yang berketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Demikian juga jika kita pahami dari segi filsafat Negara bahwa Pancasila adalah dasar filsafat Negara, adapun pendukung pokok Negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri, sehingga tepatlah jika dalam Pancasila bahwa hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia.







memiliki unsur-unsur pokok yaitu *Susunan kodrat* yang terdapat atas raga dan jiwa. Tingkatan hakikat raga manusia ada unsur-unsur : *fisis anorganis, vegetatif, animal*. Adapun unsur (rohani) manusia terdiri atas unsur potensi jiwa manusia yaitu : *akal, rasa, kebendak*. Menurut Notonagoro dalam potensi rohaniah manusia terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan akal manusia merupakan sumber daya manusia dan dalam kaitannya dengan upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar terdapat tingkatan tingkat pemikiran sebagai berikut : *memoris, reseptif, kreatif*. Adapun potensi atau daya untuk meresap pengetahuan atau dengan kata lain transformasi pengetahuan terdapat tingkatan sebagai berikut: *demonstrasi, imajinasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham* (Notonagoro, tahun). Berdasarkan tingkatan tersebut di atas maka Pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia.

Epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat susunan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai suatu paham epistemologi maka Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

### 1.5.3. Dasar Aksiologis Sila-Sila Pancasila

Sila-sila pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, yaitu nilai-nilai

yang ada dalam Pancasila pada hakikatnya juga memiliki kesatuan.

Menurut berbagai macam pandangan tentang nilai yang terdapat dalam Pancasila terdapat pada titik tolak dan sudut pandang yang berbeda-beda dalam menentukan tentang nilai yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya kalangan matrealis yang beranggapan bahwa nilai tertinggi adalah nilai materi. Sedangkan menurut kalangan idealis, nilai-nilai dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang mengenaikan dan tidak mengenaikan, yang menyebabkan orang senang atau menderita.
- 2) Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, misalnya kesehatan.
- 3) Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan.
- 4) Nilai-nilai kerokhanian: dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai dari yang suci dan tidak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Walter G. everet menggolong-golongkan nilai-nilai manusia ke dalam delapan kelompok, yaitu:

- 1) Nilai-nilai Ekonomis (ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli)



- 2) Nilai-nilai kejasmanian (membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan)
- 3) Nilai-nilai hiburan (nilai-nilai permainan dan seni yang senggang yang dapat menyumbangkan pengayaan kehidupan)
- 4) Nilai-nilai sosial (berasal mula dari berbagai bentuk perserikatan manusia).
- 5) Nilai-nilai watak (keseluruhan dari keindahan kepribadian dan sosial yang diinginkan)
- 6) Nilai-nilai estetis (nilai keindahan dalam alam dan karya seni).
- 7) Nilai-nilai Intelektual (nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran)
- 8) Nilai-nilai keagamaan.

Menurut Notonagoro membagi nilai menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Nilai material*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- 2) *Nilai Vital*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- 3) *Nilai kerohanian*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam.
  - a. *Nilai kebenaran*, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia.
  - b. *Nilai keindahan*, atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan (*aesthetis, gevoel, rasa*) manusia.

... nilai moral, yang bersumber pada kehendak (*wil, willen, karsa*) manusia. ... yang merupakan nilai kerohanian ... dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

... banyak lagi cara mengelompokkan nilai, ... yang dilakukan N. Richer, yaitu pembagian ... membawa nilai, hakikat keuntungan yang ... dengan pengelompokan nilai menjadi ... dan eharistik. Nilai objektif dan nilai ... positif dan nilai negatif dan sebagainya.

Menurut Notonagoro bahwa nilai-nilai Pancasila ... nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian ... nilai material dan nilai vital. Dengan ... nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai ... itu juga mengandung nilai-nilai lain secara ... dan harmonis yaitu nilai material, nilai vital, nilai ... nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau ... maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan ... hierarkhis, di mana sila pertama yaitu ... yang maha Esa sebagai basisnya sampai dengan ... sebagai tujuannya.

#### Nilai-nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem

Pengertian Pancasila itu sebagai suatu sistem nilai ... dari sila-sila yang merupakan suatu sistem. Sila-sila ini merupakan kesatuan organik. Antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan secara erat, bahkan saling mengkualifikasi. Adanya sila yang kesatu mengkualifikasi adanya sila yang lainnya. Secara demikian,



Pancasila itu merupakan suatu sistem dalam pengertian umum, dalam artian bahwa bagian-bagiannya (sila-sila) saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh.

Dari uraian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu pula. Tampak dengan jelas bahwa nilai-nilai yang termuat dalam pancasila termasuk dalam tingkatan nilai yang tinggi, dengan urutan sila Ketuhanan yang paling menduduki tingkatan dan bobot nilai tertinggi, karena sila ini jelas mengandung nilai religius.

Pada tingkatan di bawahnya adalah keempat nilai manusiawi dasar. Apabila keempat nilai manusiawi dasar akan diberikan tingkatan dan bobot nilainya, maka akan kemanusiaan, tingkatan dan bobot nilainya layak dinyatakan berada dibawah nilai Ketuhanan. Nilai keadilan sebagai sila satu nilai manusiawi dasar, dalam hubungannya dengan tingkatan dan bobot nilai kiranya harus diletakkan pada tempat ketiga dibawah nilai kemanusiaan. Namun sesuai dengan sifat dasar bangsa Indonesia yang sangat menekankan kerukunan, maka nilai persatuan mempunyai tingkatan dan bobot nilainya, kiranya nilai persatuan memiliki tingkatan dan bobot yang lebih tinggi dari nilai kerakyatan, karena nilai kerakyatan lebih merupakan sarana yang perlu untuk mencapai persatuan. Suatu hal yang diberikan penekanan lebih dahulu yakni meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot nilai yang berbeda yang berarti ada keharusan untuk menghormati nilai yang lebih tinggi, nilai-nilai yang berbeda tingkatan dan bobot nilainya itu tidak saling berlawanan atau bertentangan, melainkan saling melengkapi.

## Sebagai Dasar Nilai Fundamental Bagi Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang bersifat sistematis. Sila-sila pancasila merupakan suatu sistem filsafat karena kelima sila tersebut merupakan kesatuan yang bulat, hirarkhi dan sistematis yang memiliki esensi makna yang utuh, bukan sekedar kumpulan dan memiliki makna sendiri-sendiri.

Sebagai pemikiran filosofis dari sila-sila pancasila sebagai filsafat negara adalah sebagai berikut. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, masyarakat serta kenegaraan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Sebagai kausalitas, nilai-nilai pancasila adalah bersifat objektif dan subjektif. Artinya esensi nilai-nilai pancasila bersifat universal yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan. Sehingga dimungkinkan nilai-nilai ini dapat diterapkan pada negara lain maupun barangkali nilai-nilai bukan Pancasila.

Nilai-nilai pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Rumusan dari sila-sila pancasila itu sebenarnya hakikat maknanya yang terdapat menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai.
- 2) Inti nilai-nilai pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan



mungkin juga pada bangsa lain baik dalam kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun kehidupan keagamaan.

- 3) Pancasila yang terkandung dalam pembukaan 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Sebagai konsekuensi jika nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan negara proklamasi 1945 diubah, maka sama halnya pembubaran negara proklamasi 1945. Hal ini sebagaimana terkandung dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1973 diperkuat Tap. No. V/MPR/1973. Jo. No. IX/MPR/1978.

Sebaliknya nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila bergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Pengertian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa material. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
- 2) Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa.
- 3) Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian yaitu, nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius, yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia.

### *Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara*

Pancasila merupakan suatu sumber hukum bagi negara Indonesia. Sebagai suatu filsafat, Pancasila merupakan suatu pandangan, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan, serta sikap batin.

Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan. Yaitu negara yang mempersatukan bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa.

Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh warga Indonesia. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran sila kelima.

Pokok pikiran ketiga bahwa negara berkedaulatan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yaitu berkedaulatan di tangan rakyat. Ini adalah penjabaran sila keempat.

Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara Indonesia atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung arti menghormati tinggi peradaban semua agama dalam kehidupan hidup Negara. Ini adalah penjabaran sila pertama dan kedua.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Dengan kata lain bahwa dalam penjabaran sila-sila Pancasila dalam peraturan perundang-undangan bukanlah



secara langsung dari sila-sila Pancasila melainkan melalui pembukaan UUD 1945.

**c) Nilai Pancasila Menjadi Sumber Norma Hukum**

Upaya mewujudkan keinginan ini dapat diwujudkan dengan menjadikan nilai-nilai dasar menjadi sumber dalam penyusunan norma hukum di Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai *grundnorm* (norma dasar) atau *staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.

Sistem hukum Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam ketetapan MPR No. II/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- c. Undang-undang.
- d. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU).
- e. Peraturan pemerintah
- f. Keputusan presiden
- g. Peraturan daerah

Dalam undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga menyebutkan adanya jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UUD negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-undang/ Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (perpu)
- c. Peraturan pemerintah

secara langsung dari sila-sila Pancasila melainkan melalui pembukaan UUD 1945.

**c) Nilai Pancasila Menjadi Sumber Norma Hukum**

Upaya mewujudkan keinginan ini dapat diwujudkan dengan menjadikan nilai-nilai dasar menjadi sumber dalam penyusunan norma hukum di Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai *grundnorm* (norma dasar) atau *staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.

**c) Nilai Pancasila Menjadi Sumber Norma Etik**

Upaya mewujudkan keinginan ini dapat diwujudkan dengan menjadikan nilai-nilai dasar menjadi sumber dalam penyusunan norma hukum di Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai *grundnorm* (norma dasar) atau *staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.

**c) Nilai Pancasila Menjadi Sumber Norma Etik**

Upaya mewujudkan keinginan ini dapat diwujudkan dengan menjadikan nilai-nilai dasar menjadi sumber dalam penyusunan norma hukum di Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai *grundnorm* (norma dasar) atau *staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.

**c) Nilai Pancasila Menjadi Sumber Norma Etik**

Upaya mewujudkan keinginan ini dapat diwujudkan dengan menjadikan nilai-nilai dasar menjadi sumber dalam penyusunan norma hukum di Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai *grundnorm* (norma dasar) atau *staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.



terkandung nilai bahwa negara yang didirikan atas pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Konsekuensi yang muncul kemudian adalah realisasi kemanusiaan terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar kemanusiaan (hak asasi manusia) bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaannya masing-masing. Hal itu telah dijamin dalam Pasal 29 UUD. Di samping itu, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan (atheisme).

#### b) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia yang berarti makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Potensi itu yang mendudukan manusia pada tingkatan martabat yang tinggi yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Adil berarti wajar yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab sinonim dengan sopan santun, berbudi luhur, dan susila, artinya, sikap hidup, keputusan dan tindakan harus senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan, dan kesusilaan. Dengan demikian, sila ini mempunyai makna kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan.

terkandung nilai bahwa negara yang didirikan atas pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang sejati berakar dan berdasar pada hakikat bahwa hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan...". Sila kedua: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

#### Kebangsaan Indonesia

Kebangsaan berasal dari kata satu artinya tidak berbilang. Persatuan mengandung pengertian kesatuan. Kebangsaan bermacam corak yang beraneka ragam. Kebangsaan Indonesia dalam sila ketiga mengandung persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia yang bersatu karena didorong untuk mencapai cita-cita kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan semangat yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia dan persatuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan persatuan dunia yang abadi.

Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Mahadewa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidak sempit (etnosentris), tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa serta keturunan. Hal ini sesuai dengan alenia keempat Pembukaan



UUD 1945 yang berbunyi, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam Batang Tubuh UUD 1945.

**d) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Kerakyatan berasal dari kata rakyat yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hirarki kekuasaan.

Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan ratio atau pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang bulat dan mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti, tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan.

Dengan demikian sila ini mempunyai makna bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila ini merupakan sendi atau asas kekeluargaan masyarakat sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan

dalam sila keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat..."

**e) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia.

Pengertian itu tidak sama dengan pengertian materialisme atau komunialistik karena keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Konsekuensinya meliputi:

- 1) Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara dan warganya dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- 2) Keadilan legal yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
- 3) Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga atau dengan lainnya secara timbal balik. Dengan demikian, dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan diantara keduanya sehingga tujuan harmonisasi akan dicapai. Hakikat sila ini dinyatakan



dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: "dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia...Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

## H. Ideologi Pancasila

### 1) Pengertian Ideologi

Secara etimologi ideologi berasal dari kata idea, yang berarti pemikiran, gagasan, atau konsep, dan logos berarti pengetahuan. Ideologi adalah sesuatu yang netral, idea atau gagasan yang merupakan pemikiran seseorang yang dianggap baik, yang akhirnya mendapat dukungan luas dari sekelompok masyarakat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh kelompok manusia termasuk masyarakat negara akan memberikan arah dalam kehidupannya, baik secara kelompok maupun individu.

Ada beberapa pengertian ideologi menurut beberapa kalangan, yaitu:

- 1) Maswardi Rauf adalah rangkaian/kumpulan nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama.
- 2) Carl J. Friederich, ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang berkaitan dengan tindakan.
- 3) Alfian, ideologi adalah pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh masyarakat tentang bagaimana, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka,

4) Kuntjoro Wibisono, menyebut tiga unsur yang sangat dominan dalam ideologi yaitu:

- a) Adanya keyakinan, yakni gagasan vital yang diyakini kebenarannya.
- b) Mitos, ada yang dimitoskan secara optik dan deterministik pasti akan menjamin tercapainya tujuan.
- c) Loyalitas, yakni menuntut adanya keterlibatan secara optimal dari para pendukungnya. Peranan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu:
  - i) Dimensi ideal, bahwa kualitas yang terkandung dalam ideologi mampu mendorong motivasi, menggugah harapan, optimisme akan terwujudnya cita-cita yang diharapkan.
  - ii) Dimensi realitas, dimensi ini memberikan citra ideal bahwa nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat adalah nilai yang sama yang diperjuangkan dalam ideologi tersebut, di mana apa yang diinginkan masyarakat adalah apa yang sebenarnya akan diwujudkan dalam perjuangan ideologinya.
  - iii) Dimensi fleksibilitas, menunjuk pada kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.



Terhadap dimensi fleksibilitas terdapat dua tipologi ideologi yaitu:

- (1) Ideologi terbuka adalah ideologi yang dalam eksistensinya memiliki unsur fleksibilitas, yang terbuka menyesuaikan diri terhadap pengaruh dari perkembangan dan pertumbuhan masyarakat pendukungnya.
- (2) Ideologi tertutup adalah ideologi yang eksistensinya disakralkan oleh masyarakat pendukungnya sehingga ideologi tersebut praktis menutup diri terhadap perkembangan dari luar.

## 2) Beberapa Ideologi Besar

Berdasarkan analisis Firdaus Syam ideologi berdasarkan sesungguhnya bersumber dari tiga pendekatan filsafat yaitu sebagai berikut:

- 1) Filsafat idealisme, adalah mengedepankan paham rasionalisme dan individualisme, yang dalam kehidupan berpolitik telah melahirkan ideologi liberalisme dan kapitalisme.
- 2) Filsafat materialisme, pemikiran ini mengedepankan paham emosionalisme berupa perjuangan kelas dengan kekerasan dan kolektivisme, yang dalam berpolitik telah melahirkan ideologi sosialis-komunisme.
- 3) Filsafat teologisme, yang berkembang dalam bentuk filsafat teologi statis dan dinamis:
  - a. Filsafat teologi statis, agama yang menempatkan ajaran Tuhan memegang peran sentral dalam politik kenegaraan yang dalam konstruk politik kenegaraan

menjadikan pemuka agama sebagai tokoh yang dikultuskan.

- b. Filsafat teologis dinamis, adalah agama yang menempatkan ajaran Tuhan sebagai sumber aspirasi, motivasi, inovasi dan ekspresi, yang menempatkan ajaran Tuhan sebagai faktor integratif dan pencerahan.

## 1) Ideologi Kapitalis-Liberalis

Paman renaissance melahirkan gerakan sekularisme dan humanisme, suatu gerakan yang mengagungkan kebebasan berfikir dan memisahkan diri masalah keduniaan dan masalah yang berkaitan dengan agama.

- 1) Kebebasan ini pada awalnya menyangkut kehidupan warga terkait dengan kebebasan dasar, seperti hak hidup, hak politik dan kemudian berkembang dalam kebebasan ekonomi dan sosial.
- 2) Jaminan penuh pada kepemilikan pribadi serta kebebasan penuh terhadap penggunaan kepemilikan pribadi.
- 3) Dalam politik kenegaraan pemerintah harus berdasarkan hukum dan harus mendapat persetujuan rakyat, harus ada pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan negara.
- 4) Menolak pemikiran yang bersifat dogma yang dianggap membelenggu kebebasan berfikir serta kebebasan untuk beragama.
- 5) Persaingan bebas dalam kegiatan ekonomi, yang mendorong terciptanya paham imperialisme dan kapitalisme dan sekarang terjelma dalam pola



konglomerasi ekonomi besar modal dan pemasaran) tidak lagi terbatas oleh wilayah negara.

#### 4) Ideologi Sosialisme

Robert Owen (1771-1837) seorang kapitalis kaya di Inggris, adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah sosialisme. Namun sebelum Owen sebenarnya ide perjuangan melawan ketidakadilan dampak dari individualisme dan kapitalisme yang berhasil mewujudkan revolusi industri di Inggris maupun di Prancis, pernah dilakukan oleh Francois Babeuf meskipun tidak menggunakan istilah sosialisme.

Pada dasarnya gerakan sosialis adalah perwujudan realistik dari demokrasi yang berorientasi publik. Oleh karena itu dilihat dari perjalanan sejarah sosialisme yang berhasil hanya dapat diwujudkan pada negara-negara dengan tradisi demokrasi yang kuat seperti Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, maupun Australia. Beberapa prinsip dalam paham sosialis adalah:

- 1) Dalam gerakan sosial pengaruh agama cukup kuat, sehingga doktrin agama masuk dalam kehidupan sosial ekonomi, seperti munculnya gerakan Kristiani sosialis di Inggris, dengan slogan bahwa agama harus disosialisasikan dan sosialis harus dikristenkan.
- 2) Idealisme etis, bahwa sosialis bukan gerakan politik dan atau ekonomi, tetapi suatu pemberontakan melawan kemeralatan, kebosanan, dan kemiskinan dibawah kapitalisme industri.

3) Kesempatan yang tepat, ungkapan ini telah dikemukakan oleh Fabian di Inggris tahun 1884, dengan motto awal dari masyarakat itu adalah, engkau harus menunggu saat yang tepat itu tiba engkau harus mengadakan serangan yang dahsyat, jika penundaan yang engkau lakukan itu sia-sia dan tidak akan membawa hasil.

4) Liberalisme, liberal telah menjadi sumber yang penting bagi sosialis. Dalam perkembangan ideologi sosialis menjadi dua aliran besar yaitu, sosialis evolusioner demokratis dan Sosialis revolusioner yang totaliter.

#### 5) Komunis Karl Marx

Dalam memperjuangkan pemikiran teori komunisme Marx, menjelaskan beberapa konsep ajarannya sebagai berikut:

##### 1) Perkembangan historis materialistik

Ini berlangsung melalui sintesis ketegangan atau kontradiksi yang inheren dialektika. Ini dipengaruhi oleh Hegel yang terdiri dari tesis, anti tesis dan sintesis. Hegel yang berada pada pemikiran abstrak dipindahkan Marx dalam bentuk dunia kebendaan atau materi.

Pandangan keagamaan yang absolut adalah Tuhan, dalam pandangan Marx yang absolut adalah refleksi materi. Menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa sosial sebagaimana fenomena biologis dan fisik. Pemikiran inilah yang memisahkan Marx dari Tuhan dan agama.



ii) Institusi sosial dan politik

Ini dibentuk dan ditentukan oleh ekonomi materialisme historis. Marx mengembangkan dialek cara produksi (tesis) menimbulkan gerakan anti tesis yaitu kekuatan produksi. Cara produksi tidak terbatas pada alat produksi tetapi juga melibatkan buruh dan majikan, sedang kekuatan produksi menunjukkan kemampuan pada memproduksi yang selalu dipengaruhi oleh temuan ilmiah dan teknik-teknik baru. Pada suatu saat keseimbangan produksi dan cara produksi terganggu, tiba saatnya bagi revolusi sosial untuk mempengaruhi sintesis baru.

iii) Gerakan dialektik sejarah

Ini terungkap dalam pertentangan atau konflik antar kelompok-kelompok ekonomi dan pertentangan kelas. Salah satu dialek yang muncul feodalisme sebagai tesis, akan berhadapan dengan kaum kapitalis, dan akan muncul sintesis sosialis, karena kaum kapitalis tidak bersedia melepaskan sistemnya dalam kekuasaannya, untuk merubahnya harus dilakukan dengan revolusi, karena itu tidak heran bila dalam suatu negara muncul gerakan komunis Marx selalu terjadi revolusi pertumpahan darah.

Dalam teori pertentangan kelas Marx menempatkan kaum borjuis yang mampu memanfaatkan teknologi baru akhirnya mampu mengontrol kekuatan yang telah dibangunnya, dan akhirnya dapat mengarah pada pertentangan kelas yang semakin meningkat. Teori pertentangan kelas tersebut adalah:

- a. Eksistensi kelas hanya dibentuk oleh faktor historis dalam perkembangan produksi

b. Bahwa pertentangan kelas pasti mengarah pada diktator proletariat

c. Bahwa diktator sendiri hanya menjadi transisi menuju penghapusan semua kelas dan pada masyarakat tanpa kelas.

**2. Komunis Lenin Stalin**

Perjuangan komunis lenin lebih dekat dengan teori Karl Marx dibanding kedekatannya dengan Stalin. Konsep ini merupakan pembaharuan komunis Marx yang awalnya bertujuan memisahkan diri, Perubahan dari Lenin bahwa partai komunis harus meninggalkan politik memisahkan diri, akan tetapi sebaliknya harus memakai segala jalan untuk mengadakan perhubungan dengan massa rakyat, untuk kemudian mengambil kekuasaan.

Teori gerakan komunis Lenin membagi dalam dua kelompok strategis yaitu:

- 1) Gerakan terbuka, dimana kaum pekerja harus membentuk organisasi-organisasi buruh dengan tujuan ekonomi sebagai pokok aktivitasnya, yang bekerja secara terbuka, umum dan sah.
- 2) Gerakan tertutup atau rahasia, yaitu organisasi dari kelompok kecil revolusioner profesional, mulai dari tentara, polisi atau kelompok birokrasi lainnya. Lenin menegaskan revolusi sebagai bentuk transisi dari masyarakat kapitalis kepada masyarakat komunis harus dipimpin oleh diktator proletariat.

Keberhasilan Lenin dalam meletakkan dalam dasar komunis Rusia pernah menjadi kekuatan besar di dunia, dan ini terhadap ajaran Marx, termasuk teori lenyapnya negara.



Sepeninggal Lenin, posisi pemimpin Rusia digantikan Stalin. Tahun 1936 Stalin menyatakan sebagian pentahap masyarakat komunis telah tercapai. Doktrin Marx tentang negara ketinggalan zaman karena tidak mempertimbangkan situasi internasional. Stalin dianggap berhasil menimpun Rusia meski kekuasaan dijalankan mirip Nazi Jerman masa Hitler. Pemujian terhadap Stalin dengan besar dengan kemampuan merevisi doktrin Marx dan Lenin demi kejayaan Rusia, meski Stalin dianggap melangkah ke pemimpin Rusia, kolektif dengan menciptakan kultus individu dirinya.

## 7. Ideologi Nasionalis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nasionalisme dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri
- 2) Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan.

Nasionalis berarti pernyataan suatu kelompok yang didasarkan atas keturunan bersama, budaya, bahasa, atau agama dan wilayah yang sama terhadap semua pengakuan lain atas loyalitas seseorang. Doktrin Nasionalisme lahir dalam sejarah Jerman pada abad 18, setelah Jerman terpecah-pecah sebagai dampak revolusi Perancis. Pada masa orde lama Indonesia slogan politik ini pernah dilakukan pada masa presiden Sukarno, saat Indonesia menghadapi tekanan dan embargo pihak barat.

Slogan pembangunan "berdikari" atau berdiri diatas kaki sendiri. Dalam sistem di dunia dalam pergaulan Internasional, batas geografis, administratif, dan sosio kultural yang baru berupa lahirnya tatanan dunia global yang melampaui Afrika, dan Amerika Latin, kini dihadapkan pada tantangan negara-negara bekas jajahan bangsa-bangsa Eropa, di Asia, dan setelah berakhirnya perang dunia kedua terutama di perkembangan Nasionalisme yang pernah mendominasi bangsa-bangsa.

## 1. Islam dan Ideologi

Islam sebagai dien petunjuk, pandangan hidup, memiliki prinsip-prinsip terbentuknya suatu ideologi yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam sebagaimana agama wahyu, memberikan petunjuk bagi umatnya senantiasa untuk merenungi (*tafakur*), mangkaji (*tadabur*), mempelajari rahasia yang terkandung di jagat raya, termasuk masalah kebudayaan, kemasyarakatan, politik kekuasaan dan kaitannya dengan segala pemikiran dan perilakunya. Posisi akal dalam setiap Muslim menurut Muhammad Natsir, menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Agama Islam menghormati akal manusia dan mendudukan akal pada tempat yang terhormat serta menyerahtakan agar manusia mempergunakan akal untuk menyelidiki keadaan alam.
- 2) Agama Islam mewajibkan pemeluknya baik laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu dari buaian sampai liang lahat, sebagaimana sabda Rasulullah.



- 3) Agama Islam melarang bertaklid buta, menerima sesuatu sebelum diperiksa, walaupun datangnya dari kalangan sebangsa dan seagama atau dari bapak ibu atau nenek moyang.
- 4) Agama Islam menyuruh memeriksa kebenaran walaupun datangnya dari kam yang berlainan bangsa dan kepercayaan.
- 5) Agama Islam menggemarkan dan mengarahkan pemeluk pergi ke negara lain, memperhubungkan silaturahmi dengan bangsa dan golongan lain, saling bertukar rasa dan pandangan.

Adapun menurut Taqiyuddin an-Nabhani (*mujtahid*) ideologi atau mabda' (dalam bahasa Arab) ialah aqidah aqliyah yang melahirkan peraturan. Yang dimaksud aqidah adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup, serta tentang apa yang ada dan setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Sedangkan peraturan yang lahir dari aqidah tidak lain berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi berbagai problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan pemecahannya, memelihara aqidah serta untuk mengemban Mabda/ideologi. Penjelasan tentang cara pelaksana dan pemeliharaan aqidah dan penyebaran risalah dakwah inilah Thariqoh (jalan/metode pelaksanaan). Sedangkan fikroh (pemikiran/ konsep yang mendasari) adalah aqidah dan berbagai macam konsep pemecahan masalah hidup.

Islam berisikan ajaran atau petunjuk yang berhubungan dengan masalah dunia dan akhirat yang bersifat

Universal. Islam bukan sekedar Ideologi, tetapi lebih dari itu adalah ideologi, meski dalam perkembangan Islam merupakan secara ideologis secara nyata oleh Nabi Muhammad Saw. Islam juga merupakan pandangan hidup yang sempurna karena di dalamnya terdapat standar dan tolak ukur yang jelas dengan bersandar pada al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi jalan hidup yang sempurna untuk setiap umat manusia. Dan jika seluruh manusia mau memikirkan apa saja ajaran yang terkandung dalam ajaran Islam maka akan didapati ajarannya yang sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menentramkan jiwa.

Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual tapi mengatur dalam perpolitikan. Islam mengatur dalam tiga hubungan, yaitu hubungan diri manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan dirinya, dan mengatur hubungan dirinya dengan manusia lainnya.

Beberapa prinsip dalam Islam yang dapat dibandingkan dengan ideologi menurut:

- a) Percaya pada satu Tuhan
- b) Persatuan dan kesatuan
- c) Musyawarah dan mufakat
- d) Memegang persamaan dasar manusia
- e) Tiada tingkah laku didasarkan atas kerjasama
- f) Memegang, menegakkan keadilan
- g) Menjunjung tinggi kemerdekaan bangsa dan individu
- h) Sistem ekonomi yang meletakkan dasar sesuai kekayaan sumbernya milik Allah SWT, jadi pemilikan barang dan jasa pada manusia adalah terbatas.
- i) Hukum Tuhan, dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.



- j) Masyarakat yang penuh kasih sayang dan bukan sebaliknya yang penuh dengan kebencian.
- k) Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- l) Kekuasaan itu bukan hukum, tetapi hukum adalah kekuasaan
- m) Pemerintah dan yang diperintah mempunyai persamaan derajat
- n) Pemerintah dengan persetujuan yang diperintah
- o) Membangun kebudayaan

Lebih lanjut Syam Firdaus menyebutkan, dalam sistem politik Islam mendasar pada tiga prinsip yaitu tauhid, risalah dan khilafah.

- a) Tauhid berarti adanya Tuhan Yang Maha Kuasa adalah pencipta, penguasa dan pemelihara dan penguasa dari seluruh alam. Kedaulatan terletak hanya pada-Nya, yang berhak memerintah dan melarang.
- b) Risalah, Rasulullah telah menegakkan bagi kita salah satu sistem hidup dalam islam dan memberikan praktik yang diperlukan secara rinci.
- c) Khilafah, negara Islam yang tegak berdiri atas Al Qur'an dan assunnah lain secara kaffah (menyeluruh) yang menjadikan posisi manusia sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi.

## 9. Ideologi Pancasila

Dalam pengusulan perumusan dasar negara pancasila Sukarno juga menjelaskan tentang Ideologi pancasila yang dipersamakan dengan *Declaration of independence* Amerika Serikat serta manifesto *kommunisme* Karl Marx dan Engels. Bila Amerika mengagungkan kebebasan individu, Mar

xis mengagungkan kehidupan sosial yang sama antar individu. Ideologi pancasila menjunjung hak individu baik langsung maupun tidak langsung terpengaruh dengan ideologi Liberal, di mana memang tidak dipungkiri bahwa manusia yang merupakan makhluk individu, bukanlah murni sebagai individu yang mandiri, tetapi sekaligus sebagai makhluk sosial yang dalam kenyataan hidupnya tidak dapat lepas dari masyarakat atau bantuan orang.

Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu. Karena itulah pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah berjuang, dengan melihat pengalaman bangsa bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan luhur dan luhur. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia bertumbuh sebagai dasar negara yang mengatur hidup pemerintahan, hal ini tampak dalam sejarah meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam tiga buah UUD yang kita miliki, yaitu dalam pembukaan UUD 1945, dalam mukaddimah konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, dalam mukaddimah UUD sementara Republik Indonesia 1950, pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian negara, dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia karena ia sebenarnya telah tertanam dalam kalbu rakyat, oleh karena itu ia juga merupakan dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.



## 10. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila merupakan hasil pemikiran oleh para pemimpin kemerdekaan Indonesia, dirumuskan dalam kalimat sederhana, mudah dimengerti, dengan muatan nilai perjuangan dari sifat umum universal sampai pada tataran khusus dan kongkrit, merupakan dasar, asas, pedoman, norma hidup dan kehidupan bagi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi Pancasila mengandung nilai dasar pandangan hidup bangsa yang mampu menyesuaikan zaman secara dinamis. Kemampuan penyesuaian Pancasila yang dinamis ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan budaya bangsa yang kuat, mampu menyesuaikan perkembangan dengan perkembangan global sepanjang pengaruh global tersebut tidak bertentangan dengan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis dari Pancasila. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) Nilai Dasar

Nilai dasar adalah nilai yang ada dalam Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Nilai ini tidak bisa diubah-ubah, sebagaimana sila-sila dari Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945.

### 2) Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah nilai pendukung utama dari nilai dasar Pancasila, yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Nilai ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD, Ketetapan MPR, UU, atau PP untuk menjadi tatanan dalam pelaksanaan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 3) Nilai Praktis

Nilai praktis harus ada pada setiap penyelenggara negara, artinya penyelenggara negara baik dari tingkat pusat sampai tingkat terbawah penyelenggaraan pemerintah harus memiliki semangat membangun sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila secara konsekuen, amanah dan istiqomah, serta mampu memberikan keteladanan kepada bawahannya untuk kondisi setempat atau lingkungan kerja pada masing-masing kelompok.

Dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sebagaimana tersebut di atas, Pancasila bukan berarti dogma yang tertutup dari pengaruh lain, namun demikian sifat ketertutupan terhadap ideologi Pancasila terdapat rambu-rambu atau batas-batas yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar adalah:

- a. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis,
- b. Larangan terhadap paham atau ideologi Marxisme, Leninisme dan Komunisme,
- c. Mencegah perkembangan liberalisme dan kapitalisme fundamentalistik,
- d. Larangan terhadap pandangan dan perilaku ekstrim, serta penciptaan agama baru yang dapat menggelisahkan kehidupan masyarakat.

## 11. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup adalah kristalisasi dan internalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk menjalankannya. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan arah pemecahan secara tepat sesuai dengan yang



diyakini. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang ambing dalam menghadapi persoalan baik dalam memecahkan masalah dalam negeri atau masalah yang berhubungan dengan dunia luar.

Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang besar yang mampu menggali pandangan hidup dari nilai-nilai luhur bangsa baik yang bersifat universal sebagaimana sila pertama dan kedua yang merupakan pengakuan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semua manusia, bukan hanya Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah cerminan pengakuan bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia yang merdeka merupakan bagian bangsa-bangsa di seluruh dunia dengan kedudukan harkat dan martabat yang sama. Pancasila mulai sila ke tiga sampai ke lima adalah cara pandang bangsa Indonesia dengan titik berat sebagai bangsa yang merdeka dalam wilayah Negara Kesatuan Indonesia, yang berdaulat dan berkewajiban mewujudkan keadilan bagi bangsa Indonesia.

Dengan Pancasila kita bangsa Indonesia mendapatkan arah untuk semua kegiatan dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk itu sudah seharusnya bangsa Indonesia di dalam setiap sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Memang, pengamalan/ pelanggaran nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak semuanya mengandung sanksi hukum positif, namun disinilah letak keluwesan Pancasila dalam membangun kehidupan yang harmonis sesama manusia meski tidak semua terikat dengan hukum positif. Kita perlu memahami dan menyadari bahwa mengamalkan nilai umum Pancasila, apabila kita meyakini

bahwa nilai Pancasila tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma hukum.

Pengamalan dasar ini merupakan pengamalan yang bersifat subjektif, dengan bidang yang sangat luas dimana setiap orang dapat mengklaim telah mengamalkan Pancasila dengan pola yang berbeda tanpa harus menghina dan menjelekkan pihak lain. Secara objektif seseorang beragama dan dilahirkan di Indonesia dan secara subjektif masing-masing mengamalkan dengan keyakinan masing-masing.

#### 14. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPUPKI pada tanggal 1 juni 1945 adalah dikandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia. Adapun dasar itu haruslah filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-rata bangsa dan negara Indonesia yang merdeka.

Landasan atau dasar itu haruslah kuat dan kokoh agar yang berdiri di atas akan tegak sentosa untuk selamanya. Landasan itu pula yang harus pula tahan uji terhadap serangan serangan baik dalam maupun dari luar.

Ditang BPUPKI telah menerima secara pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang BPUPKI kemudian pada tanggal 18 agustus pancasila tercantum secara resmi dalam pembukaan UUD RI, undang-undang dasar yang menjadi dasar ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang menjadi fondasi hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar tadi tahan uji sepanjang masa. Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai



dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (ketetapan MPR, undang-undang, Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU), keputusan presiden dan peraturan yang lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila bahkan dalam ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 ditegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum)

Adalah suatu hal yang membanggakan bahwa bangsa Indonesia berdiri atas fundamen yang kuat, dasar yang kokoh, yakni Pancasila dasar yang kuat itu bukanlah meniru suatu model yang didatangkan dari luar negeri. Dasar-dasar negara kita barakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa Indonesia, Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah air kita sejak dulu hingga sekarang.

Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, tapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal yang akan mempengaruhi hidup dan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi.

### BAB III IDENTITAS NASIONAL

#### A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia hidup tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Manusia dalam bersekutu atau berkelompok akan membentuk suatu organisasi yang bertugas mengatur dan mengarahkan tercapainya tujuan hidup kelompok tersebut. Dimulai dari lingkungan terkecil sampai pada lingkungan besar. Pada mulanya manusia hidup dalam keluarga. Selanjutnya mereka membentuk kelompok yang lebih besar seperti suku, masyarakat, dan bangsa. Kemudian manusia hidup bernegara. Mereka membentuk Negara sebagai persekutuan hidupnya. Negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh kelompok manusia yang memiliki cita-cita bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang sama.

Negara memiliki pengertian yang berbeda. Apabila Negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan dari manusia hidup maka bangsa lebih menunjukkan pada persekutuan hidup manusia hidup manusia itu sendiri. Di dunia ini masih ada bangsa yang belum bernegara. Banyak pula orang-orang yang telah bernegara yang pada akhirnya berasal dari banyak bangsa dapat menyatakan dirinya sebagai Negara bersatu. Baik bangsa maupun Negara memiliki ciri khas yang membedakan bangsa atau Negara tersebut dengan bangsa atau Negara lain di dunia. Ciri khas sebuah Negara juga merupakan identitas dari Negara yang



bersangkutan. Identitas-identitas yang disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional bangsa.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud karakteristik identitas Nasional?
2. Apa yang dimaksud karakteristik lahirnya faham Nasionalisme?

### C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud karakteristik identitas nasional.
2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud karakteristik lahirnya faham nasionalisme

### D. Manfaat.

1. Manfaat bagi penulis
  - a) Mendapatkan ilmu pengetahuan baru
  - b) Dapat mengkaji materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan
  - c) Mendapat kesempatan untuk tampil dalam mempertahankan pendapat atau gagasan
2. Manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat
  - a. Dapat lebih memahami pentingnya identitas nasional dalam diri mahasiswa

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Identitas Nasional

Secara harfiah bangsa. Identitas bisa dinyatakan secara resmi oleh seseorang untuk menjelaskan dirinya atau diungkapkan oleh seorang kelompok lainnya. Senada dengan pengertian ini, identitas nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan fisik, seperti, budaya, agama, dan bahasa atau yang bersifat non- fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan.

Secara teoritis, seperti diikatkan koento wibisono, pengertian identitas pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu budaya dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tersebut maka suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya". Dengan demikian identitas nasional suatu bangsa adalah ciri-ciri khas yang dimiliki suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lainnya. Namun demikian pembentukan identitas nasional bukanlah merupakan sesuatu yang sudah selesai, tetapi sesuatu yang terbuka dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Dengan ungkapan lain, identitas nasional merupakan suatu yang selalu berubah dan terbuka untuk member umumkan baru agar tetap sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, jika Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan agamis, sebutan ini seyogiannya direnungkan kembali sejauh mana kebenarannya. Bisa jadi sebutan itu hanya sebatas mitos budaya yang pada kenyataannya tidak terdapat di Indonesia.



Secara umum terdapat beberapa dimensi yang menjelaskan kekhasan suatu bangsa. unsur-unsur identitas itu secara normatif berbentuk sebagai nilai, bahasa, adat istiadat, dan letak geografis.

Beberapa dimensi dalam identitas nasional antara lain:

1. Pola perilaku, adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, adat istiadat.
2. Lambang-lambang, adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi Negara. Misalnya bendera, bahasa dan lagu kebangsaan.
3. Alat-alat perlengkapan, adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang serupa bangsa, peralatan dan teknologi; misalnya bangunan candi, mesjid dan lain-lain.
4. Tujuan yang ingin dicapai, identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak berarti tetap seperti, budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu sebagai sebuah bangsa yang mendiami sebuah Negara, tujuan bersama Indonesia telah tertuang dalam UUD 45, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia.

Salah satu identitas bangsa Indonesia adalah ia dikenal sebagai sebuah bangsa yang majemuk. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari sisi sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa.

## B. Unsur-Unsur Pembentukan Identitas Nasional

### 1. Sejarah

Menurut catatan sejarah, sebelum menjadi sebuah identitas Negara bangsa yang modern, bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang. Dua kerajaan Nusantara, Majapahit dan Sriwijaya misalnya, dikenal sebagai batas teritorialitas dimana kerajaan itu berdiri.

Kebesaran dua kerajaan Nusantara tersebut telah membekas pada semangat perjuangan bangsa Indonesia pada abad berikut ketika penjajahan asing menancang kuku imperialismenya. Semangat juang bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah menurut banyak kalangan telah menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia yang kemudian menjadi salah satu unsure pembentukan nasional Indonesia.

### 2. Kebudayaan

Aspek yang meliputi unsur pembentukan identitas nasional meliputi tiga unsur yaitu: akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Akal budi bangsa Indonesia, misalnya sikap ramah dan santun bangsa Indonesia. unsur peradaban misalnya tercermin dari keberadaban dasar Negara Pancasila sebagai kompromi nilai-nilai bersama Indonesia yang majemuk. Sebagai bangsa maritime. Keahlian bangsa Indonesia dalam pembuatan kapal panisi di masa lalu merupakan identitas perkembangan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia.

### 3. Suku bangsa

Kemajemukan merupakan identitas lain bangsa Indonesia. Namun demikian, lebih dari sekadar kemajemukan yang bersifat alamiah tersebut, tradisi bangsa



Indonesia untuk lebih hidup bersama dalam kemajemukan merupakan hal lain yang harus dikembangkan dan dibudayakan. Agama

Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia. Dengan kata lain keanekaragaman agama dan keyakinan di Indonesia tidak hanya dijamin oleh konstitusi Negara, tetapi juga rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus tetap disyukuri bangsa Indonesia.

Pada posisi yang lain, sikap kalangan nasionalis muslim telah berakibat pada pembentukan karakter keislaman yang khas di Indonesia, yang berbeda dengan kebanyakan Negara muslim yang lain. Karakter Islam Indonesia yang lebih moderat dan tidak monolitik merupakan unsure lain yang membedakan Islam Indonesia dengan Islam di Negara lain di dunia.

#### 4. Bahasa

Bahasa adalah salah satu atribut identitas nasional Indonesia. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia (yang digunakan bangsa Melayu) sebagai bahasa penghubung sebagai kelompok etnis yang mendiami kepulauan Nusantara memberikan nilai identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Peristiwa sumpah pemuda pada tahun 1928, yang menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, telah memberikan nilai tersendiri bagi pembentukan identitas nasional Indonesia.

## 2. Hakikat Negara

### 1. Arti negara

Menurut kamus bahasa Indonesia, Negara mempunyai dua pengertian berikut. Pertama, Negara adalah organisasi suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan dita'ati rakyatnya. Kedua, Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berkedaulatan sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Pengertian Negara dari pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut:

#### 1.1. Georg Jellinek

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

#### 1.2. Kranenbrung

Negara adalah organisasi yang timbul karena tindakan dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

#### 1.3. Roger f. Saultau

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Dan masih banyak pendapat tokoh-tokoh lain.



## 2. Unsur-Unsur Negara

### a) Rakyat

Yaitu Orang yang bertempat tinggal diwilayah yang tunduk pada kekuasaan Negara yang mendukung Negara bersangkutan.

### b) Wilayah

Yaitu daerah yang menjadi kekuasaan Negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat Negara. Wilayah Negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara.

### c) Pemerintah yang berdaulat

Yaitu adanya penyelenggaraan Negara yang memiliki kekuasaan penyelenggaraan pemerintah dinegara tersebut. kedaulatan berarti mempunyai kekuasaan yang untuk ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan keluar adalah Negara mampu mempertahankan diri dari serangan Negara lain.

## 3. Teori Terjadinya Negara

### a) Proses Terjadinya Negara secara Teoretis

"Secara teoretis" yang dimaksud adalah, para ahli politik dan hukum tata Negara berusaha membuat teoretis tentang terjadinya Negara. Dengan demikian, ada Beberapa teori terjadinya negara adalah sebagai berikut;

#### 1. Teori Hukum Alam

Teori hukum alam merupakan hasil pemikiran paling awal, yaitu masa plato dan aristoteles, menurut teori hukum alam, terjadinya Negara adalah sesuatu yang alamiah. Bahwa

sesuatu itu berjalan menurut hukum alam, yaitu mulai dari lahir sampai akhirnya mati.

#### 2. Teori Ketuhanan

Teori ini muncul setelah lahirnya agama-agama besar di dunia, yaitu islam dan Kristen. Dengan demikian, teori ini dipengaruhi oleh paham keagamaan. Menurut teori ketuhanan, terjadinya Negara adalah karena kehendak tuhan, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari dari Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan.

Munculnya paham teori ini karena orang yang beragama yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa (paham monoteisme) dan dewa-dewa (paham politeisme) yang menciptakan alam semesta dan segala isinya terhadap Negara.

#### 3. Teori perjanjian

Teori perjanjian sebagai reaksi atas teori hukum alam dan kedaulatan Tuhan. Manusia berada dalam kedua keadaan, yaitu keadaan sebelum bernegara dan keadaan setelah bernegara. Negara pada dasarnya adalah wujud perjanjian dari masyarakat sebelum bernegara tersebut untuk kemudian menjadi masyarakat yang bernegara.

Pendapat lain mengemukakan oleh G. jellinek, yaitu terjadinya negaradapat dilihat secara primer dan sekunder. Perkembangan Negara secara primer membicarakan tentang bagaimana pertumbuhan Negara mulai dari persekutuan dari kelompok masyarakat yang sederhana berkembang menjadi Negara yang modelr. Menurutjellink, terjadinya Negara primer melalui tahapan, yaitu

- a. Persekutuan masyarakat,
- b. Kerajaan,



- c. Negara, dan
- d. Negara demokrasi

Perkembangan Negara secara sekunder membicarakan tentang bagaimana terbentuknya Negara baru yang dihubungkan dengan masalah pengakuan. Jadi, ada tidaknya pengakuan dari Negara lain.

b) Proses terjadinya Negara di zaman modern

Menurut pandangan ini dalam kenyataannya terjadinya Negara bukan disebabkan oleh teori-teori seperti diatas. Negara-negara di dunia ini terbesar karena melalui beberapa proses, seperti:

- a. Penaklukan atau fusi,
- b. Peleburan atau fusi
- c. Pemecahan,
- d. Pemisahan diri
- e. Perjuangan atau revolusi
- f. Penyerahan/pemberian, dan
- g. Pendudukan atau wilayah yang belum ada pemerintah sebelumnya.

Penaklukan yaitu, suatu daerah yang tidak dipertuan kemudian diambil alih dan didirikan Negara di wilayah itu.

Peleburan adalah suatu penggabungan dua atau lebih Negara menjadi Negara baru. Pemecahan adalah terbentuknya Negara-negara baru akibat terpecahnya Negara lama sehingga Negara sebelumnya menjadi tidak lagi.

Pemisahan diri adalah memisahkan suatu bagian wilayah Negara kemudian terbentuknya terbentuk Negara baru. Pemisahan berbeda dengan pemecahan di mana Negara lama masih ada.

Perjuangan merupakan hasil dari rakyat suatu wilayah yang umumnya dijajah Negara lain kemudian memerdekakan diri.

Penyerahan atau pemberian adalah pemberian kemerdekaan kepada suatu kolono atau Negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya, inggris dan perancis yang memiliki wilayah jajahan di afrika. Banyak memberikan kemerdekaan kepada bangsa didaerah tersebut.

Kedudukan terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan. Misalnya Australia merupakan daerah yang ditemukan inggris meskipun di sana terhadap suku aborigin. daerah Australia selanjutnya dibuat kolono-koloni di mana penduduknya diturunkan dari daratan Eropa. Australia dikemerdekaan tahun 1901.

#### 4. Fungsi Dan Tujuan Negara

Fungsi Negara merupakan gambaran apa yang dilakukan Negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi Negara dapat dikatakan sebagai tugas dari pada Negara. Negara memiliki kekuasaan dibentuk untuk menjalani tugas-tugas tertentu.

Di bawah ini adalah fungsi Negara menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut.

a) John Locke

Seorang sarjana inggris membagi fungsi Negara menjadi tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi legislatif, untuk membuat peraturan
2. Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan peraturan;



3. Fungsi federative, untuk mengurus urusan luar negeri dari urusan perang dan damai.

b) Montesquieu

Tiga fungsi Negara menurut Montesquieu adalah

1. Fungsi legislatif, membuat undang-undang;
2. Fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang;
3. Fungsi yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati.

Dan beberapa pendapat yang lain.

Keseluruhan fungsi Negara tersebut diselenggarakan bersama. Adapun tujuan Negara berbeda-beda.

Di bawah ini beberapa pendapat tujuan Negara menurut para ahli.

a) Roger H. Soltau

Tujuan Negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.

b) Harold J. Laski,

Tujuan Negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.

c) Plato

Tujuan Negara adalah memajukan keselamatan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

d) Thomas Aquinas dan Agustina

Untuk mencapai penghidupan aman dan tenteram dengan taat kepada pimpinan dan dawah pimpinan Tuhan. Pemimpin Negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.

## B. Bangsa Dan Negara Indonesia

### 1. Hakikat Negara Indonesia

Negara kita adalah Negara Republik Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 disingkat Negara RI Proklamasi. Maksudnya dari pernyataan ini adalah bahwa Negara Indonesia yang didirikan ini tidak bisa lepas dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Dr. Soekarno, yang dimaksud bangsa Indonesia adalah seluruh manusia yang menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal secara bersama di wilayah Nusantara dari ujung Barat (sabang sampai ujung timur (marauke) yang memiliki "le desir d'être" (Pendapat Ernest Renan) dan "charakter tergemeinschaft" (pendapat Otto Van Bauer) yang telah menjadi satu. Kemunculan bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh paham nasionalisme. Tujuan dari paham kebangsaan (nasionalisme) sendiri adalah menciptakan Negara bangsa yang wilayah dan batas-batasnya menyerupai atau mendekati makna bangsa.

Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia, sebagai berikut.

- a) Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun.



- b) Adanya keinginan bersama untuk merdeka, yaitu wilayah nusantara yang membentang dari sabang sampai marouke
- c) Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang dari sabang-marauke.
- d) Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.

Berdasarkan faktor ini, faktor pembentukan identitas kebangsaan Indonesian bukanlah factor-faktor primordial, tetapi factor historis.

Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah Negara yang membentuknya didasarkan pada semangat kebangsaan-atau nasionalisme-yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu Negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongannya.

## 2. Proses terjadinya Negara Indonesia

Terjadinya Negara Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap perkembangan tersebut digambarkan sesuai dengan keempat alinea dalam pembukaan UUD 1945. Secara teoretis, perkembangan Negara karena Indonesia terjadi sebagai berikut.

- a) Terjadinya Negara tidak sekadar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk merdekakan dirinya.

- b) Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan.
- c) Terjadinya Negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia, sebagai suatu keinginan luhur bersama
- d) Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan Negara yang meliputi tujuan Negara, bentuk Negara, system pemerintahan Negara, UUD Negara, dan dasar Negara. Dengan demikian, semakin sempurna proses terjadinya Negara Indonesia.

Berdasarkan kenyataan yang ada, terjadinya Negara Indonesia bukan melalui pendudukan, pemisahan, penggabungan, pemecahan, atau penyerahan, bukti menunjukkan bahwa Negara Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan (revolusi), yaitu perjuangan melawan penjajahan sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Usaha mendirikan Negara melalui perjuangan sangat membanggakan diri seluruh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berbeda bila bangsa Indonesia mendapat kemerdekaan karena diberi oleh bangsa lain.

## 3. Cita-cita, tujuan, dan visi Negara Indonesia

Bangsa Indonesia bercita-cita menjuwudkan Negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan rumusan yang singkat, Negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.



Tujuan Negara Indonesia selanjutnya terjabar dalam Alinea IV pembukaan UUD 1945. Secara terinci sebagai berikut:

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b) Memajukan kesejahteraan umum;
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Adapun visi Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, budaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin (TAP MPR No. Visi MPR/2001).

Setelah tidak adanya GBHN maka berdasarkan Rencana pembangunan jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 sebagai berikut:

- i. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
- ii. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan Negara yang menjunjung tinggi, hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia.
- iii. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang selanjutnya.

## Identitas Nasional Indonesia

Identitas nasional adalah menunjukkan pada identitas yang sifatnya nasional. Pada uraian sebelumnya identitas nasional bersifat buatan. Bersifat perbuatan oleh karena identitas nasional itu di buat, dibentuk dan disepakati oleh warga sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder oleh karena identitas nasional lahir belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptis. Sebelum mereka memiliki identitas nasional itu, warga telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.

Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu dan perjuangan panjang diantara warga bangsa-bangsa yang bersangkutan. Hal ini disebabkan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Dapat terjadi sekelompok warga bangsa lainnya. Setiap kelompok bangsa di dalam Negara, umumnya menginginkan identitasnya dijadikan atau diangkat sebagai identitas kesukubangsaan menjadi identitas nasional. Contoh, kasus Negara srilangka yang diliputi pertikaian terus menerus antara bangsa Sinhala dan Tamil sejak Negara itu merdeka.

Setelah bangsa Indonesia bernegara, mulai dibentuk dan disepakati apa-apa yang dapat menjadi identitas nasional Indonesia. Bila dikatakan bangsa Indonesia relative berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya kecuali pada saat proses pembentukan ideology Pancasila sebagai identitas nasional yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan diantara warga Indonesia.

Beberapa bentuk identitas Nasional, adalah sebagai warga bangsa.



- a) Bahasa Nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang berasal dari bahasa melayu .bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia.
- b) Bendera Negara yaitu sang merah putih. Warna merah berate berani dan putih berate suci. Lambing merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangku sebagai bendera Negara. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa sumpah pemuda.
- c) Lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia raya. Indonesia raya sebagai lagu kebangsaan yang ada pada tanggal 28 Oktober 1928 dinyayikan pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara.
- d) Lambing Negara yaitu Garuda Pancasila, burung yang dilambangkan burung khas lambang Negara.
- e) Semboyan Negara Bhineka Tunggal Ika. Bhineka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap nerkeinginan untuk menjadikan satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.
- f) Dasar falsafah Negara yaituyang berisi 5 nilai dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafah dan idiologi dari Negara Indonesia.
- g) Kionstitusi ( Hukum Dasar) a negara yaitu UUD.
- h) Bentuk Negara kesatuan repoblik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, bentuk Negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintah adalah repoblik. Sistim

- i) Politik yang digunakan adalah system demokrasi(kedaulatan rakyat). Konsepsi wawasan nusantara, mengenai diri dan lingkungannya yang serbabereagam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuaan bangsa.
- j) Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional sebagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki citra rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas merupakan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional pada dasarnya adalah puncak dari kebudayaan daerah.

Tumbuh dan sepakat beberapa identitas nasional Indonesia iti sesungguhnya telah diawali dengan adanya kesadaran politik bangsa Indonesia, sebelum bernegara. Kesadaran polit adalah tumbuhnya semangatnasionalisme (semangat kebangsaan) sebagai gerakan menentang penjajhandean mewujudkan Negara Indonesia.



## BAB IV DEMOKRASI INDONESIA

### A. Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Hasil Penelitian menyatakan "mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang di perjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh" (UNESCO 1949).

Hampir semua negara di dunian menyakini demokrasi sebagai "tolok ukur tak terbantah dari keabsahan politik." Kenyakina bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak kokohnya sistem politik demokrasi. Hal itu menunjukan bahwa rakyat di letakkan pada posisi penting walau pun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Tidak ada negara yang ingin dikatakan sebagai negara yang tidak demokratis atau negara otoriter.

Di Indonesia demokrasi dari masa ke masa mengalami perkembangan baik pada saat revolusi, orde lama, orde baru, reformasi hingga sekarang. Di setiap perkembangan demokrasi di Indonesia terdapat pedoman dan aturan yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan atau tujuan yang hendak dicapai dari pemerintahan yang berkuasa saat itu. Dalam Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terkadang mengalami kegagalan, salah satunya disebabkan



karena ketidakkonsistennya penguasa sehingga peraturan yang dibuat hanya menguntungkan golongan tertentu. Mengingat begitu kompleks dan menariknya kajian tentang demokrasi khususnya demokrasi di Indonesia maka penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan yang berjudul "Demokrasi di Indonesia".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka agar pembahasan tidak melebar atau meluas penulis membatasi kajian-kajiannya, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengertian dan sejarah demokrasi?
2. Bagaimanakah pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa?
3. Bagaimanakah pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini?
4. Apakah tantangan dan harapan kedepannya untuk demokrasi di Indonesia?

## C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pengertian dan sejarah dari demokrasi.
2. Paham akan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa.
3. Mengetahui pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini.
4. Mengetahui dan paham tantangan dan harapan untuk demokrasi di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Demokrasi

#### 1.1. Sejarah Demokrasi

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat.

Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu terdiri dari 1.400 negara kota (*polis*) yang kecil dan independen. Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi. Diantaranya terdapat Athena, negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang baru masa itu yaitu demokrasi langsung. Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Namun dari sekitar 150.000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi rakyat dan menyuarakan pendapat mereka.



Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada 510 SM hingga 27 SM. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan dimana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di Majelis.

### 1.2. Prinsip-prinsip demokrasi

Rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi". Menurutny, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

### 1.3. Asas pokok demokrasi

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

### 1.4. Ciri-ciri pemerintahan demokratis

Pemilihan umum secara langsung mencerminkan sebuah demokrasi yang baik. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.



6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

### 1.5. Jenis-Jenis Demokrasi

#### 1.5.1. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas:

##### a) Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan

rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

##### b) Demokrasi perwakilan

Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

#### 1.5.2 Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)

Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu dalam system demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.

Pemikiran tentang Negara demokrasi sebagaimana dikembangkan oleh Hobbe, Lockedan Rousseau bahwa Negara terbentuk karena adanya perbenturan kepentingan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat dalam suatu natural state. Akibatnya terjadilah penindasan di antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu individu-individu dalam suatu masyarakat itu membentuk suatu persekutuan hidup bersama yang disebut Negara, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan hak individu dalam kehidupan masyarakat Negara. Atas dasar kepentingan ini dalam kenyataannya muncullah kekuasaan yang kadangkala menjurus ke otoriterianisme.

Berdasarkan kenyataan yang dilematis tersebut, maka muncullah pemikiran ke arah kehidupan demokrasi perwakilan liberal, dan hal inilah yang sering dikenal dengan



demokrasi-demokrasi libera. Individu dalam suatu Negara dalam partisipasinya disalurkan melalui wakil yang dipilih melalui proses demokrasi.

Menurut Held, bahwa demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara individual baik di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaan bahkan kebebasan anti agama.

Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam ekonomi sehingga akibatnya individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam. Akibatnya kekuasaan kapitalislah yang menguasai kehidupan Negara, hal ini sesuai dengan analisis P.L. Berger bahwa dalam era globalisasi dewasa ini dengan semangat pasar bebas yang dijiwai oleh filosofi demokrasi liberal, maka kaum kapitalislah yang berkuasa.

Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan.

Demokrasi Rakyat (Proletar) disebut juga adalah demokrasi yang berlandaskan ajaran komunisme dan marxisme. Demokrasi ini tidak mengakui hak asasi warga negaranya. Demokrasi ini bertentangan dengan demokrasi konstitusional. Demokrasi ini mencita-citakan kehidupan tanpa kelas

dan tanpa kepemilikan pribadi. Negara adalah alat untuk mencapai komunisme yaitu untuk kepentingan kolektifisme.

### 1.5.3. Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan atas:

#### a. Demokrasi Sistem Parlementer

##### Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (*constitutional head*) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia.

Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan.

Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politis pada umumnya sangat tinggi.



*Ketiga*, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh pelung yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal.

*Keempat*, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada tahun 1955, tetapi Pemilihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.

*Kelima*, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga Negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal.

*Keenam*, dalam masa pemerintahan Parlemen, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan? Banyak sekali para ahli mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dari sekian banyak jawaban, ada beberapa hal yang dinilai tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut.

*Pertama*, munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong-royong. *Kedua*, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi Nasional. *Ketiga*, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. *Keempat*, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah.

## b. Demokrasi Sistem Presidensial

Periode 1966-1988, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden dan semakin dominan terhadap lembaga-lembaga Negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa saat itu sebanya kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

- Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi.
- Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup.
- Ketiga, Pemilihan Umum.
- Keempat, pelaksanaan hak dasar warga Negara.

Salah satu ciri Negara demokratis dibawa *rule of law* adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden maupun kepala daerah.

Pemilihan umum bagi suatu Negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat. Pemilihan umum memiliki arti penting sebagai berikut:

- Untuk mendukung atau mengubah personel dalam lembaga legislatif.



- b) Membentuk dukungan yang mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka tertentu.
- c) Rakyat melalui perwakilannya secara berkala dapat mengoreksi atau mengawasi kekuatan eksekutif.

## B. Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periodisasi:

### 2.1 Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 - 1950 ).

Tahun 1945-1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan:

- a. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
- b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
- c. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahannya dari presidensi menjadi parlementer

### 2.2 Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama

#### 2.2.1 Masa demokrasi Liberal 1950 - 1959

Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan:

- a. Dominannya partai politik
- b. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
- c. Tidak mempunyai konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

- a. Bubarkan konstituante
- b. Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950
- c. Pembentukan MPRS dan DPAS

#### 2.2.2 Masa demokrasi Terpimpin 1959 - 1966

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:

- a. Dominasi Presiden
- b. Terbatasnya peran partai politik
- c. Berkembangnya pengaruh PKI



Penyimpangan masa demokrasi dipimpin antara lain:

- Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
- Peranan Parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR
- Jaminan HAM lemah
- Terjadi sentralisasi kekuasaan
- Terbatasnya peranan pers
- Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)

Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.

### 2.3. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 - 1998

Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

- Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada
- Rekrutmen politik yang tertutup
- Pemilu yang jauh dari semangat demokratis

Pengakuan HAM yang terbatas

- Tumbuhnya KKN yang merajalela

Sebab jatuhnya Orde Baru:

- Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi)
- Terjadinya krisis politik
- TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba
- Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden
- Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi 1998 s/d sekarang.

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

### 2.4. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 - sekarang

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga tinggi dan tertinggi Negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR - MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta lembaga lembaga tinggi yang lain.



yang dibentuk secara swadaya. Di sini dibutuhkan birokrasi tersendiri untuk menyelenggarakan Pemilu, meskipun pada dasarnya birokrasi itu masih bergantung kepada Pemerintah juga.

- vi. Adanya lembaga survei, lembaga pooling, lembaga riset, dan lain-lain, yang aktif melakukan riset seputar perilaku pemilih atau calon pemilih dalam Pemilu. Termasuk adanya media-media yang aktif melakukan pemantauan proses pemilu, pra pelaksanaan, saat pelaksanaan, maupun paca pelaksanaan.
  - vii. Demokrasi di Indonesia amat sangat membutuhkan modal (duit). Banyak sekali biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan Pemilu. Konsekuensinya, pihak-pihak yang berkantong tebal, mereka lebih berpeluang memenangkan Pemilu, daripada orang-orang idealis, tetapi miskin harta. Akhirnya, hitam-putihnya politik tergantung kepada tebal-tipisnya kantong para politisi.
- Semua ini dan indikasi-indikasi lainnya telah terlembagakan secara kuat dengan payung UU Politik yang direvisi setiap 5 tahunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem demikian telah menjadi realitas politik legal dan memiliki posisi sangat kuat dalam kehidupan politik nasional.

Pesta demokrasi yang kita gelar setiap 5 tahun ini haruslah memiliki visi kedepan yang jelas untuk membawa perubahan yang fundamental bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini, baik dari segi perekonomian, pertahanan, dan persaingan tingkat global. Oleh karena itu, sinkronisasi antara demokrasi dengan pembangunan nasional haruslah sejalan bukan malah sebaliknya demokrasi yang ditegakkan

hanya merupakan untuk pemenuhan kepentingan partai dan kelompok tertentu saja.

Jadi, demokrasi yang kita terapkan sekarang haruslah mengacu pada sendi-sendi bangsa Indonesia yang berdasarkan fitrah bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945.

### B. Tantangan dan Harapan

Amartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi dapat mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti bila pihak legislatif menyuarkan hak-hak orang miskin dan kemudian pihak eksekutif melaksanakan program-program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Sayangnya, dalam masa transisi ini, hal itu belum terjadi secara signifikan.

Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Inilah tantangan yang harus dihadapi dalam masa transisi. Demokrasi masih terkesan isu kaum elit, sementara ekonomi adalah masalah riil kaum ekonomi bawah yang belum diakomodasi dalam proses demokratisasi. Ini adalah salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Demokrasi dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian ia merupakan fitrah yang harus dikelola agar menghasilkan output yang baik. Setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat. Dengan demikian, demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan main. Aturan main tersebut sesuai



dengan nilai-nilai Islam dan sekaligus yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Di masa transisi, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Untuk itu orang memerlukan pemahaman yang utuh agar mereka bisa menikmati demokrasi. Demokrasi di masa transisi tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat akan mengakibatkan masuknya pengaruh asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah tantangan yang cukup berat juga dalam demokrasi yang tengah menapak. Pengaruh asing tersebut jelas akan menguntungkan mereka dan belum tentu menguntungkan Indonesia. Dominannya pengaruh asing justru mematikan demokrasi itu sendiri karena tidak diperbolehkannya perbedaan pendapat yang seharusnya menguntungkan Indonesia. Standar ganda pihak asing juga akan menjadi penyebab mandulnya demokrasi di Indonesia.

Anarkisme yang juga menggejala pasca kejatuhan Soeharto juga menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia. Anarkisme ini merupakan bom waktu era Orde Baru yang meledak pada saat ini. Anarkisme pada saat ini seolah-olah merupakan bagian dari demonstrasi yang sulit dielakkan, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Padahal anarkisme justru bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai Islam.

Harapan dari adanya demokrasi yang mulai tumbuh adalah ia memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan juga bangsa. Misalnya saja,

demokrasi bisa memaksimalkan pengumpulan zakat oleh negara dan distribusinya mampu mengurangi kemiskinan. Disamping itu demokrasi diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak seperti masalah kesehatan dan pendidikan.

Tidak hanya itu, demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Demokrasi di negara yang tidak kuat akan mengalami masa transisi yang panjang. Dan ini sangat merugikan bangsa dan negara. Demokrasi di negara kuat (seperti Amerika) akan berdampak positif bagi rakyat. Sedangkan demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia tanpa menghasilkan negara yang kuat justru tidak akan mampu mensejahterakan rakyatnya. Negara yang kuat tidak identik dengan otoritarianisme maupun militerisme.

Harapan rakyat banyak tentunya adalah pada masalah kehidupan ekonomi mereka serta bidang kehidupan lainnya. Demokrasi membuka celah berkuasanya para pemimpin yang peduli dengan rakyat dan sebaliknya bisa melahirkan pemimpin yang buruk. Harapan rakyat akan adanya pemimpin yang peduli di masa demokrasi ini adalah harapan dari implementasi demokrasi itu sendiri.

Di masa transisi ini, implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalam berpolitik, sedangkan masalah ekonomi masih terpinggirkan. Maka muncul kepincangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik dan ekonomi adalah dua sisi yang berbeda dalam sekeping mata uang, maka masalah ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius dalam implementasi demokrasi agar terjadi penguatan demokrasi. Semakin rendahnya tingkat kehidupan ekonomi rakyat akan berdampak buruk bagi demokrasi karena kuatnya bidang politik ternyata belum bisa



mengarahkan kepada perbaikan ekonomi. Melemahnya ekonomi akan berdampak luas kepada bidang lain, seperti masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang lemah jelas tidak bisa memperkuat demokrasi, bahkan justru bisa memperlemah demokrasi.

Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berumpul, berpolitik dimana masyarakat mengharap adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik.

## BAB V

### NEGARA DAN KONSTITUSI

#### A. Latar Belakang

Negara dikatakan suatu negara apabila memenuhi 3 unsur utama yaitu : Wilayah, pemerintah, dan rakyat. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi dalam suatu Negara. Unsur yang lainnya yang juga harus dimiliki oleh suatu Negara adalah pengakuan dari Negara lain. Pengakuan dari Negara lain harus dimiliki oleh suatu Negara supaya keberadaan Negara tersebut diakui oleh Negara-negara lain.

Setelah suatu Negara terbentuk maka Negara tersebut berhak membentuk undang-undang atau konstitusi. Konstitusi di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, konstitusi telah ada yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan adat istiadat yang ada karena kesepakatan dari suatu masyarakat yang terlahir dan dipakai sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat mempunyai suatu hukum yang dinamakan hukum adat.

Seperti halnya adat istiadat, konstitusi juga mengatur kehidupan suatu Negara supaya tertatanya kehidupan dalam Negara. Jika dalam adat istiadat, pelanggar adat istiadat dikenai hukum adat maka dalam konstitusi, pelanggar konstitusi dikenai hukuman yang telah diatur dalam undang-undang. Maka untuk mengatur kehidupan Negara dan unsur-unsur didalamnya, konstitusi sangat dibutuhkan keberadaannya. Suatu Negara tanpa konstitusi atau undang-



undang seperti halnya mobil yang tanpa stir yang tidak dapat diatur gerakannya yang jika dibiarkan akan menabrak, seperti halnya suatu Negara yang tanpa konstitusi maka semua hal dalam Negara tidak dapat diatur pergerakannya yang jika dibiarkan mengakibatkan Negara akan kacau, bobrok, runtuh dan berdampak buruk dengan hilang keberadaannya.

Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi. Dasar Negara menempati kedudukan sebagai norma hukum tertinggi suatu Negara. Sebagai norma tertinggi, dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma hukum dibawahnya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum dibawah dasar Negara. Dalam arti yang luas: konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah : konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Dalam arti sempit: konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar Negara. norma hukum dibawah dasar Negara isinya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar Negara. Dasar Negara merupakan cita hukum dan Negara. Terdapat hubungan hubungan yang sangat terkait antara keduanya yang perlu kita ketahui.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan

dibahas pada penulisan kali ini. Masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengertian konstitusi secara luas?
2. Tujuan Konstitusi Negara?
3. Perubahan Undang-Undang 1945?
4. Bagaimana Sistem konstitusi di Indonesia berdasarkan UUD 1945?

## C. Maksud Dan Tujuan

1. Memahami Konstitusi secara terperinci.
2. Memahami tujuan Konstitusi di suatu Negara.
3. Memahami perubahan Undang-Undang 1945.
4. Menjelaskan sistem penerapan konstitusi di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Konstitusi

Secara etimologis, istilah konstitusi berasal dari bahasa perancis "Constituer" yang artinya membentuk. Dalam kaitan ini, konstitusi diartikan sebagai pembentuk Negara. Dalam bahasa belanda Konstitusi disamakan dengan istilah *Grundwet*. Konstitusi juga bisa diartikan sebagai peraturan dasar yang mengikat.

### Definisi Konstitusi menurut para ahli

- a. Herman Heller. Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang Dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi mengandung pengertian sosiologis dan politis.
- b. Oliver Cromwell. Undang-undang Dasar itu merupakan "instrumen of governmen", yaitu bahwa



Undang-undang dibuat sebagai pegangan untuk memerintah. Dalam arti ini, Konstitusi identik dengan Undang-undang dasar.

c. F. Lassalle. Konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat didalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata didalam masyarakat, misalnya kepala negara, angkatan perang, partai politik, buruh tani, pegawai, dan sebagainya.

d. Prayudi Atmosudirdjo. Konstitusi adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan, Konstitusi merupakan rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak dan perjuangan suatu bangsa. Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas dan kebudayaan suatu bangsa.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian yaitu:

1. Konstitusi dalam arti sempit, yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang Dasar.
2. Konstitusi dalam arti luas, yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang Dasar dan hukum dasar yang tidak tertulis/Konvensi.

Konvensi sebagai aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan bernegara mempunyai sifat:

- a. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dalam praktek penyelenggaraan Negara.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum dasar tertulis/Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar.

c. Diterima oleh rakyat negara.

d. Bersifat melengkapi sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar.

Konstitusi sebagai hukum dasar memuat aturan-aturan dasar atau pokok-pokok penyelenggaraan bernegara, yang masih bersifat umum atau bersifat garis besar dan perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam norma hukum dibawahnya. Apabila dikaitkan dengan teori jenjang norma hukum dari Hans Nawiaski, maka dasar negara pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*/norma fundamental negara, dan undang-undang dasar negara 1945 sebagai *staatgrundgesetz* atau aturan dasar atau pokok negara.

Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting biasanya dikeluarkan oleh kaisar atau raja dan digunakan secara luas dalam hukum konon untuk menandakan keputusan substitusi tertentu terutama dari Paus. Konstitusi pada umumnya bersifat kondifaksi yaitu sebuah dokumen yang berisikan aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi.



Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara. Terdapat dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis (Written Constitution) dan konstitusi tidak tertulis (*Unwritten Constitution*). Ini diartikan seperti halnya "Hukum Tertulis" (*geschreven Recht*) yang termuat dalam undang-undang dan "Hukum Tidak Tertulis" (*ongeschreven recht*) yang berdasar adat kebiasaan. Dalam karangan "Constitution of Nations", Amos J. Peaslee menyatakan hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada.

Di beberapa negara terdapat dokumen yang menyerupai konstitusi, namun oleh negara tersebut tidak disebut sebagai konstitusi. Dalam buku yang berjudul *The Law and The Constitution*, Ivor Jennings menyebutkan di dalam dokumen konstitusi tertulis yang dianut oleh Negara-negara tertentu yang mengatur tentang:

- a. Adanya wewenang dan tata cara bekerja suatu lembaga kenegaraan.
- b. Adanya ketentuan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah.

Tidak semua lembaga-lembaga pemerintahan dapat diatur dalam poin 1 dan tidak semua hak-hak warga negara diatur dalam poin 2. Seperti halnya di negara Inggris. Dokumen-dokumen yang tertulis hanya mengatur beberapa lembaga negara dan beberapa hak asasi yang dimiliki oleh rakyat, satu dokumen dengan dokumen lainnya tidak sama.

Ada konstitusi yang materi muatannya sangat panjang dan sangat pendek. Konstitusi yang terpanjang adalah India dengan 394 pasal. Kemudian Amerika Latin seperti Uruguay 332 pasal, Nicaragua 328 pasal, Cuba 286

pasal, Panama 271 pasal, Peru 236 pasal, Brazil dan Columbia 210 pasal, selanjutnya di Asia, Burma 234 pasal, di Eropa di Belanda 210 pasal.

Konstitusi terpendek adalah Spanyol dengan 36 pasal, Indonesia 37 pasal, Laos 44 pasal, Guatemala 45 pasal, Nepal 46 pasal, Ethiopia 55 pasal, Ceylon 91 pasal dan Finlandia 95 pasal.

## B. Tujuan Konstitusi

Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. Konstitusi juga memiliki tujuan yang hampir sama dengan hukum, namun tujuan dari konstitusi lebih terkait dengan:

- a) Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing.
- b) Hubungan antar lembaga negara.
- c) Hubungan antar lembaga negara (pemerintah) dengan warga negara (rakyat).
- d) Adanya jaminan atas hak asasi manusia.
- e) Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan jaman.

Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu konstitusi tidak menjamin bahwa konstitusi tersebut baik. Di dalam prakteknya, banyak negara yang memiliki



lembaga-lembaga yang tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan lembaga-lembaga yang terdapat di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang diatur diluar konstitusi mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian banyak negara yang memiliki aturan-aturan tertulis di luar konstitusi yang memiliki kekuatan yang sama dengan pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan "Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order". Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

### Kedudukan Konstitusi

Dalam kehidupan suatu Negara, konstitusi mempunyai kedudukan resmi atau formal yang relatif sama dengan konstitusi Negara-negara lain yaitu:

1. Konstitusi sebagai Hukum Dasar. Konstitusi sebagai hukum dasar karena berisikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu Negara, seperti secara khusus

memuat aturan tentang Lembaga-Lembaga serta kewenangannya.

2. Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi. Konstitusi sebagai hukum artinya aturan-aturan yang ada dibawahnya harus sesuai dan atau tidak bertentangan dengan konstitusi serta harus ditaati bukan hanya oleh rakyat saja melainkan juga harus ditaati oleh penguasa atau pemerintah.

### Sifat Konstitusi

Konstitusi Negara ada yang bersifat luwes/supel (*flexible*) dan ada pula bersifat kaku (*rigid*). Konstitusi dikatakan luwes/supel/flexible apabila konstitusi memungkinkan untuk adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakatnya atau perkembangan zaman, contohnya konstitusi di Inggris dan Selandia Baru. Sedangkan konstitusi dikatakan kaku/rigid apabila konstitusi itu dalam perubahannya melalui prosedur yang sangat sulit dengan maksud agar tidak mudah diubah hukum dasarnya atau konstitusi tersebut, contohnya konstitusi di Amerika, Kanada, Jerman Indonesia.

### Tingkat Konstitusi

Herman Heller membagi Konstitusi dalam 3 tingkat:

1. Konstitusi sebagai pengertian politik, mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa. Pengertian Hukum menjadi sekunder, yang primer adalah bangunan masyarakat atau sering disebut *political decision*. Bangunan masyarakat sebagai hasil keputusan masyarakat.



2. Konstitusi sebagai pengertian hukum, keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang normatif, yang harus berlaku. Dari pengertian ini timbul aliran kodifikasi menghendaki hukum tertulis untuk terciptanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.
3. Konstitusi sebagai peraturan hukum, peraturan hukum tertulis. Dengan demikian UUD adalah bagian dari konstitusi tertulis.

### C. Perubahan Undang-Undang 1945

UUD '45 dirancang sejak 29 Mei 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat. Tugas utamanya adalah menyusun rancangan Undang-Undang sebagai salah satu persiapan untuk membentuk negara yang merdeka, namun anggota lembaga ini sibuk mengusung ideologinya masing-masing ketika membicarakan masalah Ideologi negara. Akibatnya, pembahasan tentang rancangan UUD menjadi terbengkalai. Maka BPUPKI dalam sidang pertamanya membentuk panitia kecil untuk merumuskan UUD yang diberinama Panitia Sembilan. Dan pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan ini berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah mukhodimah UUD yang kemudian diterima dalam sidang II BPUPKI tanggal 11 Juli 1945.

Setelah itu Ir. Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 Juli 1945 yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas menyusun rancangan UUD dan membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang. Sehingga UUD atau konstitusi

Negara Indonesia ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Dengan demikian sejak itu Indonesia telah menjadi suatu Negara modern karena telah memiliki suatu system ketatanegaraan yaitu dalam UUD 1945.

### 1. Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP disertai kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

### 2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Namun karena tidak sesuai dengan jati diri bangsa serta mencuat isu disintegrasi, maka kemudian Indonesia berganti bentuk lagi menjadi Negara kesatuan Republik.



### 3. Periode UUDS 1950 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Perubahan bentuk Negara secara otomatis juga membuat perubahan dalam konstitusinya. Mulai Pada tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi Indonesia berubah menjadi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia. Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

### 4. Periode kembalinya ke UUD 1945 5 Juli 1959-1966.

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:

1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara.
2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.

### 5. Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998.

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni, terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/*private debt* dijadikan beban rakyat Indonesia/*public debt*) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber alam kita.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantaranya melalui sejumlah peraturan:

1. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih



dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

#### 6. Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

#### 7. Periode Pasca Reformasi (Amandemen)

Setelah Reformasi banyak kalangan yang menginginkan dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Tujuan dilakukannya perubahan adalah untuk menambah sesuatu yang belum ada aturannya dalam konstitusi serta untuk merespon tuntutan zaman. Para pengamat politik berpandangan bahwa keberadaan UUD 1945 didesain oleh para pembuatnya bersifat sementara karena belum menentunya kondisi Negara pada saat itu. Selain itu Undang-Undang dasar 1945 juga telah diselengkan oleh pemerintah orde baru untuk melanggengkan Kekuasaanya.

Salah satu hal yang berubah dengan adanya amandemen adalah keberadaan lembaga Negara. Keberadaan lembaga ini cukup vital karena pada masa sebelumnya berbagai macam lembaga Negara dikendalikan oleh satu orang saja, yaitu Presiden. Meskipun secara formal terdapat aturan untuk memisahkan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif namun karena ketiadaan aturan yang jelas, maka aturan tersebut dapat dimanipulasi. Oleh sebab itu setelah reformasi mencoba diperbarui agar lebih jelas pola

memisahannya serta memungkinkan adanya control secara baik diantara berbagai macam lembaga Negara. Dengan adanya *check and balances* maka bisa mengurangi penumpukan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.

#### D. Sistem Konstitusi di Indonesia Menurut UUD 1945

Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Dalam hal yang kedua ini, hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia.

Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak azasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu.



### Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan ketatanegaraan yang ditandai oleh berlakunya berbagai macam konstitusi. Perubahan Undang-Undang Dasar atau sering pula digunakan istilah amandemen Undang-Undang Dasar merupakan salah satu agenda reformasi. Perubahan itu dapat berupa pencabutan, penambahan, dan perbaikan.

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945 antara lain:

1. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam membentuk undang-undang.
2. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu *lunas* (fleksibel) sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir).
3. Kedudukan penjelasan UUD 1945 sering kali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 memiliki beberapa tujuan:

1. menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara dalam mencapai tujuan Nasional dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi;

3. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945;
4. menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara secara demokratis dan modern.
5. melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum;
6. menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan bangsa dan negara.

Konsepsi Konstitusi Negara Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme konstitusional Demokrasi Pancasila Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Perihal mekanisme demokrasi pancasila telah tercantum di dalam penjelasan UUD 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam system pemerintahan Negara sebagai berikut:

- a. Indonesia ialah Negara berdasar atas hukum (*rechstaat*).
- b. Indonesia menggunakan sistem konstitusional.
- c. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan MPR.
- d. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara tertinggi dibawah majelis.



- e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- f. Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- g. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas.

Sistem pemerintahan negara Indonesia dibagi menjadi 7 point yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sistem pemerintahan di Indonesia dikenal dengan **Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara**. Seiring dengan adanya amandemen UUD 1945, maka ketujuh kunci pokok sistem pemerintahan itu juga mengalami perubahan. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 hasil dari amandemen:

### 1. Indonesia Adalah Negara Yang Berdasar Atas Hukum

Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti negara yang di dalamnya termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tugas dan tindakan apapun harus berdasarkan dan dilandasi oleh peraturan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula.

### 2. Sistem Konvensional

Pemerintahan Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolute (mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem konvensional ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi

oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan oleh ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan sebagainya. Sehingga sistem konstitusional ini merupakan penegasan dari sistem hukum yang telah dijelaskan pada poin 1 diatas.

### 3. Kekuasaan Negara Tertinggi Ada Di Tangan Rakyat

Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 2002, kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR. Dimana MPR yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia juga memegang kedaulatan rakyat. Namun setelah dilakukan amandemen, kekuasaan negara tertinggi beralih ke tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 sesuai dengan pasal 1 ayat 2.

### 4. Presiden ialah Penyelenggara Negara Yang Tertinggi Di Samping MPR dan DPR

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi menurut UUD 1945, Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR. Dengan demikian Presiden bertanggung jawab langsung terhadap rakyat.

### 5. Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR

DPR mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Presiden. Sehingga Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membentuk Undang-Undang dan menetapkan APBN. Oleh karena itu Presiden harus bekerjasama dengan dewan. Namun, Presiden tidak bertanggung jawab kepada



dewan. Ini berarti bahwa kedudukan Presiden tidak tergantung pada dewan.

#### 6. Menteri Negara Adalah Pembantu Presiden, Menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR

Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UUD 1945. Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sehingga Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukan Menteri Negara juga tidak tergantung kepada DPR.

#### 7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

Hasil Amandemen UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga dalam sistem kekuasaan kelembagaan negara, Presiden tidak lagi merupakan Mandataris MPR bahkan sejajar dengan MPR dan DPR. namun apabila Presiden terbukti melanggar Undang-Undang maupun UUD 1945, maka MPR dapat melakukan *Impeachment* (pemberhentian).

## BAB VI HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW

### 1.1. Latar Belakang.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Hak Asasi merupakan sebuah bentuk anugrah yang diturunkan oleh Tuhan sebagai sesuatu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharga. Hak Asasi dilandasi dengan sebuah kebebasan setiap individu dalam menentukan jalan hidupnya, tentunya Hak asasi juga tidak lepas dari kontrol bentuk norma-norma yang ada. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membedakan suku, golongan, keturunan, jabatan, agama dan lain sebagainya antara setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Terkait tentang hakikat hak asasi manusia, maka sangat penting sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus saling menjaga dan menghormati hak asasi masing-masing individu. Namun pada kenyataannya, kita melihat perkembangan HAM di Negara ini masih banyak bentuk pelanggaran HAM yang sering kita temui.

Rule of Law adalah suatu doktrin yang mulai muncul pada abad ke 19, bersamaan dengan kelahiran Negara konstitusi dan demokrasi. *Rule of Law* merupakan konsep tentang common law dimana segenap lapisan masyarakat dan Negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Ada tidaknya *Rule of Law* dalam suatu Negara



ditentukan oleh kenyataan apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil baik sesama warga Negara maupun pemerintah.

### 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan mukaddimah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

- a. Apa pengertian dan ruang lingkup Hak Asasi Manusia dan *Rule of Law*?
- b. Bagaimana perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
- c. Apa saja pelanggaran Hak Asasi Manusia?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengertian Hak Asasi Manusia dan *Rule of Law*, serta mengetahui ruang lingkup Hak Asasi Manusia dan *Rule of Law*
- b. Untuk mengetahui perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia
- c. Untuk mengetahui pelanggaran apa sajakah yang sering terjadi terkait dengan Hak Asasi Manusia maupun *Rule of Law*

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) secara tegas di atur dalam Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat

melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."

Sedangkan pengertian HAM menurut para ahli: John Locke, hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Jack Donnely, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Meriam Budiardjo, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal

Koentjoro Poerbapranoto (1976), Hak Asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Rights, United Nations* sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat



pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994). Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan, mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu. Ruang lingkup HAM yang merupakan dasar dari manusia yang senantiasa berubah menurut ukuran zaman dan perumusannya, sebagai berikut:

a. HAM menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Rights 1948, meliputi:

1. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat.

2. Hak memilih sesuatu.
3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama.
5. Hak untuk hidup.
6. Hak untuk kemerdekaan hidup.
7. Hak untuk memperoleh nama baik.
8. Hak untuk memperoleh pekerjaan.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

b. HAM menurut UU. No: 39 tahun 1999

1. Hak untuk hidup,
2. Hak berkeluarga,
3. Hak mengembangkan diri,
4. Hak keadilan,
5. Hak kemerdekaan,
6. Hak berkomunikasi,
7. Hak keamanan,
8. Hak kesejahteraan, dan
9. Hak perlindungan.\

Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi :

- a) Hak asasi pribadi (*Personal Rights*)
- b) Contoh: hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.
- c) Hak asasi politik (*Political Rights*) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara. Misalnya: memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.

d. Hak asasi ekonomi (*Property Rights*)

Misalnya: hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan hak mendapat hidup layak.

e. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*Sosial & Cultural Rights*).



Misalnya: mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkepres.

- e. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (*Rights Of Legal Equality*)
- f. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

### B. Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar Hak Asasi Manusia adalah manusia berada dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai macam aspek untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut:

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis
  - b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul social dan bangsanya
  - c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain
- b) Tujuan Hak Asasi Manusia

- a. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.
- b. HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia
- c. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar

### C. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia.

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memuat prinsip bahwa hak asasi manusia harus dilihat secara holistik bukan parsial sebab HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan

#### 1. Periode sebelum kemerdekaan

Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai dari organisasi pergerakan sebagai berikut:

- a. Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk pemikiran



HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

- b. Perhimpunan Indonesia, lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri.
- c. Sarekat Islam, menekankan pada usaha – usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial.
- d. Partai Komunis Indonesia, sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak-hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu-isu yang berkenaan dengan alat produksi.
- e. Indische Partij, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan.
- f. Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.
- g. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara.
- h. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk

memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.

## 2. Periode setelah kemerdekaan

Perdebatan tentang HAM terus berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan Indonesia: 1945-1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, dan periode HAM Indonesia kontemporer (pasca orde baru).

### a. Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Sepanjang periode ini, wacana HAM bisa dicirikan pada:

#### 1. Bidang sipil politik, melalui:

- a. UUD 1945 (Pembukaan, pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Penjelasan pasal 24 dan 25 )
- b. Maklumat Pemerintah 01 November 1945
- c. Maklumat Pemerintah 03 November 1945
- d. Maklumat Pemerintah 14 November 1945
- e. KRIS, khususnya Bab V, Pasal 7-33
- f. KUHP Pasal 99

#### 2. Bidang ekonomi, sosial, dan budaya, melalui:

- a. UUD 1945 (Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Penjelasan Pasal 31-32)
- b. KRIS Pasal 36-40



#### b. Periode 1950-1959

Periode 1950-1959 dikenal dengan masa perlementer. Sejarah pemikiran HAM pada masa ini dicatat sebagai masa yang sangat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM di Indonesia. Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal di masa itu, suasana kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Menurut catatan Bagir Manan, masa gemilang sejarah HAM Indonesia pada masa ini tercermin pada lima indikator HAM:

- a. Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi.
- b. Adanya kebebasan pers.
- c. Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis.
- d. Kontrol parlemen atas eksekutif.
- e. Perdebatan HAM secara bebas dan demokratis.

Tercatat pada periode ini Indonesia meratifikasi dua konvensi internasional HAM, yaitu:

- a. Konvensi Genewa tahun 1949 yang mencakup perlindungan hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil di waktu perang.
- b. Konvensi tentang Hak Politik Perempuan yang mencakup hak perempuan untuk memilih dan dipilih tanpa perlakuan diskriminasi, serta hak perempuan untuk menempati jabatan publik.

#### c. Periode 1959-1966

Periode ini merupakan masa berakhirnya Demokrasi Liberal, digantikan oleh sistem Demokrasi Terpimpin yang

terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*) tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap sistem Demokrasi Parlementer yang dinilainya sebagai produk barat. Menurut Soekarno Demokrasi Parlementer tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki tradisinya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Melalui sistem Demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Presiden tidak dapat di kontrol oleh parlemen, sebaliknya parlemen di kendalikan oleh Presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan di nobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup. Akibat langsung dari model pemerintahan yang sangat individual ini adalah pemasungan hak-hak asasi warga negara. Semua pandangan politik masyarakat diarahkan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah yang otoriter. Dalam dunia seni, misalnya atas nama pemerintahan Presiden Soekarno menjadikan Lembaga Kebudayaan Rakyat (lekra) yang berafeliasi kepada PKI sebagai satu-satunya lembaga seni yang diakui. Sebaliknya, lembaga selain lekra dianggap anti pemerintah atau kontra revolusi.

#### 4. Periode 1966-1998

Pada mulanya, lahirnya orde baru menjanjikan harapan baru bagi Penegak HAM di Indonesia. Berbagai seminar tentang HAM dilakukan orde baru. Namun pada kenyataannya, orde baru telah menorehkan sejarah hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Janji-janji orde baru tentang pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami kemunduran amat pesat sejak awal 1970-an hingga 1980-an.



Setelah mendapatkan mandat konstitusional dari sidang MPRS, pemerintah Orde Baru mulai menunjukkan watak aslinya sebagai kekuasaan yang anti HAM yang dianggapnya sebagai produk barat. Sikap anti HAM Orde Baru sesungguhnya tidak berbeda dengan argumen yang pernah di kemukakan Presiden Soekarno ketika menolak prinsip dan praktik Demokrasi Parlementer, yakni sikap apologis dengan cara mempertentangkan demokrasi dan Prinsip HAM yang lahir di barat dengan budaya lokal Indonesia. Sama halnya dengan Orde Lama, Orde Baru memandang HAM dan demokrasi sebagai produk Barat yang individualistik dan bertentangan dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Di antara butir penolakan pemerintah Orde baru terhadap konsep universal HAM adalah:

- a. HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila.
- b. Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih dahulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM.
- c. Isu HAM sering kali digunakan oleh negara-negara barat untuk menjokkan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Apa yang dikemukakan oleh pemerintah Orde Baru tidak seluruhnya keliru, tetapi juga tidak semuanya benar. Sikap apriori Orde Baru terhadap HAM Barat ternyata sarat dengan pelanggaran HAM yang dilakukannya. Pelanggaran HAM Orde Baru dapat dilihat dari kebijakan

politik Orde Baru yang bersifat Sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah. Sepanjang pemerintahan presiden Soeharto tidak dikenal istilah partai oposisi, bahkan sejumlah gerakan yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah dinilai sebagai anti pembangunan bahkan anti Pancasila. Melalui pendekatan keamanan (security approach) dengan cara kekerasan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip HAM, pemerintah orde baru tidak segan-segan menumpas segala bentuk aspirasi masyarakat yang dinilai berlawanan dengan orde baru. Kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok, Kedung Ombo, Lampung, Aceh adalah segelintir daftar pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh penguasa Orde Baru.

Di tengah kuatnya peran Negara, suara perjuangan HAM dilakukan oleh kalangan organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Upaya penegakkan HAM oleh kelompok-kelompok nonpemerintahan membuahkan hasil yang menggembirakan di awal '90-an'. Kuatnya tuntutan penegakkan HAM dari kalangan masyarakat mengubah pendirian pemerintah Orde Baru untuk bersikap lebih akomodatif terhadap tuntutan HAM. Satu diantara sikap akomodatif pemerintah tercermin dalam persetujuan pemerintah terhadap pembentukan komisi nasional hak asasi manusia (komnas HAM) melalui keputusan presiden (keppres). Kehadiran komnas HAM adalah untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. Lembaga ini juga membantu pengembangan dan pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sayangnya, sebagai lembaga bentukan pemerintah orde baru penegakkan HAM



tidak berdaya dalam mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Negara.

Sikap akomodatif lainnya ditunjukkan dengan dukungan pemerintahan dengan meratifikasi tiga (3) konvensi HAM: (1) konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melalui UU no. 7 tahun 1984; (2) konvensi anti-apartheid dalam olahraga, melalui UU no. 48 tahun 1993; (3) konvensi hak anak, melalui keppres no. 36 tahun 1990.

Namun demikian, sikap akomodatif pemerintah orde baru terhadap tuntutan HAM masyarakat belum sepenuhnya diserasikan dengan pelaksanaan HAM oleh Negara. Komitmen orde baru terhadap pelaksanaan HAM secara murni dan konsekuen masih jauh dari harapan masyarakat. Masa pemerintahan orde baru masih sarat dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Negara atas warga Negara. Akumulasi pelanggaran HAM Negara smasa periode ini tercermin dengan tuntutan mundur presiden soeharto dari kursi kepresidenan yang disurahkan oleh kelompok reformis dan mahasiswa pada tahun 1998. Isu pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan mewarnai tuntutan reformasi yang disuarakan pertama kali oleh Prof. Dr. Amin Rais, tokoh intelektual Muslim Indonesia yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah orde baru.

##### 5. Periode pasca Orde Baru

Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah HAM di Indonesia. Lengsernya tampuk kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan

HAM, setelah tiga puluh tahun lebih terpasung di bawah rezim otoriter. Pada tahun ini Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai Wakil presiden RI.

Pada masa Habibie misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintahan era reformasi akan penegakan HAM. Sejumlah konvensi HAM juga diratifikasi di antaranya: konvensi HAM tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi; konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam; konvensi penghapusan segala bentuk (3) diskriminasi rasial; konvensi tentang penghapusan kkerja paksa; konvensi tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan; serta konvensi tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

Kesungguhan pemerintahan B.J. Habibie dalam perbaikan pelaksanaan HAM ditunjukkan dengan pencanangan program HAM yang dikenal dengan istilah Rencana Aksi Nasional HAM, pada Agustus 1998. Agenda HAM ini bersandarkan pada empat pilar, yaitu:

- a. Persiapan pengesahan perangkat Internasional di bidang HAM
- b. Diseminasi informasi dan pendidikan bidang HAM
- c. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM
- d. Pelaksanaan isi perangkat Internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional



Komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM juga di tunjukkan dengan pengesahan UU tentang HAM, pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian di gabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM, penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dalam amandemen UUD 1945, penerbitan inpres tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, pengesahan UU tentang pengadilan HAM. Pada tahun 2001, Indonesia juga menandatangani dua protocol hak anak yakni protocol yang terkait dengan larangan perdagangan, prostitusi, dan pornografi anak, serta protocol yang terkait dengan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Menyusul kemudian pada tahun yang sama pemerintah membuat beberapa pengesahan UU diantaranya tentang perlindungan anak, pengesahan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan penerbitan keppres tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Indonesia tahun 2004-2009.

#### D. HAM di Indonesia

Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku tiga undang-undang dalam 4 periode, yaitu:

- a. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945,
- b. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
- c. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, berlaku UUDS 1950.
- d. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku kembali UUD 1945.

Pencantuman pasal-pasal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam tiga UUD tersebut berbeda satu sama lain. Dalam UUD 1945 butir-butir Hak Asasi Manusia hanya tercantum beberapa saja. Sementara Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 hampir bula-bulat mencantumkan isi Deklarasi HAM dari PBB. Hal demikian ini karna memang situasinya sangat dekat dengan Deklarasi HAM PBB yang masih aktual. Di samping itu terdapat pula harapan masyarakat dunia agar deklarasi HAM PBB dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar atau perundangan lainnya di negara-negara anggota PBB, agar secara yuridis formal HAM dapat berlaku di negara masing-masing.

Ketika UUD 1945 berlaku kembali sejak 5 Juli 1959, secara yuridis formal, hak-hak asasi manusia tidak lagi lengkap seperti Deklarasi HAM PBB, karena yang terdapat di dalam UUD 1945 hanya berisi beberapa pasal saja, khususnya pasal 27, 28, 29, 30 dan 31. Pada awal Orde baru saja tujuan Pemerintah adalah melaksanakan hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 serta berupaya melengkapinya. Tugas untuk melengkapi HAM ini ditangani oleh sebuah panitia MPRS yang kemudian menyusun Rancangan Piagam Hak-hak Asasi Manusia serta hak-hak dan Kewajiban warganegara yang dibahas dalam sidang MPRS tahun 1968. Dalam pembahasan ini sidang MPRS menemui jalan buntu, sehingga akhirnya dihentikan. Begitu pula setelah MPR terbentuk hasil pemilihan umum 1971 persoalan HAM tidak lagi diagendakan, bahkan dipetikan sampai tumbanganya Orde Baru di tahun 1998 yang berganti dengan era Reformasi. Pada awal Reformasi itu pula



diselenggarakan sidang istimewa MPR tahun 1998 yang salah satu ketetapanannya berisi Piagam HAM.

#### **a. Lembaga penegak HAM**

Hak asasi manusia merupakan hak yang harus dilindungi, baik oleh individu, masyarakat maupun oleh Negara. Hal ini dikarenakan Hak Asasi Manusia merupakan hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, HAM harus dijaga, dihormati dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak seorangpun berhak untuk melanggar hak asasi yang dimiliki oleh manusia dengan alasan apapun.

Untuk merealisasikan penegakan HAM di Indonesia, telah dibentuk suatu komisi mengenai hak asasi manusia. Dasar hukum bagi penegakan HAM di Indonesia sudah sangat jelas, baik melalui UUD, ketetapan MPR maupun perundang-undangan, baik yang sudah disahkan, maupun ratifikasi dari konvensi hak asasi manusia yang ada di dunia Internasional.

#### **b. Komisi Nasional HAM**

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.

Tujuan Komnas HAM antara lain:

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

#### **Wewenang Komnas HAM**

- a. Wewenang dalam bidang pengkajian penelitian
- b. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesibilitas atau ratifikasi
- c. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia
- d. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian
- e. Studi perpustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia
- f. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia
- g. Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

#### **Wewenang dalam bidang penyuluhan**

- a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia



- b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya
- c. Kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia
- d. Wewenang dalam pemantauan
- e. Pengamat pelaksanaan hak asasi manusia dan penyuluhan laporan hasil pengamatan tersebut
- f. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengarkan keterangannya
- g. Pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan
- h. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu
- i. Pemanggilan kepada pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan
- j. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan
- k. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan apabila dalam perkara

tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Wewenang dalam bidang mediasi

- a. Perdamaian kedua belah pihak
- b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli
- c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan
- d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditinjau lanjuti penyelesaiannya
- e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditinjau lanjuti

## **B. Hak Asasi Manusia Dalam Perundang-undangan Nasional**

Dalam peraturan perundang undangan RI paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (Undang-undang Dasar Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.



Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat, karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM melalui TAP MPR, kelemahannya tidak dapat memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Sedangkan pengaturan HAM dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan

#### F. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia bersifat universal, yang artinya berlaku dimana saja, untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil siapapun. Hak-hak tersebut dibutuhkan individu melindungi diri dan martabat kemanusiaan, juga sebagai landasan moral dalam bergaul dengan sesama manusia. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat sesuka hatinya maupun seenak-naknanya.

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak

mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kasus HAM sering kali terjadi, tidak hanya di Indonesia tapi juga dinegara-negara lain di dunia. Di Indonesia sendiri kasus seperti ini masih sering terjadi walaupun sudah ada lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat.

Banyak macam Pelanggaran HAM di Indonesia, dari sekian banyak kasus HAM yang terjadi, tidak sedikit juga yang belum tuntas secara hukum, hal itu tentu saja tak lepas dari kemauan dan itikad baik pemerintah untuk menyelesaikannya sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pengendali keadilan bagi bangsa ini.

a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi:

- a) 1. Pembunuhan massal (genosida: setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau



memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa)

- b) Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
- c) Penyiksaan
- d) Penghilangan orang secara paksa
- e) Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis

b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi:

- a) Pemukulan
- b) Penganiayaan
- c) Pencemaran nama baik
- d) Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
- e) Menghilangkan nyawa orang lain.

Penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat nondiskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum.

Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berada dan dilakukan

diluar batas teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga Negara Indonesia.

### G. Pengertian dan Ruang Lingkup *Rule of Law*

Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan *Rule of Law*. Berdasarkan bentuknya sebenarnya *Rule of Law* adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk negara mendasarkan pada *Rule of Law*. Dalam hubungan ini Pengertian *Rule of Law* berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule Of Law*. *Rechtsstaat* atau *Rule Of Law* itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan.

Friedman (1959) membedakan *rule of law* menjadi dua, yaitu pengertian secara formal (*in the formal sense*) dan pengertian secara hakiki/materill (*ideological sense*). Secara formal, *rule of law* diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power), misalnya Negara. Sementara itu secara hakiki, *rule of law* terkait dengan pengakuan *rule of law* karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (*just and unjust law*). *Rule of law* terkait dengan



keadilan sehingga *rule of law* harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat/bangsa.

Menurut Albert Venn Dicey dalam "Introduction to the Law of the Constitution" memperkenalkan istilah the rule of law yang secara sederhana diartikan suatu keteraturan hukum. Menurut Dicey, terdapat tiga unsur yang fundamental dalam rule of law yaitu:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang dalam arti seseorang Hanya boleh dihukum jikalau memang melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama di muka hukum, hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat Negara
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh UU serta keputusan-keputusan UU

#### H. Prinsip-prinsip Rule of Law

Pengertian *Rule of Law* tidak dapat dipisahkan dengan pengertian negara hukum atau *rechts staat*. Meskipun demikian dalam negara yang menganut sistem *Rule of Law* harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas, terutama dalam hubungannya dengan realisasi Rule of Law itu sendiri. Menurut Albert Venn Dicey dalam "Introduction to the Law of The Constitution", memperkenalkan istilah the rule of law yang secara sederhana diartikan sebagai suatu keteraturan hukum. Menurut Dicey terdapat 3 unsur yang fundamental dalam Rule of Law, yaitu: (1) supremasi aturan aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum, jikalau memang melanggar hukum (2) kedudukannya yang sama dimuka hukum. Hala ini

berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara; dan (3) terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang serta keputusan pengadilan.

7 Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa jikalau dalam hubungan dengan negara hanya berdasarkan prinsip tersebut, maka negara terbatas dalam pengertian negara hukum formal, yaitu negara tidak bersifat proaktif melainkan pasif. Sikap negara yang demikian ini dikarenakan negara hanya menjalankan dan taat pada apa yang termaktub dalam konstitusi semata. Dengan kata lain negara tidak hanya sebagai "penjaga malam" (*nachtwachterstaat*). Dalam pengertian seperti ini seakan-akan negara tidak berurusan dengan kesejahteraan rakyat. Setelah pertengahan abad ke-20 mulai bergeser, bahwa negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu negara tidak hanya sebagai "penjaga malam" saja, melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur kehidupan sosial ekonomi.

Gagasan baru inilah yang kemudian dikenal dengan *welvaartstaat*, *verzorgingsstaat*, *welfare state*, *social service state*, atau "negara hukum material". Perkembangan baru inilah yang kemudian menjadi *raison d'être* untuk melakukan revisi atau bahkan melengkapi pemikiran Dicey tentang negara hukum formal.

Dalam hubungan negara hukum ini organisasi pakar hukum Internasional, *International Commission of Jurists* (ICJ), secara intens melakukan kajian terhadap konsep negara hukum dan unsur-unsur esensial yang terkandung di dalamnya. Dalam beberapa kali pertemuan ICJ di berbagai negara seperti di Athena (1995), di New Delhi (1956), di Amerika Serikat



(1957), di Rio de Janeiro (1962), dan Bangkok (1965), dihasilkan paradigma baru tentang negara hukum. Dalam hubungan ini kelihatan ada semangat bersama bahwa konsep negara hukum adalah sangat penting, yang menurut Wade disebut sebagai *rule of law is a phenomenon of free society and the mark of it*. ICJ dalam kapasitasnya sebagai forum intelektual, juga menyadari bahwa yang terpenting lagi adalah bagaimana konsep *rule of law* dapat diimplementasikan sesuai perkembangan kehidupan dalam masyarakat.

Secara praktis, pertemuan ICJ di Bangkok tahun 1965 semakin menguatkan posisi *rule of law* dalam kehidupan bernegara. Selain itu, melalui pertemuan tersebut telah digariskan bahwa di samping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial-ekonomi, sehingga perlu dibentuk standar-standar sosial ekonomi. Komisi ini merumuskan syarat-syarat pemerintahan yang demokratis dibawah *rule of law* yang dinamis, yaitu: (1) perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individual, konstitusi harus pula menentukan teknis prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; (2) lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak; (3) pemilihan umum yang bebas; (4) kebebasan menyatakan pendapat; (5) kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan (6) pendidikan kewarganegaraan (Azhary, 1995: 59).

Gambaran ini mengukuhkan negara hukum sebagai *welfare state*, karena sebenarnya mustahil mewujudkan cita-cita *rule of law* sementara posisi dan peran negara sangat minimal dan lemah. Atas dasar inilah kemudian negara diberi kekuasaan dan kemerdekaan bertindak atas dasar inisiatif parlemen. Negara dalam hal ini pemerintah memiliki *fre-*

*ommesen* atau *poivoir discretionnaire*, yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial ekonomi dan keleluasaan untuk tidak terlalu terikat pada produk legislasi parlemen. Dalam gagasan *welfare state* ternyata negara memiliki wewenang yang relatif lebih besar, ketimbang format negara yang hanya bersifat negara hukum formal saja. Selain itu dalam *welfare state* yang terpenting adalah negara semakin otonom untuk mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran negara bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Kecuali itu, sejalan dengan konsep negara hukum, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law*, pada prinsipnya memiliki kesamaan fundamental serta saling mengisi. Dalam prinsip negara ini unsur penting pengakuan adanya pembatasan kekuasaan yang dilakukan secara konstitusional. Oleh karena itu, terlepas dari adanya pemikiran dan praktek konsep negara hukum yang berbeda, konsep negara hukum dan *rule of law* adalah suatu realitas dari cita-cita sebuah negara bangsa, termasuk negara Indonesia.

#### 1. Prinsip-prinsip Rule of Law secara formal di Indonesia

Penjabaran prinsip-prinsip *rule of law* secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

- a. Negara Indonesia adalah Negara hukum (Pasal 1 ayat 3)
- b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan peradilan (Pasal 24 ayat 1)
- c. Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib



menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1)

d. Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat sepuluh pasal antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 D ayat 1)

e. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D ayat 2)

Beberapa kasus dan penegakan rule of law antara lain:

- a. Kasus korupsi KPU dan KPUD
- b. Kasus *illegal logging*
- c. Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA)
- d. Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotropika
- e. Kasus perdagangan wanita dan anak

## BAB VII GEOPOLITIK INDONESIA

### A. Latar Belakang

Geopolitik merupakan permasalahan yang sangat penting pada dua abad terakhir ini. Permasalahan ini menjadi penting karena manusia yang telah berbangsa membutuhkan wilayah sebagai tempat tinggalnya yang kemudian di kenal dengan Negara. Dalam perkembangannya pengertian tidak saja diartikan sebagai intuisi yang secara minimal meliputi unsur wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berkuasa. Unsur rakyat suatu negara disamping warga negara juga meliputi bukan warga negara. Agar negara mencapai tujuan nasional aman dan sejahtera (Pembukaan UUD '45 Alinea IV) perlu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan yang dimaksud agar warga negara Indonesia tahu tentang hak dan kewajiban, serta mampu berdiri dan tetap menjaga dirinya di tengah arus globalisasi.

Seperti yang dikatakan Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 dihadapan sidang BPUPKI bahwa orang dan tempat tak dapat dipisahkan atau rakyat tak dapat dipisahkan dari bumi yang ada dibawah kakinya. Oleh karena itu, setelah membangsa orang menyatakan tempat tinggal sebagai negara. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian negara tidak hanya tempat tinggal, tetapi diartikan lebih luas lagi yang meliputi institusi, yaitu pemerintah, rakyat, kedaulatan, dan lain-lain.

Karena orang dan tempat tinggalnya tak dapat dipisahkan, ruang yang menjadi hal yang menimbulkan konflik antar manusia, keluarga, masyarakat, dan bangsa hingga kini, meskipun bentuknya dapat secara fisik maupun



non fisik. Untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya, suatu bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional. Para ilmuwan politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik yang merupakan kepanjangan dari geografi politik.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Geopolitik di Indonesia?
- b. Bagaimana Geostrategi di Indonesia?

## C. Tujuan

Adapun tujuan dari topik ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Geopolitik di Indonesia
- b. Mengetahui Geostrategi di Indonesia

## D. Manfaat

Adapun manfaat dari pembuatan topik ini yaitu makalah ini dapat dijadikan bahan acuan dan referensi dalam metode pembelajaran lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Geopolitik Indonesia

#### 1. Perkembangan Teori Geopolitik

Istilah geopolitik semula awalnya sebagai ilmu politik yang kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri khas negara yang berupa bentuk, luas, letak, iklim, dan sumber daya alam suatu negara untuk membangun dan membina negara. Para penyelenggara pemerintah nasional

hendaknya menyusun pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geomorfologi secara ilmiah berdasarkan cita-cita bangsa. Kemudian teori Geopolitik berkembang menjadi konsepsi wawasan nasional bangsa. Oleh karena itu, wawasan nasional bangsa selalu mengacu pada geopolitik. Dengan awasan nasional suatu negara, dapat dipelajari kemana arah perkembangan suatu negara.

#### 2. Beberapa Pandangan para pemikir Geopolitik

Pendapat para ahli mengenai teori geopolitik kontinental yaitu pertama dikemukakan oleh Friedrich Ratzel (1844-1904) bahwa teori ruang yang dalam konsepsinya dipengaruhi oleh ahli biologi Charles Darwin. Dalam teorinya, bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang "primitif". Pendapat tersebut kemudian diprtegas oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dengan teori kekuatannya yang menyatakan bahwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektual yang mampu mengeksploitasi negara "primitif" agar negaranya mendapat swasembada. Kemudian Karl Haushofer (1869-1946) yang pernah menjadi atase militer di Jepang meramalkan bahwa Jepang akan menjadi negara yang jaya didunia dimana untuk menjadi jaya suatu bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia. Ia berpendapat bahwa pada hakekatnya dunia terbagi atas empat kawasan benua dan dipimpin oleh negara yang unggul. Teori ruang dan teori kekuatan merupakan hasil penelitiannya yang dikenal dengan teori *Pan Regional* yaitu ruang hidup yang "cukup", swasembada, dan dunia dibagi menjadi empat *Pan*



Region dimana tipa *region* dipimpin oleh satu bangsa (*nation*) yang unggul.

### 3. Wawasan Geopolitik

#### 1. Wawasan Benua

Sir Halford Mackinder (1861-1947) mengemukakan teori Daerah Jantung atau yang dikenal sebagai wawasan benua. Dalam teorinya dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

- a) Dunia terdiri atas 9/12 air, 2/12 pulau dunia (Eropa, Afrika, Asia), dan sisanya 1/12 pulau lainnya.
- b) Daerah terdiri atas Daerah Jantung (*Heartland*) yang terletak di pulau dunia yaitu Rusia, Siberia, sebagian Mongolia, Daerah Bulan Sabit Dalam (*inner crescent*) meliputi Eropa Barat, Eropa Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, serta Daerah Bulan Sabit Luar (*outer crescent*) meliputi Afrika, Australia, Amerika/benua baru.
- c) Apabila suatu negara ingin menguasai dunia, harus menguasai Dunia Jantung dan diperlukan kekuatan darat yang memadai.

#### 2. Wawasan Bahari

Sir Walter Raleigh (1554-1618) dan Alfred T. Mahan (1840-1914) dengan Teori Kekuatan Maritim yang dicanangkan oleh Raleigh bertepatan dengan kebangkitan armada Inggris dan Belanda yang ditandai dengan kemajuan teknologi perkapalan dan pelabuhan, serta semangat perdagangan yang tidak lagi mencari emas dan sutra di timur. Kemudian lahir pemikiran hukum laut internasional setelah

UNCLOS 1982 yang berlaku sampai tahun 1994 yang disetujui melalui sidang umum PBB yaitu:

- a) Sir W. Raleigh : Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia/kekayaan dan akhirnya menguasai dunia. Oleh karena itu dibutuhkan armada yang kuat. Sebagai tindak lanjut, Inggris berusaha menguasai pantai-pantai benua dan paling tidak menyewanya.
- b) Alfred T. Mahan: Laut sebagai sumber kehidupan dimana di laut terdapat banyak sumber daya alam, maka dilaut harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya. Menurut Mahan, masalah akses ke laut dan jumlah penduduk juga harus diperhatikan karena faktor ini juga akan memungkinkan kemampuan industri untuk kemandirian suatu bangsa dan negara.

#### 3. Wawasan Dirgantara

Awal abad XX merupakan kebangkitan ilmu pengetahuan penerbangan yang dicetuskan oleh Giulio Douhet (1869-1930) dan William Mitchell (1879-1936). Keduanya mencita-citakan berdirinya Angkatan Udara. Dalam teorinya, dikemukakan bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga belakang lawan dan kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara.

#### 4. Wawasan Kombinasi

Nicholas J. Spijkman (1893-1943) yang mengemukakan Teori Daerah Batas (*Rimland theory*). Teori ini dipengaruhi oleh Mackinder dan Haushofer terutama dalam membagi daerah. Karena ia adalah bangsa Belanda yang pada dasarnya bangsa maritim, maka menurutnya penguasa daerah



jantung harus ada akses ke laut dan hendaknya menguasai pantai Eurasia. Dalam teorinya dikemukakan bahwa:

- a) Dunia terbagi empat daerah yaitu daerah jantung (*heartland*), Bulan Sabit Dalam (*Rimland*), Bulan Sabit Luar dan Dunia Baru (Benua Amerika)
- b) Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai dunia
- c) Daerah Bulan Sabit Dalam (*Rimland*) akan lebih besar pengaruhnya dalam peraturan politik dunia daripada Daerah Jantung
- d) Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat.

#### 4. Geopolitik Indonesia

##### 1. Wawasan Nasional

Wawasan berasal dari kata *wawas* yang berarti meninjau, memandang, atau mengamati. Wawasan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang. Wawasan Nasional suatu bangsa terbentuk karena bangsa tersebut tinggal dalam suatu wilayah yang diakui sebagai miliknya untuk kehidupannya. Wawasan Nasional bangsa Indonesia dinamakan wawasan nusantara yang merupakan implementasi perjuangan pengakuan sebagai negara kepulauan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Paham nusantara menunjukkan dua arah pengaruh yaitu ke dalam: berlaku asas kepulauan yang menuntut terpunuhnya unsur tanah dan air yang selaras dan serasi untuk merealisasikan wujud tanah air serta ke luar: berlakunya asas posisi antara yang menuntut posisi yang kuat bagi Indonesia untuk dapat berdiri tegak dari tarikan segala penjuru.

##### 2. Wawasan Nusantara

Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan nusantara yang secara umum didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhineka, serta lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dan turut serta dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Hakikat tujuan wawasan nusantara adalah kesatuan dan persatuan dalam kebhinekaan yang mengandung arti sebagai berikut:

- a) Penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi dan potensi geografi, serta kebhinekaan budaya
- b) Pedoman dan pola tindak serta pola pikir kebijaksanaan nasional
- c) Hakekat wawasan nusantara dasar persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

##### 3. Kedudukan Wawasan Nusantara

Dalam sistem kehidupan nasional Indonesia sebagai paradigma nasional Indonesia yaitu:

- a) Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara
- b) UUD 1945 sebagai konstitusi negara
- c) Wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia
- d) Ketahanan Nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia
- e) Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan Nasional

##### 4. Peranan Wawasan Nusantara

Peranan wawasan nusantara yaitu sebagai berikut:



- a) Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras pada segenap aspek kehidupan nasional
- b) Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya dimana peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antar bangsa dan ruang hidupnya. Jika lingkungan tidak dimanfaatkan maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa
- c) Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional yang menjadi dasar hubungan antar bangsa
- d) Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian.

#### 5. Wajah Wawasan Nusantara

Geopolitik Indonesia hanya satu yaitu wawasan nusantara tetapi wajahnya lebih dari satu yaitu ada empat wajah yang meliputi: wajah nusantara sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi ketahanan nasional, wajah nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional, wajah nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, serta wajah nusantara sebagai wawasan kewilayahan.

#### 6. Wawasan Nusantara Sebagai Landasan Konsepsi Ketahanan Nasional

Wawasan nusantara dalam perkembangannya dipandang sebagai konsepsi politik ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang merupakan penerapan teori geopolitik dari Bangsa Indonesia. Ketahanan nasional diartikan sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan dalam mencapai persatuan serta kesatuan

nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keamanan nasional. Bertolak dari pandangan ini, maka ketahanan nasional merupakan geostrategi nasional untuk mencapai sasaran yang telah ditegaskan dalam wawasan nusantara dan perlu ditingkatkan dengan berpedoman pada wawasan nusantara.

#### 7. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Pembangunan Nasional

Menurut UUD 1945, MPR wajib membuat GBHN yang menegaskan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup mengenai: perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, serta perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

#### 8. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Pertahanan dan Keamanan Negara

Wawasan nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Implementasi nyata dari wawasan nusantara yang menjadi kepentingan-kepentingan pertahanan keamanan negara harus ditegakkan. Realisasi penghayatan dan pengisian wawasan nusantara disatu pihak menjamin keutuhan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam serta penyelarasannya sedangkan di pihak lain dapat menunjukkan kedaulatan negara Republik Indonesia.



Kesatuan pertahanan dan keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah mana pun pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

#### 9. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kewilayahan

Sebagai faktor eksistensi suatu negara, maka wilayah nasional perlu ditentukan batas-batasnya agar tidak terjadi sengketa dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, pada umumnya batas-batas wilayah suatu negara dirumuskan dalam konstitusi negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Namun, UUD 1945 tidak memuat secara jelas ketentuan wilayah negara Republik Indonesia baik dalam pembukaan Undang-Undang maupun dalam pasal-pasal. Ketentuan mengenai batas wilayah Indonesia terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea IV: ".....seluruh tumpah darah Indonesia....." serta pada pasal 18 UUD 1945: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil.....".

#### 10. Tantangan Bangsa Indonesia Akibat Deklarasi Juanda

Dengan adanya deklarasi Juanda, secara yudiris formal negara Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi. Hal ini menimbulkan beberapa tekasi dari beberapa negara yang beragam dan dibagi menjadi 4 kategori yaitu:

- Negara-negara ASEAN termasuk Australia dan Timor Leste
- Negara-negara yang berkepentingan terhadap usaha perikanan laut
- Negara-negara maritim yang memiliki armada angkutan niaga yang besar
- Negara maritim besar terutama negara adidaya dalam rangka mencapai tujuan strategi global.

Tantangan ke dalam yakni memahami makna negara kepulauan dan makna benua maritim. Selain itu, menghilangkan paham bahwa batas wilayah tidak lagi berdasarkan garis pantai atau *contour/coastline base*, tetapi atas dasar *base line*.

#### 11. Geopolitik dan Hukum Kewilayahan

Perkembangan sejarah hukum alaut tidak lepas dari kemajuan teknologi maritim perkapalan dan pelayaran Belanda dan Inggris serta orientasi komoditi perdagangan dunia. Hakekat laut yaitu:

- Bebas, merdeka dan bergerak serta relatif tetap dan tidak mudah rusak
- Datar dan terbuka serta tidak dapat dipakai secara sembunyi
- Tidak dapat dikuasai secara mutlak (tidak dapat dikaveling, diberi tanda)
- Media untuk bermacam-macam alat angkut, terutama yang bervolume besar.
- Dari beberapa hakikat tersebut, timbul falsafah hukum laut yang berbuntut pada perebutan wilayah laut yakni:
  - Res Nullius*: Laut tidak ada yang memiliki karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh setiap negara
  - Res Communis*: Laut milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki oleh setiap negara.

#### 12. Beberapa Perhatian Manusia Terhadap Laut

Perubahan peta bumi setelah perang dunia ke II karena telah lahir banyak negara nasional baru yang memiliki laut. Dengan demikian perlu diperhatikan:

- Laut untuk kelangsungan hidup bangsa dan kesejahteraan rakyat



- b) Perlu pengaturan bersama pemanfaatan laut dan lingkungan untuk bangsa-bangsa
- c) Kemajuan teknologi berdampak pada meningkatnya kemampuan manusia dalam memanfaatkan laut
- d) Bertambahnya jumlah penduduk harus diimbangi dengan kenaikan produksi, khususnya yang bersumber dari kekayaan laut
- e) Bagi Bangsa Indonesia, laut untuk menjamin integrasi, sarana untuk perhubungan dan transportasi, serta menjadi salah satu penghidupan serta selain itu ditinjau dari segi militer merupakan wahana pertahanan.

### 13. Hukum Dirgantara dan Perkembangannya

Ruang dirgantara dibagi menjadi dua bagian yaitu ruang udara dan ruang antariksa. Ruang udara berada di atas suatu wilayah negara dan dikategorikan sebagai ruang udara nasional atau wilayah kedaulatan negara kolong yang pemanfaatannya oleh negara tersebut, Adapun Ruang antariksa, dimanfaatkan dan dikendalikan secara internasional dan tidak boleh dijadikan subjek negara kolong.

### 14. Geostationery Satellite Orbit (GSO)

Geostationery Satellite Orbit (GSO) merupakan suatu orbit yang berbentuk cincin yang terletak pada enam radian bumi di atas garis khatulistiwa guna untuk meletakkan satelit komunikasi agar satelit tersebut berada pada posisi tetap di ruang angkasa terhadap bumi yang ketinggiannya  $\pm 36.000$  km di atas permukaan bumi. Geostationery Satellite Orbit (GSO) mempunyai tiga keunikan yaitu:

- a) GSO hanya pada padang khatulistiwa, ruas GSO ada di negara khatulistiwa
- b) Ukurannya terbatas yaitu tebal  $\pm 30$  km lebar 150 km
- c) Satelit pada orbit ini akan mengelilingi bumi dari barat ke timur dengan masa orbit  $\pm 24$  jam (23 jam, 56 menit, 4 detik)

Panjang garis khatulistiwa Indonesia 6.110 km, GSO Indonesia 9.997 km atau 12,5% keliling GSO dan GSO menjadi sumber daya alam terbatas.

### 15. Geopolitik dan Otonomi Daerah

Beberapa asas dalam mengelola daerah yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi. Pada kenyataannya, otonomi daerah di Indonesia secara luas tidak atau belum pernah terlaksana. Sejak masa penjajahan Belanda, Jepang, dan setelah kemerdekaan Indonesia otonomi daerah masih dalam bentuk dekonsentrasi.

### 16. Pembagian Daerah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi serta daerah provinsi itu dibagi atas beberapa kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah provinsi yang berbatasan dengan laut memiliki kewenangan laut sejauh 12 mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan ke arah perairan kepulauan. Asas ini bertentangan dengan Deklarasi Pemerintahan RI yang telah dilakukan melalui UNCLOS serta telah diratifikasi dengan UU No.6/1996 tentang perairan Indonesia.



## BAB VIII GEOSTRATEGI INDONESIA

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negeri yang amat unik. Hanya sedikit negara di dunia, yang bila dilihat dari segi geografis, memiliki kesamaan dengan Indonesia. Negara-negara kepulauan di dunia, seperti Jepang dan Filipina, masih kalah bila dibandingkan dengan negara kepulauan Indonesia. Indonesia adalah suatu negara, yang terletak di sebelah tenggara benua Asia, membentang sepanjang 3,5 juta mil, atau sebanding dengan seperdelapan panjang keliling Bumi, serta memiliki tak kurang dari 13.662 pulau.

Jika dilihat sekilas, hal tersebut merupakan suatu kebanggaan dan kekayaan, yang tidak ada tandingannya lagi di dunia ini. Tapi bila dipikirkan lebih jauh, hal ini merupakan suatu kerugian tersendiri bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia terlihat seperti pecahan-pecahan yang berserakan. Dan sebagai 13.000 pecahan yang tersebar sepanjang 3,5 juta mil, Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang amat sulit untuk dapat dipersatukan. Maka, untuk mempersatukan Bangsa Indonesia, diperlukan sebuah konsep Geopolitik yang benar-benar cocok digunakan oleh negara.

Geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Negara tidak akan pernah mencapai persamaan



yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar (negara tetangga) memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara.

Geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan geografi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara yang bersangkutan, seperti pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negeri, hubungan perdagangan.

### B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep dari geopolitik ?
2. Apa saja unsur dari geopolitik ?
3. Bagaimanakah perkembangan wilayah Indonesia?
4. Bagaimanakah implementasi dari geopolitik ?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari pembuatan makalah ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Kewarganegaraan, agar pembaca dapat mengetahui dan memahami konsep dan unsur dasar geopolitik, perkembangan wilayah nusantara, serta implementasi dari geopolitik Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Geopolitik

Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu "geo" dan "politik". Maka, Membicarakan pengertian geopolitik, tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. "Geo" artinya Bumi/Planet Bumi. Menurut Preston H. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan Bumi. Dengan demikian geografi bersangkut-paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik, selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan.

Dalam studi Hubungan Internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal.

Dari beberapa pengertian di atas, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik



internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan.

Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar (negara tetangga) memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa terdapat dua golongan negara, yaitu golongan negara "determinis" dan golongan negara "posibilitis". Determinis berarti semua hal yang bersifat politis secara mutlak tergantung dari keadaan Bumi/posisi geografisnya. Negara determinis adalah negara yang berada di antara dua negara raksasa/adikuasa, sehingga, secara langsung maupun tidak langsung, terpengaruh oleh kebijakan politik luar negeri dua negara raksasa itu.

Sebenarnya, faktor keberadaan dua negara raksasa, bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi keadaan suatu negara yang berada diantaranya. Faktor lain seperti faktor ideologi, politik, sosial, budaya dan militer, juga merupakan faktor yang mempengaruhi. Hanya saja, karena besarnya kekuasaan dua negara besar tersebut, maka keberadaannya menjadi faktor yang begitu dominan dalam mempengaruhi keadaan negara yang bersangkutan.

Golongan negara yang kedua adalah golongan negara posibilitis. Golongan ini merupakan kebalikan dari golongan determinis. Negara ini tidak mendapatkan dampak yang terlalu besar dari keberadaan negara raksasa, karena letak geografisnya tidaklah berdekatan dengan negara raksasa. Sehingga, faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi keadaan negara ini adalah faktor-faktor seperti ideologi, politik, sosial, budaya dan militer, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tentunya, keberadaan negara-negara lain di sekitar kawasan tersebut juga turut menjadi faktor yang berpengaruh, hanya saja tidak terlalu dominan.

Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan geografi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara yang bersangkutan, seperti pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negeri, hubungan perdagangan dll. Maka dari itu, muncullah organisasi-organisasi internasional yang berdasarkan pada keberadaannya dalam suatu kawasan, seperti ASEAN, Masyarakat Ekonomi Eropa, The Shanghai Six dll. Komunitas-komunitas internasional ini berperan dalam hal kerjasama kawasan, penyelesaian masalah bersama, usaha penciptaan perdamaian dunia, dll.

Hal ini berkaitan langsung dengan peranan-peranan geopolitik. Adapun peranan-peranan tersebut adalah:



- a) Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia;
- b) Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam;
- c) Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri;
- d) Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan;
- e) Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme, dan teori-teori geopolitik lainnya;
- f) Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara.

#### a. Unsur Utama Geopolitik

Konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan

Konsepsi frontier (batas imajiner dari dua negara)

Konsepsi politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional

#### b. Teori Dalam Bidang Geopolitik

Ada banyak teori dalam bidang Geopolitik. Salah satu teori yang paling berpengaruh adalah teori Lebensraum, yang melahirkan teori Autarkis. Penggabungan dari kedua teori tersebut menghasilkan teori Pan-Regionalisme.

Teori ini berpandangan bahwa negara merupakan suatu organisme, yang memiliki kecerdasan intelektual serta memerlukan ruang hidup. Tak ada satupun negara yang

dapat hidup mandiri secara mutlak. Dikarenakan terdapat banyak keterbatasan serta tidak meratanya ketersediaan Sumber Daya Alam, setiap negara akan mengalami interdependensi, atau keadaan saling membutuhkan. Teori ini pun berpandangan bahwa satu bagian dunia yang relatif mempunyai persamaan dalam sifat-sifat geografis, ras, kebudayaan dsb, dapat disatukan dalam satu kesatuan wilayah.

Teori inilah yang digunakan oleh Bangsa Jerman pada Perang Dunia ke-I. Dengan beranggapan bahwa bangsa Aria adalah bangsa yang paling unggul, mereka berekspansi ke negara lain, agar dapat menjadi pemimpin pan Euro-Afrika. Begitupun bangsa Amerika, yang berusaha menyatukan Pan-Amerika.

#### B. Geopolitik Indonesia

Geopolitik Indonesia tiada lain adalah Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek ASTAGATRA.



#### a. A. Konsep Geostrategi

Suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi Negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana utk mencapai tujuan (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik). Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan UUD 1945. Ini diperlukan utk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan Pemb dan UUD 1945.

Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud Ketahanan Nasional. Geostrategi Indonesia tiada lain adalah ketahanan nasional Ketahanan Nasional mrpk kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ATHG baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Tannas diperlukan bukan hanya konsepsi politik saja melainkan sebagai kebutuhan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti Law and order, Welfare and prosperity, Defence and security, Juridical justice and social justice, freedom of the people.

#### b. Konsep dasar Ketahanan Nasional

Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung diatas bumi degan memanfaatkan segala kekayaan alam. Terdiri 8 aspek kehidupan nasional

##### 1. Tiga aspek (tri gatra) kehidupan alamiah, yaitu:

- Gatra letak dan kedudukan geografi
- Gatra keadaan dan kekayaan alam
- Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

##### 2. Lima aspek (panca gatra) kehidupan social, yaitu :

- Gatra ideology
- Gatra Politik
- Gatra ekonomi
- Gatra social budaya
- Gatra pertahanan dan keamanan.

Terdapat hubungan korelatif dan interdependency diantara ke-8 gatra secara komprehensif dan integral.

#### C. Hubungan Geopolitik dan Geostrategi

Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan



dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Selain itu hubungan geopolitik dan geostrategi terdapat dalam astra gatra

- a) Komponen strategi astra gatra TRI GATRA (tangible) bersifat kehidupan alamiah Letak geografi Negara
- b) Keadaan dan kekayaan alam (flora, fauna, dan mineral baik yang di atmosfer, muka maupun perut bumi) dikelola dengan dasar 3 asas: asas maksimal, lestari, dan daya saing.
- c) Keadaan dan kemampuan penduduk (jumlah, komposisi, dan distribusi) Pancagatra (*itanggible*) kehidupan sosial IDEOLOGI → Value system POLITIK → Penetapan alokasi nilai di sektor pemerintahan dan kehidupan politik masyarakat.

Sistem politik harus mampu memenuhi lima fungsi utama:

- a. Usaha mempertahankan pola, struktur, proses politik
- b. Pengaturan & penyelesaian pertentangan / konflik
- c. Penyesuaian dengan perubahan dalam masyarakat
- d. Pencapaian tujuan
- e. Usaha integrasi
  - a) EKONOMI (SDA, Tenaga kerja, Modal, Teknologi)

- b) SOSBUD (Tradisi, Pendidikan, Kepemimpinan nasional, Kepribadian nasional).

#### D. Masalah Teritorial

Indonesia, sebagai sebuah negara kepulauan yang amat luas, memiliki berbagai masalah teritorial yang berkaitan dengan kondisinya itu. Beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah teritorial ini antara lain, dasar geografis, demografi, serta kondisi sosial masyarakat. Masalah-masalah tersebut, umumnya menyangkut beberapa hal berikut:

- \*Pembinaan wilayah untuk menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif;
- \*Faktor kesejahteraan dan keamanan bangsa;
- \*Pembinaan teritorial yang dititikberatkan pada penyusunan potensi Hankam.

Bila masalah-masalah yang timbul dari beberapa faktor di atas dapat diatasi dengan baik oleh Bangsa Indonesia, maka akan tercapailah suatu keadaan yang dinamakan ketahanan nasional. Untuk mencapai keadaan tersebut, terdapat suatu prosedur yang dinamakan "geostrategi".

#### E. Wawasan Nusantara

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, diperlukan suatu konsep geopolitik khusus untuk menyiasati keadaan/kondisi Negara Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar sepanjang 3,5 juta mil. Konsep geopolitik itu adalah Wawasan Nusantara. Berbeda dengan pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepada tujuan ekspansi wilayah, konsep geopolitik Indonesia, atau



Wawasan Nusantara justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Sebagai negara kepulauan yang luas, Bangsa Indonesia beranggapan bahwa laut yang dimilikinya merupakan sarana "penghubung" pulau, bukan "pemisah". Sehingga, walaupun terpisah-pisah, bangsa Indonesia tetap menganggap negaranya sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari "tanah" dan "air", sehingga lazim disebut sebagai "tanah air".

Untuk mewujudkan integrasi tanah air serta mencapai tujuan Wawasan Nusantara maka dipakailah lima asas, yaitu:

1. Satu kesatuan wilayah;
  - a) Satu wadah Bangsa Indonesia yang bersatu;
  - b) Satu kesatuan tumpah darah dengan bersatunya dan dipersatukan segala anugerah dan hakekatnya.
2. Satu kesatuan negara;
  - a) Satu UUD dan politik pelaksanaannya;
  - b) Satu ideologi dan identitas nasional.
3. Satu kesatuan budaya;
  - a) Satu perwujudan budaya nasional atas dasar Bhinneka Tunggal Ika;
  - b) Satu tertib sosial dan tertib hukum.
4. Satu kesatuan ekonomi;
  - a) Satu tertib ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
  - b) Seluruh potensi yang ada atau yang dapat diadakan, diselenggarakan secara total untuk mewujudkan suatu kesatuan sistem pertahanan keamanan, yang meliputi subyek, obyek dan metode.

Perwujudan tanah air sebagai satu kesatuan, sudah sesuai dengan aspirasi dari falsafah Pancasila. Pelaksanaan Wawasan Nusantara akan terlihat hasilnya dengan terwujudnya suatu ketahanan nasional Indonesia.

Ketahanan nasional Indonesia bersifat defensif serta melihat dan mawas ke dalam disertai usaha untuk membina daya, kekuatan serta kemampuan sendiri, meliputi segenap aspek kehidupan alamiah dan sosial. Dengan wawasan Nusantara, suatu ketahanan nasional dapat tercapai sesuai dengan kepribadian serta bentuk kepulauan Indonesia yang satu kesatuan dalam persatuan ini.

## P. Geostrategi Indonesia Dalam Kepentingan Teritorial

Indonesia tentu patut mewaspadaikan perkembangan yang terjadi terutama di kawasan Asia Pasifik. Sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional, maka setiap pergolakan berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat, misalnya, 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia.

Karenanya sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini, termasuk di perairan nusantara, seperti, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Ombai Wetar, dan lain-lain. Pasukan Beladiri Jepang secara berkala dan teratur mengadakan latihan operasi jarak jauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai "life line," yakni, radius sejauh 1000 mil laut hingga menjangkau



perairan Asia Tenggara. Hal yang sama juga dilakukan Cina, Australia, India, termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di seIndonesiarnya (termasuk Indonesia.)

Keberadaan Indonesia dipersilangan jalur pelayaran strategis, memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara. Karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya, sangat kuatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan angkatan laut, yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan nusantara. Penetapan sepihak selat Sunda dan selat Lombok sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat, Australia, Canada, Jerman, Jepang, Inggris dan Selandia Baru. Tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia, maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk kepada hukum nasional Indonesia, tanpa mengabaikan kepentingan internasional

#### G. Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Konsepsi ketahanan nasional adalah keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan sosial melingkupi seluruh aspek kehidupan secara utuh menyeluruh berlandaskan falsafat bangsa, ideologi negara, konstitusi dan wawasan nasional dengan metode Astagatra.

Ketahanan Nasional mempunyai aspek utama, yaitu Kesejahteraan dan Keamanan. Kesejahteraan dan Keamanan adalah dua aspek dari Ketahanan Nasional yang dapat dibedakan tetapi tak dapat dipisahkan. Sebab itu, mengusahakan terwujudnya Ketahanan Nasional hakikatnya merupakan satu proses membentuk Kesejahteraan dan Keamanan buat negara dan bangsa. Ketahanan Nasional hanya dapat terwujud kalau meliputi seluruh segi kehidupan bangsa yang biasanya kita namakan aspek sosial kehidupan, meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hankam. Juga meliputi aspek alam, yaitu Geografi, Penduduk dan Kekayaan Alam. Di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional seluruh segi kehidupan bangsa itu dinamakan Asta Gatra, terdiri dari Panca Gatra (Sosial) dan Tri Gatra (Alam).

##### a) Bentuk-bentuk Ancaman Ketahanan Nasional

Ancaman di dalam negeri contohnya adalah pemberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat Indonesia.

Ancaman dari luar negeri contohnya adalah infiltrasi, subversi dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invansi dari darat, udara dan laut oleh musuh dari luar negeri.



#### b) Asas-asas Ketahanan Nasional

Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut meliputi:

##### a. Asas kesejahteraan dan keamanan

Didalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap atau tidaknya ketahanan nasional.

##### b. Asas menyeluruh terpadu

Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang.

##### c. Asas kekeluargaan

Bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kita harus bersama-sama mewujudkan ketahanan nasional karena dengan ketahanan nasional kita telah berhasil mengatasi semua ancaman di masa lampau sehingga Republik Indonesia selamat dari segala ancaman. Dan di masa depan ketahanan nasional harus selalu kita pelihara agar dapat mencegah timbulnya ancaman baru. Meskipun begitu tantangan-tantangan baru terus timbul dan harus kita atasi.

#### H. Implementasi Wawasan Nusantara

Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air

##### a) Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila

Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan -proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa.

##### b) Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional diperlukan suatu landasan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan nasional. Wawasan nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Upaya pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan pembangunan nasional yang juga harus berpedoman pada wawasan Nasional.

Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses



pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.

### **I. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara**

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah.

Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan bangsa.

#### **a) Aspek Politik**

Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang meliputi:

- 1) Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia

- 2) Keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah, serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia
- 3) Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air dalam mencapai cita-cita bangsa.
- 4) Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideology yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia menuju tercapainya suatu cita-cita nasional.

#### **b) Aspek Ekonomi**

Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yang meliputi;

- 1) Kekayaan di wilayah nusantara secara potensial dan efektif menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa secara merata.
- 2) Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi diseluruh daerah dalam wilayah Indonesia.
- 3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam system ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

#### **c) Aspek Ideologi**

Secara ideologis-konstitusional, bangsa Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang secara substantif (isinya), dapat memberi arah pandang



kemajemukan bangsa Indonesia pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.

d) Aspek Pertahanan Keamanan

Wawasan Nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi Ketahanan Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dan dapat dikatakan bahwa Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.

e) Aspek Sosial Budaya

Untuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, disamping implementasi seperti yang telah disebutkan diatas, perlu juga dilakukan pemasyarakatan materi Wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemasyarakatan Wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Menurut sifat atau cara penyampaian, yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Langsung yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka
  - b. Tidak langsung, yang terdiri dari media elektronik dan media cetak

2) Menurut metode penyampaian yang berupa:

- a. Keteladanan. Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya terutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir, bersikap dan bertindak mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air.
- b. Edukasi, yakni melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan formal ini dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, pendidikan karier di semua strata dan bidang profesi, penataran, kursus dan sebagainya. Sedangkan pendidikan non-formal dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan.
- c. Komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa sehingga terciptanya kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan nusantara.



## BAB IX GOOD GOVERNANCE

### A. Latar Belakang

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Bahkan kondisi saat inipun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan



antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis).

Kedua perkembangan diatas, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat harus mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat perluasan aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat (beneficiaries), harus mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus berfungsi sebagai pelaku.

Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Disadari, mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa pengertian dan latar belakang good governance?
- 2) Bagaimana prinsip dan agenda good governance?
- 3) Apa saja karakteristik dasar good governance?
- 4) Apa saja prinsip-prinsip good governance pada sektor swasta?
- 5) Bagaimana cara mengembangkan struktur organisasi dan manajemen perubahan?
- 6) Bagaimana hubungan antara good governance dengan otonomi daerah?
- 7) Bagaimana implementasi penerapan e-government di Indonesia?

## C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan makalah ini adalah:

- 1) Ingin mengetahui pengertian dan latar belakang good governance
- 2) Ingin mengetahui prinsip dan agenda good governance
- 3) Ingin mengetahui karakteristik dasar good governance
- 4) Ingin mengetahui prinsip-prinsip good governance pada sektor swasta
- 5) Ingin mengetahui cara mengembangkan struktur organisasi dan manajemen perubahan
- 6) Ingin mengetahui hubungan antara good governance dengan otonomi daerah
- 7) Ingin mengetahui implementasi penerapan e-government di Indonesia



#### D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan makalah ini adalah antara lain :

- 1) Dapat mengetahui pengertian dan latar belakang good governance
- 2) Dapat mengetahui prinsip dan agenda good governance
- 3) Dapat mengetahui karakteristik dasar good governance
- 4) Dapat mengetahui prinsip-prinsip good governance pada sektor swasta
- 5) Dapat mengetahui cara mengembangkan struktur organisasi dan manajemen perubahan
- 6) Dapat mengetahui hubungan antara good governance dengan otonomi daerah
- 7) Dapat mengetahui implementasi penerapan e-government di Indonesia

#### PEMBAHASAN

##### A. Pengertian dan Latar Belakang Good Governance

###### 1. Pengertian Good Governance

Dari segi administrasi pembangunan, good governance didefinisikan sebagai berikut:

An overall institutional framework within which its citizens are allowed to interact and transact freely, at different levels, to fulfil its political, economic and social aspirations. Basically, good governance has three aspect:

- i. The ability of citizens to express views and access decision making freely;
- ii. The capacity of the government agencies (both political and bureaucratic) to translate these views into realistic plans and to implement them cost effectively; and

- iii. The ability of citizens and institutions to compare what has been asked for with what has been planned, and to compare what has been planned with what has been implemented".

Sedangkan dari segi teori pembangunan, good governance diartikan sebagai berikut:

"..... a political and bureaucratic framework which provides an enabling macro-economic environment for investment and growth, which pursues distributional and equity related policies; which makes entrepreneurial interventions when and where required and which practices honest and efficient management principles. A committed and imaginative political leadership accompanied by an efficient and accountable bureaucracy does seem to be the key to the establishment of good governance in a country."

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *good governance* mensyaratkan adanya hubungan yang harmonis antara negara (*state*), masyarakat (*civil society*) dan pasar (*market*). World Bank memberikan definisi *governance* sebagai "the way state power is used in managing economic and social resources for development of society".

Jika mengacu pada World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik (*public sector*) adalah menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* adalah pemerintahan yang baik, menurut UNDP (*United Nation Development Program*) dapat diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta



penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

*Governance*, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.

Meskipun mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, *governance* bukanlah sesuatu yang terjadi secara chaotic, random atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep *governance* wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu,

karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi *governance* adalah "mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan", sehingga *good governance*, dengan demikian, "adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien) dan (relatif) merata."

Menurut dokumen *United Nations Development Program* (UNDP), tata pemerintahan adalah "penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Jelas bahwa *good governance* adalah masalah keseimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu *governance* lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem



demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. Good governance sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) good governance tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan (2) tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.

## 2. Latar Belakang Good Governance

Jika ditarik lebih jauh, lahirnya wacana good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistik, non-partisipatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik, telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati kepada rezim pemerintahan yang ada. Masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Beragam kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal. Good governance tampil sebagai upaya untuk memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya.

Good governance adalah "mantra" yang diucapkan oleh banyak orang di Indonesia sejak 1993. Kata governance mewakili suatu etika baru yang terdengar rasional, profesional, dan demokratis, tidak soal apakah diucapkan di kantor Bank Dunia di Washington, AS atau di kantor LSM yang kumuh di pinggiran Jakarta. Dengan kata itu pula wakil dari berbagai golongan profesi seolah disatukan oleh "koor seruan" kepada pemerintah yang korup di negara berkembang. "Good governance, bad men!" terkeping oleh seruan dari berbagai pihak, kalangan pejabat pemerintah pun

lantas juga fasih menyebut konsep ini, meski dengan arti dan maksud yang berbeda.

Proses pemahaman umum mengenai governance atau tata pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah ini seringkali disangkutpautkan dengan kebijaksanaan pemberian bantuan dari negara donor, dengan menjadikan masalah isu tata pemerintahan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah.

Kata *governance* sering dirancukan dengan *government*. Akibatnya, negara dan pemerintah menjadi korban utama dari seruan kolektif ini, bahwa mereka adalah sasaran nomor satu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Badan-badan keuangan internasional mengambil prioritas untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan di Dunia Ketiga dalam skema good governance mereka. Aktivitis dan kaum oposan, dengan bersemangat, ikut juga dalam aktivitas ini dengan menambahkan prinsip-prinsip kebebasan politik sebagai bagian yang tak terelakkan dari usaha perbaikan institusi negara. Good governance bahkan berhasil mendekatkan hubungan antara badan-badan keuangan multilateral dengan para aktivis politik, yang sebelumnya bersikap sinis pada hubungan antara pemerintah negara berkembang dengan badan-badan ini. Maka, jadilah suatu sintesa antara tujuan ekonomi dengan politik.

Tetapi, sebagaimana layaknya suatu mantra, para pengucap tidak dapat menerangkan sebab akibat dari suatu



kejadian, Mereka hanya mengetahui sebgian, yaitu bahwa sesuatu yang invisible hand menyukai mantra yang mereka ucapkan. Pada kasus good governance, para pengucap hanya mengetahui sedikit hal yaitu bahwa sesuatu yang tidak terbuka dan tidak terkontrol akan mengundang penyalahgunaan, bahwa program ekonomi tidak akan berhasil tanpa legitimasi, ketertiban sosial, dan efisiensi institusional.

Satu faktor yang sering dilupakan adalah, bahwa kekuatan konsep ini justru terletak pada keaktifan sektor negara, masyarakat dan pasar untuk berinteraksi. Karena itu, good governance, sebagai suatu proyek sosial, harus melihat kondisi sektor-sektor di luar negara.

### Rukun dan Pilar Good Governance

Rukun-rukunnya adalah:

#### 1) Pertanggungjawaban (*responsibility*).

Tanggung jawab perusahaan tidak hanya diberikan kepada pemegang saham juga kepada *stake holder*.

#### 2) Transparansi (*transparency*)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

#### 3) Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar

#### 4) Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

#### 5) Independensi (Independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

### Pilar-pilarnya:

*Good Governance* hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Negara

- Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
- Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
- Menyediakan public service yang efektif dan accountable
- Menegakkan HAM
- Melindungi lingkungan hidup
- Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik



## 2. Sektor Swasta

- a. Menjalankan industri
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Menyediakan insentif bagi karyawan
- d. Meningkatkan standar hidup masyarakat
- e. Memelihara lingkungan hidup
- f. Menaati peraturan
- g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
- h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

## 3. Masyarakat Madani

- a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
- b. Mempengaruhi kebijakan publik
- c. Sebagai sarana checks and balances pemerintah
- d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
- a. Mengembangkan SDM
- b. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

## B. Prinsip dan Konsepsi Good Governance

### 1. Prinsip *Good Governance*

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance* diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

#### 1.1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Jewell & Siegal (1998: 67) partisipasi adalah keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi. Di lain pihak Handoko (1998: 31) menyatakan partisipasi merupakan tindakan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi.

Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.



Instrumen dasar partisipasi adalah peraturan yang menjamin hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah pedoman-pedoman pemerintahan partisipatif yang mengakomodasi hak penyampaian pendapat dalam segala proses perumusan kebijakan dan peraturan, proses penyusunan strategi pembangunan, tata-ruang, program pembangunan, penganggaran, pengadaan dan pemantauan.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 67) good governance digunakan untuk melihat partisipasi melalui: Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

### 1.2. Tegaknya Supremasi Hukum

Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan konsisten tanpa memandang subjek dari hukum itu (Satrio, 1996: 92). Prinsip penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di samping itu pemerintah daerah perlu mengupayakan peraturan daerah

yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. Pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang dapat menimbulkan KKN.

Instrumen dasar penegakan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik terhadap penegakan hukum maupun keterpaduan dari sistem yuridis (kepolisian, pengadilan dan kejaksaan), sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah penyuluhan dan fasilitas ombudsman.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 68) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur penegakan hukum, yaitu Berkurangnya praktek KKN dan pelanggaran hukum, meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses penegakan hukum, berlakunya nilai/norma di masyarakat (living law) dan adanya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum sebagai pembela kebenaran. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

### 1.3. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Notodisoerjo, 2002: 129). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu



proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal.

Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 68) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi, yaitu: Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

#### 1.4. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

#### 1.5. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

#### 1.6. Kesetaraan

Kesetaraan adalah perlakuan yang sama kepada semua unsur tanpa memandang atribut yang menempel pada subyek tersebut (Prasetya, 2001: 78). Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.



Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 69) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesetaraan, yaitu: Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

#### 1.7. Efektifitas dan Efisiensi Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga

Efisiensi berkaitan dengan penghematan keuangan, sedangkan efektivitas berkaitan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah (Handoko, 1998: 23). Prinsip ini menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayanannya. Untuk menciptakan efisiensi harus digunakan teknik manajemen modern untuk administrasi

kecamatan dan perlu ada desentralisasi kewenangan layanan masyarakat sampai tingkat kelurahan/desa.

Instrumen dasar dari efisiensi dan efektivitas adalah komitmen politik sedangkan instrumen pendukungnya adalah struktur pemerintahan yang sesuai kepentingan pelayanan masyarakat, adanya standar-standar dan indikator kinerja untuk menilai efektivitas pelayanan, pembukuan keuangan yang memungkinkan diketahuinya satuan biaya, dan adanya survei-survei kepuasan konsumen.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 71) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas, yaitu:

##### Efisiensi:

Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional pelayanan dan mendapatkan ISO pelayanan. Dilakukannya swastanisasi dari pelayanan masyarakat.

##### Efektivitas:

Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain) melalui media massa dan berkurangnya penyimpangan

#### 1.8. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh (Mardiasmo, 2001: 251). Prinsip ini mengandung makna meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam



segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami kebijakan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.

Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 70) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas, yaitu: Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan berkurangnya kasus-kasus KKN.

#### 1.9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, meliputi:

- a. Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. Tranparancy, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stake holders.
- e. Concensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat luas
- f. Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. Efficiency dan effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. Strategic vision, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat memiliki visi jauh ke depan.



## 2. Fungsi penting good governance dsalam kehidupan bernegara

- a. Efektivitas yang bersumber dari Budaya Perusahaan, Etika, Nilai, Sistem, Proses bisnis, Kebijakan dan Struktur Organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendukung dan mendorong pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien, pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya.
- b. Seperangkat prinsip, kebijakan dan sistem manajemen perusahaan yang diterapkan bagi terwujudnya operasional perusahaan yang efisien, efektif dan profitable dalam menjalankan organisasi dan bisnis perusahaan untuk mencapai sasaran strategis yang memenuhi prinsip-prinsip praktek bisnis yang baik dan penerapannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, peduli terhadap lingkungan serta dilandasi oleh nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.
- c. Seperangkat peraturan dan ataupun sistem yang mengarahkan kepada pengendalian perusahaan bagi penciptaan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan (Pemerintah, Pemegang saham, Pimpinan perusahaan dan Karyawan) dan bagi perusahaan itu sendiri.

## Indikator Keberhasilan Good Governance (Secara Makro dan Secara Sektoral)

Dalam praktek good governance perlu dikembangkan indikator keberhasilan pelaksanaan good governance itu. keberhasilan secara umum dapat dilihat dari indikator ekonomi makro atau tercapainya tujuan-tujuan pembangunan atau indikator quality of life yang dituju. untuk negara negara terkena krisis, misalnya dipakai indikator praktek good governance bisa dilihat seberapa jauh tercapainya tujuan reformasi pembangunan seperti tercantum dalam TAP MPR No.8/1998 Bab III

- a. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya terutama menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional
- b. mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional
- c. menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental.
- d. meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan, agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.

## 3. Agenda Good Governance

*Good Governance* sebagai suatu gerakan adalah segala daya upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Oleh karena itu gerakan good governance harus



memiliki agenda yang jelas tentang apa yang mesti dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai. Untuk kasus Indonesia, agenda good governance harus disesuaikan dengan kondisi riil bangsa saat ini, yang meliputi:

### 1. Agenda Politik

Masalah politik seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya good governance. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya adalah acuan konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Krisis politik yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini tidak lepas dari penataan sistim politik yang kurang demokratis. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan politik yang menyangkut masalah-masalah penting seperti:

- a. Amandemen UUD 1945 Sebagai sumber hukum dan acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan, amandemen UUD 1945 harus dilakukan untuk mendukung terwujudnya good governance seperti pemilihan presiden langsung, memperjelas susunan dan kedudukan MPR dan DPR, kemandirian lembaga peradilan, kemandirian kejaksan agung dan penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia.
- b. Perubahan Undang-Undang Politik dan Undang-Undang Keormasan yang lebih menjamin partisipasi dan mencerminkan keterwakilan rakyat.
- c. Reformasi agraria dan perburuhan
- d. Mempercepat penghapusan peran sosial politik TNI
- e. Penegakan supremasi hukum

### 2. Agenda Ekonomi

Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Untuk kasus Indonesia, permasalahan krisis ekonomi ini telah berlarut-larut dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Kondisi demikian ini tidak boleh dibiarkan berlanjut dan harus segera ada percepatan pemulihan ekonomi. Mengingat begitu banyak permasalahan ekonomi di Indonesia, perlu dilakukan prioritas-prioritas kebijakan. Prioritas yang paling mendesak untuk pemulihan ekonomi saat ini antara lain:

#### a. Agenda Ekonomi Teknis

Otonomi Daerah. Pemerintah dan rakyat Indonesia telah membuat keputusan politik untuk menjalankan otonomi daerah yang esensinya untuk memberikan keadilan, kepastian dan kewenangan yang optimal dalam pengelolaan sumber daya daerah guna memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. Agar pelaksanaan otonomi daerah ini berjalan tanpa gejolak dibutuhkan serangkaian persiapan dalam bentuk strategi, kebijakan program dan persiapan institusi di tingkat pusat dan daerah.

Sektor Keuangan dan Perbankan. Permasalahan terbesar sektor keuangan saat ini adalah melakukan segala upaya untuk mengembalikan fungsi sektor perbankan sebagai intermediasi, serta upaya mempercepat kerja BPPN. Hal penting yang harus dilakukan antara lain pertama; tidak adanya dikhotomi antara bankir nasional dan bankir asing, lebih diperlukan kinerja yang tinggi, tidak peduli apakah hal itu dihasilkan oleh bankir nasional ataupun asing. Kedua, perlu lebih mendorong dilakukannya merger atau akuisisi,



baik di bank BUMN maupun swasta. Ketiga, pencabutan blanket guarantee perlu dipercepat, namun dilakukan secara bertahap. Keempat, mendorong pasar modal dan mendorong independensi pengawasan (Bapepam). Kelima, perlunya penegasan komitmen pemerintah dalam hal kinerja BPPN khususnya dalam pelepasan aset dalam waktu cepat atau sebaliknya.

Kemiskinan dan Ekonomi Rakyat. Pemulihan ekonomi harus betul-betul dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Hal ini praktis menjadi prasarat mutlak untuk membantu penguatan legitimasi pemerintah, yang pada gilirannya merupakan bekal berharga bagi percepatan proses pembaharuan yang komprehensif menuju Indonesia baru.

#### b. Agenda Pengembalian Kepercayaan

Hal-hal yang diperlukan untuk mengembalikan atau menaikkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia adalah kepastian hukum, jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat, penegakkan hukum bagi kasus-kasus korupsi, konsistensi dan kejelasan kebijakan pemerintah, integritas dan profesionalisme birokrat, disiplin pemerintah dalam menjalankan program, stabilitas sosial dan politik, dan adanya kepemimpinan nasional yang kuat.

### 3. Agenda Sosial

Masyarakat yang berdaya, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan perwujudan riil good governance. Masyarakat semacam ini akan solid dan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Selain itu masyarakat semacam ini juga akan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebaliknya, pada masyarakat yang masih belum berdaya di hadapan negara, dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good governance bisa ditegakkan. Salah satu agenda untuk mewujudkan good governance pada masyarakat semacam ini adalah memperbaiki masalah sosial yang sedang dihadapi.

Masalah sosial yang cukup krusial dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir ini adalah konflik yang disertai kekejaman sosial luar biasa yang menghancurkan kemanusiaan dan telah sampai pada titik yang membahayakan kelanjutan kehidupan dalam bentuk kekerasan komunal dan keterbuangan sosial dengan segala variannya. Kasus-kasus seperti pergolakan di Aceh dan Ambon adalah beberapa contoh dari masalah sosial yang harus segera mendapatkan solusi yang memadai.

Oleh karena itu masyarakat bersama pemerintah harus melakukan tindakan pencegahan terhadap daerah lain yang menyimpan potensi konflik. Bentuk pencegahan terhadap kekerasan komunal dapat dilakukan melalui; memberikan santunan terhadap mereka yang terkena korban konflik, mencegah berbagai pertikaian \_vertikal maupun horizontal\_ yang tidak sehat dan potensial mengorbankan kepentingan bangsa dan mencegah pula segala bentuk anarkhi sosial yang terjadi di masyarakat.

### 4. Agenda Hukum

Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, good governance



tidak akan berjalan mulus di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance.

Sementara itu posisi dan peran hukum di Indonesia tengah berada pada titik nadir, karena hukum saat ini lebih dianggap sebagai komiditi daripada lembaga penegak keadilan. Kenyataan demikian ini yang membuat ketidakpercayaan dan ketidaktaatan pada hukum oleh masyarakat.

Untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dalam rangka mewujudkan *good governance* diperlukan langkah-langkah kongkret dan sistematis. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Reformasi Konstitusi Konstitusi merupakan sumber hukum bagi seluruh tata penyelenggaraan negara. Untuk menata kembali sistem hukum yang benar perlu diawali dari penataan konstitusi yang oleh banyak kalangan masih banyak mengandung celah kelemahan.
- b. Penegakan Hukum Syarat mutlak pemulihan kepercayaan rakyat terhadap hukum adalah penegakan hukum. Reformasi di bidang penegakkan hukum yang bersifat strategis dan mendesak untuk dilakukan adalah; pertama, reformasi Mahkamah Agung dengan memperbaiki sistem rekrutmen (pengangkatan), pemberhentian, pengawasan dan penindakan yang lebih menekankan aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Perbaikan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan oleh Komisi Yudisial Independen yang anggotanya terdiri

dari mantan hakim agung, kalangan praktisi hukum, akademisi/cendekiawan hukum dan tokoh masyarakat. Kedua, reformasi Kejaksaan. Untuk memulihkan kinerja kejaksaan saat ini khususnya dalam menangani kasus-kasus KKN dan pelanggaran HAM, perlu dilakukan fit and proper test terhadap Jaksa Agung dan pembantunya sampai eselon II untuk menjamin integritas pribadi yang bersangkutan. Selain itu untuk mengawasi kinerja kejaksaan perlu dibentuk sebuah komisi Independen Pengawas Kejaksaan.

- c. Pemberantasan KKN KKN merupakan penyebab utama dari tidak berfungsinya hukum di Indonesia. Untuk memberantas KKN diperlukan setidaknya dua cara; pertama dengan cara mencegah (*preventif*) dan kedua, upaya penanggulangan (*represif*). Upaya pencegahan dilakukan dengan cara memberi jaminan hukum bagi perwujudan pemerintahan terbuka (*open government*) dengan memberikan jaminan kepada hak publik seperti hak mengamati perilaku pejabat, hak memperoleh akses informasi, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak mengajukan keberatan bila ketiga hak di atas tidak dipenuhi secara memadai. Sedangkan upaya penanggulangan (setelah korupsi muncul) dapat diatasi dengan mempercepat pembentukan Badan Independen Anti Korupsi yang berfungsi melakukan penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi, memperkenalkan hakim-hakim khusus yang diangkat khusus untuk kasus korupsi (hakim ad



hock) dan memperlakukan asas pembuktian terbalik secara penuh.

- d. Sumbangan Hukum dalam Mencegah dan Menanggulangi Disintegrasi Bangsa Pengakuan identitas terhadap nilai-nilai lokal, pemberian kewenangan dan representasi yang lebih luas kepada daerah, pemberdayaan kemampuan masyarakat dan akses pengelolaan terhadap sumber daya alam lokal menjadi isu penting yang sangat strategis di dalam menciptakan integritas sosial, karena selama lebih dari tiga dekade masyarakat selalu ditempatkan sebagai obyek, tidak diakui berbagai eksistensinya dan diperlakukan tidak adil. Akumulasi dari permasalahan tersebut akhirnya menciptakan potensi yang sangat signifikan bagi proses disintegrasi.
- e. Pengakuan Terhadap Hukum Adat dan Hak Ekonomi Masyarakat Untuk menjamin hak-hak masyarakat hukum adat, maka diperlukan proses percepatan di dalam menentukan wilayah hak ulayat adat secara partisipatif. Dengan begitu rakyat akan mendapatkan jaminan di dalam menguasai tanah ulayat adat mereka dan juga akses untuk mengelola sumber daya alam di lingkungan dan milik mereka sendiri.
- f. Pemberdayaan Eksekutif, Legislatif dan Peradilan Untuk lebih meningkatkan representasi kepentingan daerah di tingkat nasional, perlu dilakukan rekomposisi keanggotaan utusan daerah, di mana keterwakilan rakyat di daerah secara kongkret

diakomodasi melalui pemilihan anggota utusan daerah secara langsung oleh rakyat. Sistem pemilihan langsung juga dilakukan untuk para pejabat publik di daerah khususnya gubernur, bupati/walikota. Penerapan penegak hukum harus dilakukan secara kontekstual dengan menggunakan kebijakan 'selektive enforcement' sehingga keadilan memang berasal dari rasa keadilan yang hidup di masyarakat

### C. Karakteristik Dasar Good Governance

Ada tiga karakteristik dasar good governance :

1. Diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Dengan kata lain pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (given) dalam kehidupan. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah peradaban yang kosmopolit akan tercipta apabila manusia memiliki sikap inklusif dan kemampuan (ability) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, dengan catatan, identitas sejati atas parameter-parameter otentik agama tetap terjaga.
2. Tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana, toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian



orang lain. Senada dengan hal itu, Quraish Shihab (2000) menyatakan bahwa tujuan agama tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama, namun juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup, berdampingan, dan saling menghormati.

3. Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan, demokrasi juga merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan perikehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan yang tinggi kepada Tuhan, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak, dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan, serta menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik, dan lembaga masyarakat.

#### D. Penerapan Prinsip Good Governance pada Sektor Publik

Di dalam berbagai analisis dikemukakan, ada keterkaitan antara krisis ekonomi, krisis finansial dan krisis yang berkepanjangan di berbagai negara dengan lemahnya *corporate governance*. *Corporate governance* adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004).

Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Di tahun 2007 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan PT Multi Utama Indojasa melaksanakan kegiatan studi Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Sektor swasta, BUMN dan BUMD. Studi ini ditujukan untuk memperoleh gambaran awal (baseline) yang komprehensif tentang pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Sektor swasta, BUMN dan BUMD di Indonesia yang dari waktu ke waktu bisa digunakan sebagai data pembandingan dengan kondisi di masa depan.

Studi dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu (1) penyebaran kuesioner kepada responden, (2) wawancara mendalam dengan pimpinan perusahaan yang menangani implementasi GCG, dan (3) penelusuran dokumen perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam studi ini adalah 66 perusahaan, yang terdiri dari 37 perusahaan swasta yang sudah go public, 17 perusahaan BUMN (12 diantaranya sudah go public), dan 12 perusahaan BUMD. Dari setiap perusahaan, diambil sekitar 27 responden, mulai dari Preskom hingga karyawan non-manajerial, serta pihak-pihak eksternal dari perusahaan seperti pelanggan, pemasok, perusahaan asuransi, auditor eksternal, investor institusi, lembaga pembiayaan dan perusahaan afiliasi.

Data dari kuesioner diolah dan dianalisis secara kuantitatif, sedangkan hasil wawancara mendalam dan penelusuran dokumen diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis implementasi GCG dilakukan dengan mengukur implementasi berdasarkan prinsip-prinsip GCG yaitu



transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness, serta berdasarkan kerangka kerja GCG yaitu compliance, conformance, dan performance. Selain itu, secara khusus dilihat aspek code of conduct, pencegahan korupsi dan disclosure. Dari hasil studi diketahui bahwa secara umum implementasi GCG pada perusahaan-perusahaan yang menjadi responden sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari Indeks GCG yang didapat, baik berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang mencapai angka 88,89 maupun berdasarkan kerangka kerja implementasi GCG (compliance, conformance dan performance) yang mencapai 90,41. Demikian juga untuk aspek code of conduct, pencegahan korupsi, dan disclosure.

Hal ini berarti secara rata-rata, hampir 90% dari prinsip-prinsip GCG sudah dilaksanakan oleh perusahaan responden. Dari prinsip-prinsip GCG, ada satu prinsip yang relatif lemah yaitu responsibilitas. Lemahnya implementasi prinsip ini berkenaan dengan masih lemahnya implementasi dalam pembentukan komite-komite fungsional di bawah Komisaris. Sebagian perusahaan responden hanya memiliki Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Manajemen Risiko, sedangkan komite-komite lainnya seperti Komite Asuransi, Komite Kepatuhan, Komite Eksekutif, dan Komite GCG, masih banyak yang belum memilikinya. Adapun prinsip yang sudah relatif kuat adalah prinsip transparansi dan fairness.

Ini menunjukkan perusahaan telah berupaya untuk lebih transparan dan fair kepada stakeholder. Jika dilihat berdasarkan kerangka kerja GCG, aspek yang masih lemah adalah aspek compliance pada sisi Board dan conformance pada sisi Karyawan. Pada sisi Board, kelemahannya selain

pada pembentukan komite-komite, juga pada implementasi pencegahan benturan kepentingan, dan peningkatan kerjasama dengan penegak hukum. Sedangkan pada sisi karyawan, berkaitan dengan penandatanganan pernyataan kepatuhan kepada Pedoman Perilaku dan Peraturan Perusahaan. Indeks code of conduct adalah 88,77. Artinya secara umum perusahaan telah memiliki *code of conduct* dan telah memuat beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip GCG. Namun yang masih perlu diperbaiki dalam code of conduct ini adalah sosialisasi kepada pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok dan perusahaan asuransi.

Indeks pencegahan korupsi adalah 89,39, yang berarti sudah cukup baik. Namun beberapa hal yang perlu didorong adalah pengawasan terhadap pelaksanaan dari tindakan yang berpotensi terhadap terjadinya benturan kepentingan. Selain itu, masih belum adanya kerjasama antara perusahaan dengan lembaga penegak hukum dalam mengembangkan sistem pencegahan korupsi. Indeks untuk disclosure ini adalah 92,42. Aspek ini termasuk yang menonjol dan menjadi perhatian utama dari responden, terutama bagi perusahaan yang sudah go public. Aspek ini menjadi sangat diprioritaskan oleh perusahaan karena kinerja pada aspek ini dapat dinilai dan dirasakan oleh pihak luar. Untuk analisis, perusahaan responden dibagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu BUMN/BUMD Lembaga Keuangan, BUMN/BUMD Non Lembaga Keuangan, Swasta Lembaga Keuangan, dan Swasta Non Lembaga Keuangan.

Pembagian ini untuk memudahkan analisis serta agar perbandingan antar perusahaan dapat dilakukan lebih fair. Hasil studi menunjukkan bahwa swasta lembaga keuangan



memiliki indeks yang paling tinggi dibanding kelompok yang lain, baik berdasarkan prinsip-prinsip GCG maupun berdasarkan compliance, conformance, dan performance. Selain itu, kelompok ini juga memiliki indeks yang paling tinggi untuk code of conduct dan pencegahan korupsi.

Namun untuk disclosure, indeks tertinggi diraih kelompok swasta non lembaga keuangan. Secara umum implementasi di perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, baik perusahaan swasta BUMN/BUMD lebih baik dibanding perusahaan non lembaga keuangan. Selain itu, implementasi di perusahaan swasta lebih baik dibanding BUMN/BUMD. Demikian pula, perusahaan yang sudah terbuka (go public) lebih baik dibanding perusahaan yang belum go public. Berdasarkan kerangka kerja GCG, aspek compliance cukup lemah pada kelompok perusahaan non lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya perusahaan yang belum melengkapi komite-komite fungsionalnya. Selain itu, masih kurangnya tindakan komisararis terhadap (potensi) benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. Sebaliknya, aspek-aspek tersebut sangat diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, sehingga lembaga keuangan lebih patuh dibanding perusahaan non lembaga keuangan. Sebagai rekomendasi, untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG, perusahaan-perusahaan perlu didorong untuk lebih patuh dalam membentuk berbagai komite fungsional yang diperlukan dalam penerapan GCG. Lembaga-lembaga yang berfungsi mengawasi dan membina seperti Bank Indonesia, Meneg BUMN dan Bapepam LK agar lebih proaktif dalam mengawasi implementasi GCG terutama berkaitan dengan potensi terjadinya benturan kepentingan.

Selain itu, perlu diterbitkan peraturan yang dapat memaksa perusahaan swasta yang belum terbuka dan BUMD untuk menerapkan GCG. Implementasi Good Government dan Clean Government pada institusi pemerintah terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti Ditjen Pajak, Bea Cukai, Imigrasi, BPN, Institusi yang mengeluarkan perizinan, dan institusi penegak hukum. Hal ini untuk mendorong badan usaha lebih konsisten dalam menerapkan GCG serta untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, kondusif dan kompetitif. Dalam rangka meningkatkan kerjasama perusahaan dengan lembaga penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi, diperlukan rumusan bentuk dan metode kerjasama yang dapat dilakukan dan mendorong perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum.

Perlu adanya sosialisasi yang intensif tentang pedoman umum GCG, penyusunan code of conduct, kaitan GCG dengan pencegahan korupsi, dan best practises dalam penerapan GCG melalui berbagai media.

#### **E.Struktur Organisasi dan Manajemen Perubahan dalam Good Governance**

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, (2004) good governance (G) di Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh karena itu, good governance akan tercipta di antara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan (ormas, LSM, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain-lain) memiliki keseimbangan



dalam proses checks and balances dan tidak boleh satu pun di antara mereka yang memiliki kontrol absolute.

Pengembangan public good governance di Indonesia akan menunjuk pada sekumpulan nilai (cluster of values), yang notabane sudah lama hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Sekumpulan nilai yang dimaksud tersebut adalah 11 (sebelas) nilai good governance yakni: (1) check and balances, (2) decentralization; (3) effectiveness; (4) efficiency, (5) equity, (6) human rights protection, (7) integrity, (8) participation, (9) pluralism, (10) predictability, (11) rule of law, dan (12) transparency.

Pertanyaan yang muncul kemudian dalam implementasinya adalah bagaimana mendekati, mengidentifikasi, mengurai, dan mengupayakan pemecahan persoalan penegakan *good governance*. Menurut Lukman Hakim, ada tiga faktor determinan pencapaian *good governance*, yakni lembaga atau pranata (institutions/system), sumber daya manusia (human factor), dan budaya (cultures).

Terkait dengan tiga faktor determinan tersebut, pada subbab ini akan dibahas tentang lembaga atau pranata, budaya dan sumber daya manusia dalam dua bagian, yaitu struktur organisasi dalam *good governance* dan manajemen perubahan yang diperlukan oleh organisasi

### 1. Struktur Organisasi dalam *Good Governance*

Globalisasi dan perkembangan informasi akan mempercepat perubahan organisasi. Menurut Tulis (2000), perubahan terhadap sumber daya manusia sebesar 10 persen saja dapat mengubah struktur organisasi, selain perubahan yang disebabkan faktor teknologi, ekonomi, politik, dan sosial. Praktik manajemen yang lama baik menyangkut

struktur organisasi, personel, dan tugas pokok, akan menyebabkan resistensi terhadap perubahan dan menyebabkan sulitnya melakukan restrukturisasi organisasi dalam rangka mencapai efisiensi. Dalam rangka menghadapi perubahan yang begitu cepat, maka beberapa hal yang penting dilakukan adalah:

#### a. Memelihara kesadaran yang tinggi akan urgensi

Perubahan besar dalam organisasi, baik struktur dan budaya tidak akan pernah sukses bila organisasi tersebut cepat puas. Kesadaran tinggi akan tingkat urgensi, yaitu memahami hak yang mendesak dan menempatkannya sebagai prioritas dalam menghadapinya, sangat membantu proses mengatasi masalah dan langkah perubahan yang besar. Peningkatan fungsi organisasi akan menyebabkan tingginya tingkat organisasi. Untuk memelihara urgensi tingkat tinggi maka diperlukan sistem informasi manajemen yang menyangkut sistem informasi akuntansi, untuk keuangan, sistem informasi sumber daya manusia (SDM) untuk mengukur kinerja SDM, dan sistem informasi lain yang diperlukan oleh organisasi. Sistem informasi ini akan menjamin kecermatan dan kejelian data, sehingga data yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang valid.

#### b. Penyusunan pranata organisasi

Misi dan tujuan setiap organisasi sektor publik adalah memuaskan para pihak yang berkepentingan dengan pelayanan publik serta melestarikan tingkat kepuasan masyarakat. Tindakan untuk mencapai kepuasan adalah melalui mutu pelayanan yang prima atas pelayanan dan kepercayaan publik. Permasalahan dalam peningkatan mutu ini pada birokrasi terkendala dengan sumber informasi yang



terbatas, tingkat pengetahuan aparat yang tidak memadai, budaya birokrasi, dan pengambilan keputusan yang tidak efektif karena delegasi wewenang yang tidak optimal serta tidak adanya insentif dan berkorelasi dengan sistem penggajian.

Permasalahan dalam penyusunan pranata organisasi adalah masalah keagenan, yaitu kebijaksanaan yang salah dan berjalan terus-menerus, program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta pekerjaan yang tidak berkonstruksi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Singkatnya, tantangan utama dalam mendesain dan pengembangan pranata organisasi pemerintah dan sistem nasional adalah mengoptimalkan informasi pengambilan keputusan serta menciptakan sistem penggajian yang sepadan dengan kinerja. Perbaikan sistem informasi dan sistem penggajian berbasis kinerja ini akan meningkatkan mutu layanan dan kepercayaan publik.

#### c. Perubahan Struktur Organisasi

Perubahan kondisi pasar, teknologi, sistem sosial, regulasi, dan pelaksanaan Good Governance dapat memengaruhi struktur pengembangan organisasi. Untuk perubahan struktur organisasi perlu dilakukan analisis biaya dan manfaat terhadap pengaruh pelayanan publik terhadap organisasi melalui perubahan yang bersifat strategis.

Perubahan struktur organisasi mencakup tiga unsur sebagai determinan, yaitu: (a) sistem pendapatan wewenang, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab, (b) sistem balas jasa yang sepadan, dan (c) sistem evaluasi indikator atau pengukuran kinerja untuk individu dan unit organisasi.

Masalah utama dalam perubahan struktur organisasi adalah meyakinkan diri bahwa pengambilan keputusan dan akuntabilitas semua pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mempunyai informasi dan pengetahuan yang relevan mengambil keputusan yang baik dan benar serta adanya insentif sepadan yang menggunakan informasi secara produktif dan terpercaya. Perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap perubahan struktur organisasi, biaya, dan manfaat langsung maupun tidak langsung harus dianalisis secara cermat dan hati-hati.

Perubahan struktur organisasi sebelum GG dan sesudah GG

Sebelum GG	Sesudah GG
<b>Struktur bersifat :</b> 1. Birokratik, 2. Multilevel 3. Disorganisasi dengan manajemen 4. Kebijakan, program, dan prosedur ruwet	<b>Struktur bersifat :</b> 1. Nonbirokratik, sedikit aturan 2. Lebih sedikit level 3. Manajemen berfungsi baik 4. Kebijakan, program dan prosedur sederhana, tidak menimbulkan ketergantungan
<b>Sistem :</b> 1. Tergantung pada beberapa sistem informasi kinerja	<b>Sistem :</b> 1. Tergantung pada sistem informasi kinerja



2. Distribusi informasi terbatas pada eksekutif	2. Distribusi informasi luas,
3. Pelatihan manajemen hanya pada karyawan senior	3. Memberikan pelatihan kepada karyawan yang membutuhkan
Budaya Organisasi :	Budaya Organisasi :
1. Orientasi ke dalam	1. Orientasi ke luar
2. Tersentralisasi	2. Memberdayakan sumber daya
3. Lambat dalam pengambilan keputusan	3. Pengambilan keputusan cepat
4. Realistis-idiologi	4. Terbuka dan berintegrasi
5. Kurang berani mengambil keputusan	5. Berani mengambil risiko

Dalam rangka pelaksanaan GG, maka organisasi modern dapat melakukan :

1. Kesadaran yang tinggi terhadap tingkat urgensi
2. Kerja sama tim yang baik dalam tatanan staf dan manajemen
3. Bisa menciptakan dan mengomunikasikan visi, misi, dan program dengan baik
4. Pemberdayaan semua karyawan dengan memerhatikan minat dan bakat
5. Memberikan delegasi wewenang dengan efektif

6. Mengurangi ketergantungan yang tidak perlu, dan
7. Mengembangkan budaya organisasi yang adaptif dan penggunaan analisis kinerja

## 2. Manajemen Perubahan

Sesuai dengan pertimbangan TAP MPR RI Nomor II/MPR/1999, masalah krisis multidimensi yang melanda negara Indonesia merupakan penghambat perwujudan cita-cita dan tujuan nasional. Reformasi di segala bidang, diharapkan dapat menjadi suatu langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan serta penguatan kepercayaan diri

Kemampuan para pemimpin penyelenggara pemerintahan dan masyarakat yang mengelola perubahan menjadi sangat krisis dan strategis, terutama sensitifitas dan responsibilitas terhadap tanda dan waktu perubahan tersebut diperlukan, khususnya dalam langkah penyelamatan, pemulihan, dan pengembangan. Ada dua hal yang perlu ditekankan dalam manajemen perubahan, yaitu mengapa ada perubahan yang berhasil dan ada yang gagal?

Perubahan yang gagal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Terlalu cepat puas
- b. Team work yang gagal
- c. Merumuskan visi, misi, dan program dengan kurang tepat
- d. Gagal menciptakan harapan sukses kepada seluruh anggota organisasi
- e. Menganggap perubahan sudah selesai dan hanya sekali memerlukan perubahan, dan



- f. Tidak bisa mengubah symbol, nilai, sikap dan norma organisasi dari yang lama menjadi budaya yang baru dalam organisasi.

Untuk mengurangi kegagalan dalam perubahan budaya organisasi, maka harus dihilangkan atau dikurangi dampak negatif dari perubahan seperti bubarnya organisasi, kehilangan pasar dan kepuasan pelanggan, penurunan gaji dan harus dikikis dengan menjelaskan mengapa organisasi perlu mengadakan perubahan, bagaimana tahap perubahan, bagaimana hasil akhir dari perubahan, dan bagaimana peran serta dari setiap anggota organisasi dalam perubahan. Untuk mencapai keberhasilan dalam perubahan, ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu:

1. Menetapkan strategi, pentingnya, dan tahapan perubahan
2. Mengembangkan semangat kerja sama tim yang tinggi
3. Mengembangkan strategi komunikasi untuk menyampaikan visi, misi, program perubahan, sehingga anggota dapat termotivasi, dan
4. Memberdayakan setiap anggota organisasi sesuai dengan kompetensi minat, dan bakat.

#### **F. Good Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah**

Upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrumen yang merefleksikan keinginan Pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dari indikator upaya penegakan hukum,

transparansi dan penciptaan partisipasi. Dalam hal penegakan hukum, UU No. 32 Tahun 2004 telah mengatur secara tegas upaya hukum bagi para penyelenggara pemerintahan daerah yang diindikasikan melakukan penyimpangan.

Dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sekurangnya terdapat 7 elemen penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung tergantung dari bersinergi satu sama lainnya, yaitu:

- a. Urusan Pemerintahan;
- b. Kelembagaan;
- c. Personil;
- d. Keuangan;
- e. Perwakilan;
- f. Pelayanan Publik dari
- g. Pengawasan.

Ketujuh elemen di atas merupakan elemen dasar yang akan ditata dari dikembangkan serta direvitalisasi dalam koridor UU No. 32 Tahun 2004. Namun disamping penataan terhadap tujuan elemen dasar diatas, terdapat juga hal-hal yang bersifat kondisional yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari grand strategi yang merupakan kebutuhan nyata dalam rangka penataan otonomi daerah di Indonesia secara keseluruhan yaitu penataan Otonomi Khusus NAD dari Papua, penataan daerah dari wilayah perbatasan, serta pemberdayaan masyarakat.

Setiap elemen tersebut disusun penataannya dengan langkah-langkah menyusun target ideal yang harus dicapai, memotret kondisi senyatanya dari mengidentifikasi gap yang ada antara target yang ingin dicapai dibandingkan kondisi riil yang ada saat ini.



Meskipun dalam pencapaian *Good Governance* rakyat sangat berperan, dalam pembentukan peraturan rakyat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi, namun peran negara sebagai organisasi yang bertujuan mensejahterakan rakyat tetap menjadi prioritas. Untuk menghindari kesenjangan didalam masyarakat pemerinah mempunyai peran yang sangat penting. Kebijakan publik banyak dibuat dengan menafikan faktor rakyat yang menjadi dasar absahnya sebuah negara. UU no 32 tahun 2004 yang memberikan hak otonomi kepada daerah juga menjadi salah satu bentuk bahwa rakyat diberi kewenangan untuk mengatur dan menentukan arah perkembangan daerahnya sendiri. Dari pemilihan kepala daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah (UU no 25 tahun 1999). Peraturan daerah pun telah masuk dalam Tata urutan peraturan perundang - undangan nasional (UU no 10 tahun 2004), Pengawasan oleh masyarakat.

Sementara itu dalam upaya mewujudkan transparansi dalam penyelenggaran pemerintahan diatur dalam Pasa 127 ayat (2), yang menegaskan bahwa sistem akuntabilitas dilaksanakan dengan kewajiban Kepala Daerah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintahan, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Sistem akuntabilitas semacam ini maka terdapat keuntungan yang dapat diperoleh yakni, akuntabilitas lebih dapat terukur tidak hanya dilihat dari sudut pandang politis semata. Hal ini merupakan antitesis sistem akuntabilitas dalam UU No. 22 Tahun 1999 dimana penilaian terhadap

laporan pertanggungjawaban kepala daerah oleh DPRD seringkali tidak berdasarkan pada indikator-indikator yang tidak jelas. Karena akuntabilitas didasarkan pada indikator kinerja yang terukur, maka laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak mempunyai dampak politis ditolak atau diterima. Dengan demikian maka stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih terjaga.

Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok maupun organisasi dengan cara: Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi atau nepotisme di lingkungan pemerintah daerah maupun DPRD. Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah.

Informasi dan pendapat tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait. Menurut Pasal 16 Keppres No. 74 Tahun 2001, masyarakat berhak memperoleh informasi perkembangan penyelesaian masalah yang diadukan kepada pejabat yang berwenang. Pasal tersebut berusaha untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat dalam menjalankan pengawasan.

#### **G.Implementasi Penerapan e-government di Indonesia**

E-Gov di Indonesia mulai dilirik sejak tahun 2001 yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses



demokrasi. Namun dalam perjalanannya inisiatif pemerintah pusat ini tidak mendapat dukungan serta respon dari segenap pemangku kepentingan pemerintah yaitu ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal.

Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan E-Government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi, dalam tahapan Layne & Lee baru masuk dalam Cataloguing. Data Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan tetapi 24% dari situs tersebut gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu operasi karena anggaran yang terbatas. Saat ini hanya 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. (Jakarta Post, 15 Januari 2003). Indikator lainnya adalah penetrasi internet baru mencapai 1,9 juta penduduk atau 7,6 persen dari total populasi Indonesia pada tahun 2001. Pada tahun 2002 dengan 667.000 jumlah pelanggan internet dan 4.500.000 pengguna komputer dan telepon, persentasi penggunaan internet di Indonesia sangatlah rendah. (Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII).

Pada tahun 2003, di era Presiden Megawati Soekarno Putri, Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang lebih fokus terhadap pelaksanaan E-Gov, melalui Instruksi Presiden yaitu Inpres Nomor 3 tahun 2003. Inpres ini berisi tentang Strategi Pengembangan E-gov yang juga sudah dilengkapi dengan berbagai Panduan tentang e-gov seperti: Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah; Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah; Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemda; dan lain-lain. Demikian pula berbagai panduan telah dihasilkan oleh Depkominfo pada tahun 2004 yang pada

dasarnya telah menjadi acuan bagi penyelenggaraan e-gov di pusat dan daerah. Dalam Inpres ini, Presiden dengan tegas memerintahkan kepada seluruh Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk membangun E-government dengan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi & Informasi.

Di lihat dari pelaksanaan aplikasi e-gov setelah keluarnya Inpres ini maka dapat dikatakan bahwa perkembangan pelaksanaan implementasi E-Gov masih jauh dari harapan. Data dari Depkominfo (2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia baru memiliki:

- a. 564 domain go.id;
- b. 295 website pemerintah pusat dan pemda;
- c. 226 website telah mulai memberikan layanan publik melalui website;
- d. 198 website pemda masih dikelola secara aktif.

Beberapa pemerintah daerah memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan Pemkot Surabaya sudah mulai memanfaatkan e-gov untuk proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement). Beberapa pemda lain juga berprestasi baik dalam pelaksanaan e-gov seperti: Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang.

Sementara itu dari sisi infrastruktur, layanan telepon tetap masih di bawah 8 juta satuan sambungan dan jumlah warung telekomunikasi (Wartel) dan warung Internet



(Warnet) yang terus menurun karena tidak sehatnya persaingan bisnis. Telepon seluler menurut data Depkominfo tersebut telah mencapai 24 juta ss. Meski kepadatan telepon tetap di beberapa kota besar bisa mencapai 11%-25%, kepadatan telepon di beberapa wilayah yang relatif tertinggal baru mencapai 0,2%. Jangkauan pelayanan telekomunikasi dalam bentuk akses telepon baru mencapai 65% desa dari total sekitar 67.800 desa yang ada di seluruh tanah air. Jumlah telepon umum yang tersedia hingga saat ini masih jauh dari target 3% dari total sambungan seperti ditargetkan dalam penyusunan Program Pembangunan Jangka Panjang II dahulu.

Sementara itu jumlah pelanggan dan pengguna Internet masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia. Hingga akhir 2004 berbagai data yang dikompilasi Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) memberikan jumlah pelanggan Internet masih pada kisaran 1,9 juta, sementara pengguna baru berjumlah 9 juta orang. Rendahnya penetrasi Internet ini jelas bukan suatu kondisi yang baik untuk mengurangi lebarnya kesenjangan digital (digital divide) yang telah disepakati pemerintah Indonesia dalam berbagai pertemuan Internasional untuk dikurangi.

Langkah-langkah perwujudan *Good Governance*:

- 1) Penguatan Fungsi dan Peran Lembaga Perwakilan
- 2) Kemandirian Lembaga Peradilan
- 3) Aparatur Pemerintahan yang Profesional dan Penuh Integritas
- 4) Masyarakat Madani (Civil Society) yang Kuat dan Partisipatif

## 5) Penguatan Upaya Otonomi Daerah



## KESIMPULAN

Setelah dibahas dalam bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana seseorang menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. Karena kewarganegaraan itu tidak dapat diwariskan begitu saja melainkan harus dipelajari dan di alami oleh masing-masing orang. Apalagi negara kita sedang menuju menjadi negara yang demokratis, maka secara tidak langsung warga negaranya harus lebih aktif dan partisipatif. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa harus memepelajarinya, agar kita bisa menjadi garda terdepan dalam melindungi negara. Gardu kokoh yang akan terus dan terus melindungi Negara walaupun akan banyak aral merintang di depan dan sebab itulah mahasiswa harus mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan
2.
  - a. Filsafat adalah suatu usaha pemikiran manusia yang sungguh-sungguh, secara sistematis dan radikal untuk mencari kebenaran sesuai dengan ruang dan waktu.
  - b. Filsafat juga berfungsi bagi kehidupan manusia dalam kehidupannya sebagai individu maupun anggota masyarakat.
  - c. Pancasila sebagai sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.



d. Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja, melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis merupakan dasar ontologis sila-sila Pancasila.

e. Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu: *pertama*, isi arti Pancasila yang umum universal. *Kedua*, isi arti Pancasila yang umum kolektif. *Ketiga*, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit.

f. Peranan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu dimensi ideal, dimensi realitas, dimensi fleksibilitas.

Ideologi besar yang ada yaitu: Ideologi Kapitalis-Liberalis, Ideologi Sosialisme, Komunis Karl Marx, Komunis Lenin-Stalin, Ideologi Nasionalis, Islam, dan Ideologi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia.

a. Identitas Nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu nation ( bangsa ) dengan ciri-ciri khas tertentu yang membuat bangsa bersangkutan berbeda dengan bangsa lain. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa Identitas Nasional Indonesia adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas.

b. Paham Nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman colonial dan Negara merupakan bangsa yang memiliki bangunan politik . Menurut

penganutnya paham nasionalisme bukanlah nasionalisme yang berwatak sempit (*chauvinisme*) melainkan bersifat toleran dan tidak memaksa

4.

a) Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan suatu negara yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

b) Jenis-jenis demokrasi antara lain Demokrasi Liberal, Demokrasi parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila.

c) Landasan-landasan Demokrasi yaitu terdapat pada Batang Tubuh UUD 1945, Pembukaan UUD 1945, Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

d) Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dibebaskan menyelenggarakan kebebasan pers, kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan, berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkan mengawasi jalannya pemerintahan.

e) Penerapan budaya demokrasi dapat dilakukan di lingkungan keluarga misalnya terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama, di lingkungan masyarakat dengan bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya, di lingkungan sekolah dengan bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membedakan dan lain-lain.

5.



- a. Dasar negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai kehidupan.
- b. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara.
- c. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.
- d. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup, sehingga pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia

6.

- a. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugrah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu
- b. Rule of Law adalah gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan
- c. Dalam peraturan perundang undangan RI paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (Undang-undang Dasar Negara). Kedua, dalam

ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.

- d. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Keadaan geografis Indonesia yang unik menuntut sebuah konsep geopolitik khusus yang dapat diterapkan dengan baik oleh bangsa Indonesia. Konsep geopolitik tersebut adalah Wawasan Nusantara. Berbeda dengan pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepada tujuan ekspansi wilayah, konsep geopolitik Indonesia, atau Wawasan Nusantara, justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep geopolitik yang paling tepat untuk negara Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau yang tersebar sepanjang jutaan mil.
8. Keadaan geografis Indonesia yang unik menuntut sebuah konsep geopolitik khusus yang dapat diterapkan dengan baik oleh bangsa Indonesia. Konsep geopolitik tersebut adalah Wawasan Nusantara. Berbeda dengan pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepada



tujuan ekspansi wilayah, konsep geopolitik Indonesia, atau Wawasan Nusantara, justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep geopolitik yang paling tepat untuk negara Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau yang tersebar sepanjang jutaan mil.

9.
  - a. Pemerintahan yang baik tidak di lihat dari sistem yang berbuat atau rancangan undang-undang yang di rumuskan, melainkan suatu sikap yang pasti dalam menangani suatu permasalahan tanpa memandang siapa serta mengapa hal tersebut harus di lakukan.
  - b. *Good Governance* merupakan pengertian dalam hal yang luas sehingga untuk memberikan arti serta defenisi tidak semudah mengartikan kata perkata melainkan perlunya aspek-aspek serta pemikiran yang luas menyangkut bidang tersebut.
  - c. Perlunya pengertian mengenai aspek-aspek dalam *Good Governance* sehingga tidak ada kesalahan dalam aplikasinya.
  - d. Penerapan *Good Governance* dalam sistem pemerintahan saat ini sangat di perlukan karena peranan perintah dalam memajukan suatu negara sangatlah besar.
  - e. Penerapan pelaksanaan *E-Government* di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi, dalam tahapan *Layne & Lee* baru masuk dalam *Cataloguing*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- Abdulkarim, Aim, "Kewarganegaraan Jilid 2". Bandung: Grafindo Media Pratama, 2004.
- A. Ubaedillah, Abdul Rozak "Pendidikan Warganegaraan (Demokrasi)" diterbitkan oleh ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- A, Harsawaskita, "Great Power Politics di Asia Tenggara: Suatu Pandangan Geopolitik", dalam *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Graha Ilmu, 2007.
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Bedjo dan Zainul Akhyar, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education untuk perguruan tinggi)*. Banjarmasin: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, 2009.
- Bedjo, Zainul Akhyar, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Banjarmasin: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, 2009.



# DAFTAR PUSTAKA

Darmodiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia, 1978

Driyarkara, SJN, *Perikan Filsafat*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1978

Frondizi, Risieri, *What Is Value?*, New York: Open Court Publishing, 1963.

Hall Stuart, David Held and Tony Mc. Grew, (ed), *Modernity and Its Future*, Cambridge: Polity Press, 1990.

Herdiawanto, Hery, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Erlangga, 1997.

Hidayat, I. Mardiyono, *Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

Indrawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media, tt,

Jalaluddin, dkk. *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010.

Kaelan, *Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2004.

-----, dan Ahmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2007.

Kansil, C. S. T, dan Christine. S. T. Kansil, *Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: Paradnya Paramita, 1971.

Kebung, Konrad, *Filsafat Itu Indah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008.

Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1980.

Mahfud MD, Moh, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Nopirin. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9*. Jakarta: Pancoran Tujuh, 1980.

Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975

-----, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9*. Jakarta: Pantjoran Tujuh, 1980.

Priyo, Sukonto Bambang, *Panduan Belajar Pendidikan Keanrganegaraan*, Yogyakarta: Primagama, 2009.

Salam, Burhanuddin, *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.



Schmid, JJ. Von Jhr, *Abli-Abli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, terjemahan R.R. Wiranto dkk, Jakarta: Pembangunan, 1980.

Shrode, William A and Don Voich Jr, *Organization and Management: Basic System Concept*, Malaiysia: Irwin Book Co, 1974.

Sutarto, *Aspirasi, PKN kelas X semester 2*. Surakarta: CV. Pustaka Manggala. 2006.

Srijanti dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Graha Ilmu Kerjasama dengan Universitas Mercu Buana, 2009.

Sumarsono, S, et. al, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001.

Winarto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, edisi kedua, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Zaelani, Endang Sukaya, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 2006.

WP Harsoyo, dkk, *Pendidikan Moral Pancasila*. Solo: Tiga Serangkai, 1982.

Yunus. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: CV Citra Sarana Grafika, 1999.

## B. Jurnal, Makalah dan Tulisan Lepas:

Poerwowidagdo, S.J. 1999. *Geoekonomi, Abstraksi ekonominya di kepulauan RI*. Tersedia: [28 Maret 2007].

Ruslan Abdulgani, *Pancasila dan Reformasi*, Makalah Seminar Nasional KAGAMA, 8 Juli 1998 di Yogyakarta

## C. Internet

Daniel. 2010. *Makna Pancasila*. <http://danielbiologi.blogspot.com/2010/1/0makna-sila-sila-pancasila.html>. (Online). Diakses hari Rabu, 23 Februari 2011.

Diana Agustia. 2010. *Makalah Tentang Kesatuan Sila-Sila*. <http://dianagustia.blogspot.com/2010/05/makalah-tentang-kesatuan-sila-sila.html>. (Online). Diakses hari Kamis, 24 Februari 2011.

Ade. 2010. *Penjelasan Sila-Sila Pancasila*. <http://kuliahad.wordpress.com/2010/07/30/pancasila-penjelasan-sila-sila>. (Online). Diakses hari Kamis, 24 Februari 2011.

Makarim, N.A. 2004. *Geopolitik*. Tersedia: [http://www.kompas.com/kompas\\_cetak/0412/28/utama](http://www.kompas.com/kompas_cetak/0412/28/utama) [28 Maret 2007].



Raden Somad. *Makalah Pancasila dan Kewarganegaraan*. <http://radensomad.com/makalah-pancasila-dan-kewarganegaraan.html>. (Online). Diakses hari Kamis, 24 Februari 2011.

Sarjoni. 2009. *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat*. <http://sarjoni.wordpress.com/2009/12/09/pancasila-sebagai-sistem-filsafat.html>. (Online). Diakses hari Kamis, 24 Februari 2011.

Uzey. 2009. *Pancasila Sebagai Sumber Nilai*. <http://uzey.blogspot.com/2009/09/pancasila-sebagai-sumber-nilai.html>. (Online). Diakses hari Rabu, 23 Februari 2011.

<http://www.blogger.com/profile/04006351443925303242>

<http://www.redcounter.net/>

<http://kumpulblogger.com/lemparbanner.php>

Wikipedia. 2007. Geopolitic.. Tersedia; <http://en.wikipedia.org/wiki/Geopolitic>.

Raika, Tika. 2012. Pengertian hak asasi manusia. (diakses lewat internet) [inforingankita.blogspot.com](http://inforingankita.blogspot.com).

Chieva, C. "Perkembangan dan pemikiran ham di Indonesia". 2012. (diakses lewat internet) [chieva-chiezchua.blogspot.com](http://chieva-chiezchua.blogspot.com)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Negara>

<http://polhukam.kompasiana.com/hukum/2012/03/29/2/450144/berkenalan-dengan-konstitusi-dan-konstitusionalisme.html>

<http://asmisiangka.blogspot.com/2013/02/hukum-dasar-tertulis-dan-hukum-dasar.html>

#### D. Perundang-Undangan

UUD 1945, Amandemen terakhir;  
UU 31/2002, tentang Partai Politik;  
UU 12/2003, tentang Pemilu DPR, DPRD, DPD;  
UU 22/2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; serta  
UU23/2003, Pemilu Presiden.



**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama lengkap penulis, yaitu Dr. Pansol Burlian, M. Hum, Penulis sekarang berdomisili di Jl. Pancasila No.61 Rt 54 D. K.

Pancasila No.61 Rt.51 Palembang, Sebagai tenaga pengajar di ...  
Mans sekarang berdomisili di Jln. Sapta Marga Ltg. Sehari-hari ...  
dan Dr. Pausol Burlian, M.

Sebagai tenaga pengajar di lingkungan Kota Palembang, Negeri maupun swasta, antara lain:

Regen maupun swasta, antara lain: di lingkungan Kota Palembang

Universitas Raden Fatah Palembang, PPS UNSRI Palembang, PPS IAIN

manajemen, Universitas Bina Darma pada Program M. S. dalam Manajemen, Universitas Bina Darma pada Program Ilmu

manajemen, Universitas Darma pada Program Magister Ilmu

gister Hukum, STTA Satya Negara, Universitas Muhammadiyah pada Megister Ilmu Hukum, STTA Satya Negara

STTA Satya Negara dan STLE Musi

Pendidikan terakhir calon Profesor ini adalah Program Doktor Ilmu Hukum.

Program Doktor Ilmu Hukum Profesor ini adalah S.3

... dan Universitas Diponegoro

Penulis pernah menulis berbagai buku tentang undang-undang (legislasi).

massa serta tampil sebagai pemakalah dan pelatihan. Karva juga menulis berbagai buku, jurnal dan

dan pelatihan. Karya tulis yang telah diterbitkan, antara lain: Patologi, buku, dan pelatihan. Karya tulis yang telah diterbitkan, antara lain: Patologi, buku, dan pelatihan.

... dan filsafat. Sedangkan dari buku, antara lain: Patologi Sosial Ditinjau dari

... dalam jurnal, antara lain: Transformasi...



Analysis Towards Egalitarian Characters, Aspek Hukum dan Teknologi, Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Moral, Penulis disamping sibuk menulis juga menyempatkan diri dalam berorganisasi, baik organisasi sosial keagamaan, maupun sosial kemasyarakatan, antara lain: Sekretaris BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Kota Palembang, Ketua Bidang Avokasi Hukum BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Prov. Sumatera, Anggota DKGI (Dewan Kehormatan Guru Indonesia) PGRI Kota Palembang, Ketua Bidang Pembinaan Umat BAMUKOI (Badan Musyawarah Keluarga Ogan Ilir) Pusat,

Hung Penulis sekarang berdomisili di Kota Palembang sebagai tenaga pengajar di lingkungan Kota Palembang. Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi, antara lain: di Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang, PPS IAIN Raden Fatah Palembang, PPS UINRI pada Program Ilmu Hukum, Universitas Dharma pada Program Magister Pendidikan, Universitas Islam Siswa pada Magister Pendidikan, Universitas Muhammadiyah pada Program Magister Hukum, STIA Selayang Negara dan STIE Mui Palembang.

Pendidikan terakhir calon Profesor ini adalah S.2 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, disesikan pada tahun 2013 dengan keparanan bidang perundang-undangan (legislatif).

Penulis pernah menulis berbagai buku, jurnal dan media massa serta tampil sebagai pembicara di berbagai seminar dan pelatihan. Karya tulis yang telah diterbitkan berupa buku, antara lain: Patologi Sosial Dinjau dari Sosiologis, Yuridis dan Filosofis, Sedangkan karya tulis yang dimuat dalam jurnal, antara lain: Transformation: Himpunan

## RIWAYAT HIDUP EDITOR



Nama lengkap editor ini adalah Suryadi, SH, M.H. Lahir di Palembang pada tanggal 6 Oktober 1962. Sehari-hari beraktivitas sebagai PNS di lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang dengan jabatan Kepala Sub Bagian Akademik Kemahasiswaan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang dan hampir sudah belasan tahun sebagai Dosen Luar Biasa (Honorar) di berbagai Fakultas dalam lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang dengan mengampuh mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan terakhir editor ini S.2 dengan program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.

Ditengah-tengah kesibukannya Megister Hukum ini menyempatkan diri untuk menulis jurnal, maupun di media massa yang terbit di Kota Palembang.